

Capaian Kinerja
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
2014 - 2019



Capaian Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 - 2019

Pelindung:

Didik Suhardi

Penanggung Jawab:

Hendarman

Pengarah Materi:

Rusprita Putri Utami
Kurniawan
Eka Nugrahini Ciptawati
Diana Damey

Kontributor Artikel:

Seluruh unit utama Kemendikbud

Penulis Artikel

Dipo handoko
Ahmad Fauzi Ramdani
Mukti Ali

Editor:

Dwiyani Widhiharsi Kusuma Putri
Ian Iapoh Morda Rumbai Simamarta
Kosasih Ali Abu Bakar
Marista Rita Sinaga
Miftahussururi
Yulaika Ernawati
Abdul Rachman Pambudi
Shara Zakia Nissa
Rusydina Ayu Triastika
Prabaria Vesca Yulianandra
Kadek Jeny Femila Devi
Anditya Pratama
Rika Hidayat
Paradhita Zulfa Nadia
Andreas Yoga Aditama
Rizki Muhammad Ramdhan

Diterbitkan oleh:

Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat –
10270
paska@kemdikbud.go.id
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN 2014-2019

Kepala Editor:

Ananto Kusuma Seta
Arie Budhiman
James Modouw
Soeparto
Alfan Alfian
Hamid Muhammad

Editor Foto, Desain Sampul, dan Tata Letak

Prista Rediza
Muhammad Abdurrahman Aditama
Muhammad Firdaus Zubaedi

Sekretariat

Ana Arham
Yuliah Suwarni

Keuangan

Gigih Anggana Yuda
Diana Damey

TAKRIF:

Sila hubungi surat elektronik di samping
untuk mendiskusikan isi Buku ini lebih lanjut

ISBN

Assalamuálaikum Wr.Wb
Shalom
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan



Hadirnya Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya peradaban manusia, menegaskan hadirnya abad kreatif yang menempatkan informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan jejaring sebagai sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, korporasi, dan negara. Hal tersebut telah memunculkan tantangan baru yang berbeda dengan era sebelumnya. Di sinilah letak peran sentral dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kapital intelektual yang mampu beradaptasi dan diharapkan memiliki keunggulan kompetitif di dalam era persaingan global.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berkomitmen melakukan pembangunan SDM yang berkeadilan, berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan dalam rangka menunaikan amanat Nawacita. Buku ini mengangkat Capaian Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019. Melalui buku ini, semoga menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk terus bekerja ikhlas dan tulus berkontribusi tak kenal henti bagi upaya menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan Indonesia.

Akhirnya, atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para insan pendidikan dan kebudayaan di seluruh penjuru negeri. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah sebuah awal dari proses perubahan besar dalam rangka menyiapkan Generasi Emas 2045 yang unggul, berkarakter, cerdas, dan berdaya saing.

Terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk dan kekuatan, kepada kita semua. Amin.

Selamat membaca.

Wassalamuálaikum Wr. Wb.

Jakarta, Oktober 2019

Muhadjir Effendy
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Isi



Bab 1

Penguatan GTK dalam Ekosistem Pendidikan - 1

- Pendahuluan - 2
- Merencanakan dan Menata Kebutuhan Guru - 4
- Meningkatkan Kualifikasi Akademik Guru - 9
- Menuntaskan Sertifikasi Guru - 13
- Meningkatkan Kompetensi Guru Berbasis Kelompok Kerja - 18
- Mewujudkan Kesejahteraan dan Perlindungan Guru - 22
- Mengapresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan dengan Beragam Penghargaan - 28



Bab 2

Memajukan Kebudayaan dan Bahasa, Memperkuat Jati Diri Bangsa - 32

- Pendahuluan - 33
- Pemajuan Kebudayaan Indonesia - 35
- Penguatan Pelaku Kebudayaan Komunitas Budaya - 40
- Pelestarian Cagar Budaya - 45
- Revitalisasi Museum - 50
- Revitalisasi Desa Adat - 53
- Warisan Budaya Takbenda - 57
- Uji Kemahiran Bahasa Indonesia - 61
- Program Bahasa Indonesia Untuk Penutur Asing - 65
- Pengembangan Kosakata dan Istilah - 69
- Pembinaan Bahasa Indonesia dan Penggunaan Bahasa di Ruang Publik - 73
- Pelindungan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah - 77
- Rumah Peradaban - 82
- Darmasiswa: Beasiswa Untuk Mahasiswa Asing - 87
- Festival Film Indonesia - 91
- Perkembangan Sensor Film - 95



Bab 3

Meningkatkan Akses Pendidikan Berkeadilan, Berkualitas, Inklusif, dan Berkesetaraan - 100

- Pendahuluan - 101
- Pembangunan Wilayah Perbatasan - 103
- Zonasi Pendidikan untuk Percepatan Pemerataan Pendidikan yang Adil dan Berkualitas - 111
- Menuntaskan Pendidikan Untuk Seluruh Anak Indonesia - 117
- Meluaskan Akses, Meningkatkan Mutu - 123
- Memenuhi Standar Sarana Prasarana Pendidikan - 128
- Pendidikan Kesetaraan "Menjangkau yang Tidak Terjangkau" - 134
- Satu Desa Satu PAUD - 139
- PAUD Holistik Integratif - 144
- Buku Pendidikan Berkualitas Berbasis Mutu, Murah, dan Merata - 149
- Menjaring Masyarakat Berprestasi Hingga Daerah 3T - 154
- TIK dan Akses Internet Mendongkrak Mutu Pendidikan 3T - 158





Bab 4

Pembelajaran Bermutu, Wujudkan Revolusi Karakter - 162

- Pendahuluan - 163
- Penguatan Pendidikan Karakter - 165
- Prestasi Siswa Indonesia - 171
- Pemberantasan Buta Aksara - 176
- Gerakan Literasi Nasional - 181
- Gerakan Literasi Sekolah - 186
- Gerakan Literasi Masyarakat - 192
- Pelibatan Keluarga Dalam Pendidikan - 199
- Penilaian Pendidikan - 205
- Mengembangkan SDM Unggul Melalui Akreditasi PAUD dan PNF - 211
- Pengembangan Kurikulum 2013 - 216
- Rumah Belajar: Belajar Dengan Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja - 222
- Digitalisasi Sekolah, Merespon Revolusi Industri 4.0 - 227
- SEAMEO di Bawah Kepemimpinan Muhadjir Effendy - 233



Bab 5

Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Meningkatkan Daya Saing Bangsa - 239

- Pendahuluan - 240
- Revitalisasi Pendidikan Vokasi Pada SMK - 242
- Revitalisasi Pendidikan Vokasi Pada Pendidikan Khusus - 247
- Unjuk Keterampilan di Level Dunia - 254
- Bekali Kecakapan Kerja dan Wirausaha Melalui Kursus dan Pelatihan - 259



Bab 6

Reformasi Tata Kelola Pendidikan melalui Pelibatan Publik - 264

- Pendahuluan - 265
- Reformasi Birokrasi Internal - 267
- Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi - 272
- Integrasi Layanan Perpustakaan: Pengembangan Serba Digital - 277
- Unit Layanan Terpadu: Pelayanan Publik yang Responsif - 282
- Meningkatkan Kinerja Pegawai Dengan Sistem Digital - 287
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud - 294
- Dapodik- Sistem Data Untuk Membangun Pendidikan Nasional - 299
- Neraca Pendidikan Daerah (NPD), Acuan Prioritas Pembangunan Pendidikan di Daerah - 304





Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan Menuju Indonesia Unggul



Sesungguhnya pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 yaitu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menghadapi Revolusi Industri 4.0, bangsa Indonesia memiliki berbagai tantangan dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi Indonesia, tantangan ini perlu diubah menjadi peluang. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus berikhtiar melakukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui upaya menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan yang berorientasi kepada dinamika kemajuan zaman.

Dalam rangka mendukung ikhtiar tersebut, Kemendikbud terus berupaya meningkatkan capaian kinerja tahun 2014-2019 melalui program-program prioritas pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Diawali sejak periode Mendikbud Anies Baswedan tahun 2014-2016, berbagai kebaruan yang hadir di antaranya:

1. Tiga terobosan Ujian Nasional (UN): UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa, menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan menyusun Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN);

2. Lahirnya program Guru Garis Depan (GGD) sebagai pengembangan dan penajaman Program Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T);
3. Penyatuan pendataan semua tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
4. Pelibatan orang tua dalam proses pendidikan melalui kegiatan Hari Pertama Sekolah (HPS);
5. Menghapus perpeloncoan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang sebelumnya lebih dikenal dengan Masa Orientasi Siswa (MOS);
6. Penguatan tata kelola pembangunan pendidikan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui Neraca Pendidikan Daerah (NPD). NPD merupakan platform informasi potret kinerja pendidikan diseluruh Provinsi/Kabupaten/Kota. Melalui NPD diharapkan dapat menjadi basis informasi dalam pengambilan kebijakan dan mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.

Pada periode selanjutnya, tepatnya pada 27 Juli 2016, terjadi pergantian pucuk pimpinan Kemendikbud kepada Mendikbud Muhadjir Effendy. Pada saat serah terima, Mendikbud Muhadjir Effendy berkomitmen untuk meneruskan praktik baik yang sudah dimulai pada masa Mendikbud Anies Baswedan dan akan melakukan percepatan pelaksanaan program terutama program-program prioritas yang diamahkan Presiden Joko Widodo. Selama periode 2016-2019, telah banyak berbagai terobosan yang dilakukan oleh

Mendikbud Muhadjir Effendy, di antaranya:

1. Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui penyaluran Kartu Indonesia Pintar, sekira 17,92 juta siswa telah mendapat manfaat program ini yaitu meningkatnya angka partisipasi pendidikan anak pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Melalui terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia, telah dilakukan revitalisasi SMK melalui penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum, inovasi pembelajaran, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan perguruan tinggi, standarisasi sarana dan prasarana utama serta penataan/ pengelolaan kelembagaan.
3. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai bagian dari implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental. Melalui lahirnya Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Kemendikbud melakukan restorasi pendidikan yaitu reformasi sekolah, penguatan peran keluarga, dan peran aktif masyarakat dalam rangka menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 yang berkarakter, cerdas dan berdaya saing.
4. Pemajuan Kebudayaan yang mempertegas posisi kebudayaan nasional sebagai ruh pembangunan pendidikan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud melakukan berbagai upaya dalam rangka melakukan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terhadap 10 Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Pekan Kebudayaan Nasional,

Indonesiana, Seniman Masuk Sekolah, Belajar Bersama Maestro, dukungan Fasilitas Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan, dan sebagainya.

5. Zonasi Pendidikan. Kemendikbud melakukan sebuah terobosan dalam mereformasi pendidikan melalui sistem zonasi. Dengan 2.580 zona pendidikan yang telah diidentifikasi, diharapkan menjadi langkah awal untuk pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas. Kebijakan zonasi bukan berhenti pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saja melainkan akan meliputi penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, berbagi sumber daya, pengintegrasian pendidikan formal dan non formal, serta penataan ekosistem pendidikan. Dengan adanya sistem zonasi, pendidikan yang berkualitas tidak hanya bisa didapatkan di kota-kota besar, tetapi juga di daerah, bahkan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
6. Penguatan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui portal Rumah Belajar sebagai sarana pembelajaran abad 21 bagi pendidik dan peserta didik. Portal Rumah Belajar telah dimanfaatkan oleh lebih dari 192 ribu guru dan 485 ribu peserta didik.
7. Percepatan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2017. Kemendikbud melakukan pengembangan penerapan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi, pemberantasan tuna aksara dan penerapan pendidikan kurikulum kontekstual Papua, penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru dan pemberdayaan Kolese Pendidikan Guru, peningkatan kualitas guru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (*e-learning*), pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi bagi putra putri orang asli Papua.

8. Program Digitalisasi Sekolah khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kemendikbud telah meluncurkan program Digitalisasi Sekolah sebagai terobosan baru di dunia pendidikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek pengajaran. Program ini diharapkan mempermudah proses belajar mengajar dan sebagai implementasi dari *new learning*, yang disiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Karakteristik *new learning* tersebut adalah *student-centered*, *multimedia*, *collaborative work*, *information exchange*, serta *critical thinking* dan *informed decision making*.

Selain terobosan diatas, berbagai kebijakan di era kepemimpinan sebelumnya terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy diantaranya pelaksanaan UNBK, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bekerjasama dengan TNI AD, penguatan peran tripusat pendidikan (sekolah, orang tua, masyarakat), integrasi Data Pokok Pendidikan, Kebudayaan, PAUD Dikmas, dan Bahasa, serta Neraca Pendidikan Daerah (NPD).

Berbagai capaian kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan kewajiban bersama. Oleh karena itu, diperlukan dukungan komitmen dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, pelaku bisnis dan masyarakat/komunitas, agar segenap sumberdaya yang dimiliki dapat mendukung kepentingan dunia pendidikan dan kebudayaan. Kedepan, kita berharap dapat menyaksikan keunggulan Indonesia sebagai bangsa adidaya budaya dengan pendidikan yang berkemajuan.





Rekomendasi



Berbagai capaian kinerja di bidang pendidikan dan kebudayaan tidak terlepas dari kerja sama seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di pusat maupun daerah. Capaian tersebut sebagai implementasi dari amanat peraturan perundangan, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
6. Nawacita (Sembilan Agenda Prioritas);
7. Trisakti: Mewujudkan Generasi yang Berkepribadian dalam Kebudayaan;
8. Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
9. Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia;
10. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
12. Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Adapun sejumlah rekomendasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dapat menjadi pertimbangan untuk segera dituntaskan pada pemerintahan selanjutnya adalah sebagai berikut.



Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan, Mewujudkan Pembelajaran Abad 21

1. Redistribusi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dilakukan berdasarkan sistem zonasi pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis setiap daerah.
2. Pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru secara periodik setiap tahun sesuai dengan peta kebutuhan guru di sekolah dan daerah, serta pengangkatan guru sesuai dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Sertifikat Profesi Guru perlu dievaluasi secara berkala, dilakukan pemeringkatan tunjangan sesuai kualitas, dan diusulkan agar berlaku selama 5 tahun, serta pemberian tunjangan profesi guru berbasis kinerja yang dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar dengan *baseline* 24 jam perminggu.
4. Perlu diperkuat *multi grade teaching* (pembelajaran kelas rangkap) sebagai upaya menjawab permasalahan tidak meratanya distribusi guru, terutama di daerah 3T.
5. Pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Belajar Guru di daerah melalui berbagai moda terutama melalui teknologi pembelajaran digital, serta pengembangan indikator penilaian kinerja guru yang didasarkan pada daftar hadir guru dan prestasi hasil belajar peserta didik. Kriteria penilaian kinerja guru disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.
6. Perlu didorong jenjang karier guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang profesional dan sistematis serta penguatan KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan.
7. Pendataan GTKPNS, PPPK, honorer, GTK yang akan pensiun, serta penyelesaian perekrutan, penempatan, dan mutasi GTK yang belum profesional.
8. Penguatan integrasi vertikal dengan Kemenristekdikti dalam menyiapkan GTK yang kompeten, siap mengajar, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat sehingga memiliki kompetensi profesional abad 21 yang memadai sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.



Pemajuan Budaya dan Bahasa Indonesia, Memperkuat Jati Diri Bangsa

1. Pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota perlu menerbitkan regulasi turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang dapat dioperasionalkan 5 tahun ke depan, dengan ruang lingkup:
 - a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan melalui pendidikan dan pelatihan, serta pemerataan persebaran kompetensi dan keahlian.
 - b. Menyusun kebijakan tentang skema pembiayaan Pemajuan Kebudayaan dengan mengalokasikan minimal 2,5% anggaran khusus dari APBN/APBD atau Bantuan Operasional Kebudayaan (BOK).
 - c. Menetapkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk berbagai profesi dibidang Kebudayaan.
2. Konsolidasi program pembangunan di bidang kebudayaan lintas kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator.
3. Penguatan pelibatan publik dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan melalui Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan, Majelis Adat, Komunitas, dan masyarakat lainnya dengan memanfaatkan ruang-ruang publik.
4. Perlu segera dibentuk lembaga pengelola dana abadi kebudayaan yang dapat mendukung berbagai kegiatan pemajuan kebudayaan di setiap daerah.
5. Perlu diperkuat upaya perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terhadap 10 objek Pemajuan Kebudayaan melalui dukungan program Seniman Masuk Sekolah, Belajar Bersama Maestro, Pekan Kebudayaan Nasional, Indonesiana, dan sebagainya untuk merawat persatuan, toleransi, dan kebinekaan.

6. Setiap daerah perlu didorong dalam menetapkan regulasi tentang pelestarian bahasa daerah dan pengutamaan bahasa negara (bahasa Indonesia), serta mengembangkan model pelestarian bahasa daerah yang dapat diimplementasikan baik melalui jalur sekolah (muatan lokal) maupun nonsekolah (berbasis komunitas).
7. Dukungan pengembangan industri film karya anak bangsa dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya dan agenda pembangunan karakter bangsa.
8. Pendampingan kepada pemerintah daerah yang belum menyelesaikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai data inventarisasi Obyek Pemajuan Kebudayaan.



Peningkatan Akses Pendidikan Berkeadilan, Berkualitas, Inklusif, dan Berkesetaraan

1. Diperlukan penajaman pemahaman tentang tata kelola pendidikan berbasis zonasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Diperlukan kesepakatan bersama antara Kemendikbud, Kemenag, dan Kemdagri dalam hal tata kelola pendidikan berbasis zonasi dan pengintegrasian data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data siswa melalui Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dalam rangka optimalisasi sistem zonasi.
3. Sejalan dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan melalui zonasi, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan:
 - a. Pemetaan dan redistribusi guru yang berkompeten dan berkualitas agar dapat merata dalam setiap zona;
 - b. Peningkatan kualitas guru di seluruh daerah di setiap zona;
 - c. Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah; dan
 - d. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh Pemerintah Daerah.

4. Dukungan percepatan pembangunan bidang pendidikan di Papua dan Papua Barat yaitu penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama, pengembangan pendidikan vokasi, pemberantasan tuna aksara, penerapan kurikulum kontekstual, penyediaan tambahan kuota guru dan pemenuhan kekurangan guru, pemberdayaan Kolese Pendidikan Guru (KPG), peningkatan kualitas guru dan pemanfaatan *e-learning* serta pemberian kesempatan yang luas untuk menempuh pendidikan menengah dan tinggi.
5. Perlu penajaman penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan melihat aspek tepat sasaran, tepat waktu pendistribusian dan pencairan, dan tepat guna melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan setiap anak sekolah menuju Wajib Belajar 12 tahun.
6. Perlu segera dibuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wajib Belajar 12 Tahun.
7. Penyediaan dan distribusi buku bermutu, murah, dan merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemerataan buku di Taman Bacaan Masyarakat, perpustakaan desa dan sekolah, serta lembaga sejenis.
8. Pemerintah daerah didorong dalam pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% APBD (di luar anggaran transfer daerah) yang dapat dimanfaatkan guna peningkatan mutu pendidikan, program Satu Desa Satu PAUD, serta memberikan bantuan afirmasi bagi peserta didik yang tidak mampu.

D Pembelajaran Bermutu Dalam Mewujudkan Revolusi Karakter

1. Setiap sekolah melalui pemerintah daerah perlu diperkuat dalam mengembangkan kolaborasi tripusat pendidikan yaitu sekolah, orang tua dan masyarakat serta meningkatkan kerja sama dengan sumber-sumber belajar di luar sekolah dalam rangka mendukung implementasi Penguatan Pendidikan Karakter, Gerakan Literasi Nasional, pengembangan kurikulum, dan berbagai kebijakan lainnya di bidang pendidikan dan kebudayaan guna mewujudkan Generasi Emas 2045 yang unggul, berkepribadian, cerdas, dan berdaya saing.

2. Penguatan setiap sekolah melalui guru-guru untuk terus meningkatkan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan, mengoptimalkan kekayaan muatan lokal, dan mendorong pembelajaran berbasis digital, karena mutu pembelajaran dan upaya menumbuhkan karakter dan kompetensi siswa sangat dipengaruhi oleh kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah.
3. Penguatan kemampuan enam literasi dasar di sekolah, keluarga, dan masyarakat, yaitu literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan melalui kebijakan gerakan literasi nasional.
4. Pembinaan berkelanjutan ekosistem pendidikan (peserta didik, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah) yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di berbagai kompetisi bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
5. Pendidikan keluarga perlu diperkuat sebagai pendidikan pertama dan utama bagi penumbuhan karakter anak, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Penguatan pemetaan capaian pendidikan secara nasional melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer yang berintegritas dengan terus meningkatkan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yang sejalan tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.



Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Meningkatkan Daya Saing Bangsa

1. Penguatan dukungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya enam isu strategis prioritas revitalisasi SMK yaitu penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum, inovasi pembelajaran, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan perguruan tinggi, standarisasi sarana dan prasarana utama serta penataan/ pengelolaan kelembagaan.
2. Pemerintah provinsi perlu didorong menuntaskan Peta Jalan Revitalisasi Vokasi yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur, melakukan penataan kelembagaan SMK dan mengembangkan SMK unggulan sesuai potensi wilayah masing-masing, serta pembentukan tim revitalisasi pendidikan vokasi yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah terkait, DUDI, perguruan tinggi, dan organisasi profesi yang dikoordinasikan Bappeda Provinsi.
3. Perlu dibuat payung hukum agar setiap DUDI dapat memberikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada lembaga pendidikan (SMK atau Lembaga kursus), pemberian insentif bagi DUDI yang membantu pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, realisasi program usulan dari DUDI tentang pemanfaatan tenaga kerja pensiun dari DUDI sebagai instruktur SMK dan *parent company*, serta payung hukum yang lebih fleksibel bagi guru SMK untuk terus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan teknologi dan pasar kerja.
4. Perlu pemenuhan guru vokasi, peningkatan kompetensi guru vokasi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana SMK/SLB berupa peralatan praktik keterampilan.
5. Perlu didorong SMK menjadi sekolah pencetak wirausaha dan mengembangkan program inkubasi bisnis untuk melahirkan wirausahawan baru melalui pembinaan kreativitas dan pengembangan ide baru yang inovatif baik secara mandiri maupun kerja sama secara sistematis dengan DUDI.

6. Penuntasan kekurangan lisensi untuk skema sesuai kompetensi keahlian pada 840 Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) SMK terlisensi oleh BNSP dan penambahan 360 LSP-P1 SMK terlisensi baru oleh BNSP, serta harmonisasi sistem sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan DUDI untuk pengakuan sertifikasi dan harmonisasi sistem sertifikasi antara SMK, SMA-LB, Paket C Vokasi, serta lembaga kursus dan pelatihan.
7. Penguatan program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan, serta pengembangan wirausaha yang berkualitas dengan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja dan kemandirian sesuai dengan tantangan zaman.
8. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka mengidentifikasi jenis keterampilan yang dibutuhkan, serta pemenuhan alokasi tenaga kerja disabilitas sebanyak 2% pada instansi pemerintahan dan 1% pada perusahaan swasta sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



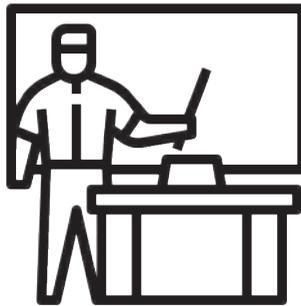
Mendorong Reformasi Tata Kelola Pendidikan melalui Pelibatan Publik

1. Pengembangan implementasi reformasi birokrasi internal dan zona integritas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta penguatan kerja sama berupa pengawasan oleh masyarakat terhadap dana pendidikan yang diterima oleh setiap satuan pendidikan.
2. Penguatan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan memperkuat alur koordinasi yang solid antar satuan kerja sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, memberikan saran, konsultasi secara daring, dan memperoleh kepastian informasi yang baik dan profesional.

3. Penguatan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) melalui usulan terbitnya Permendikbud tentang Penilaian Kompetensi Pegawai dan pengembangan karir dengan sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.
4. Perlu didorong sistem pendataan pendidikan dan kebudayaan berskala nasional dengan mengembangkan data pokok pendidikan dan data pokok kebudayaan yang terpadu, akurat, terpercaya, dan terkini melalui kolaborasi, koordinasi dan integrasi data dengan Kementerian/Lembaga terkait.
5. Pengembangan *Public Private Partnership* untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan mengetahui keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
6. Penguatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya perluasan pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai platform informasi potret kinerja pendidikan di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat menjadi basis informasi dalam pengambilan kebijakan dan acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta mendorong pemenuhan alokasi anggaran pendidikan 20% dalam APBD murni.







Bab 1

Pemenuhan Kebutuhan Guru dan
Tenaga Kependidikan, Mewujudkan
Pembelajaran Abad 21

Pendahuluan

“Guru merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Proses menyiapkan SDM unggul dalam konteks dunia pendidikan, baik sekolah umum maupun madrasah, tentu tidak lepas dari peran guru. Tidak bisa tidak, yang pertama-tama harus dibenahi adalah kualitas para gurunya.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tema kebijakan pemerintah di tahun mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 fokus pada pengembangan SDM. “Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia,” kata Presiden Joko Widodo saat membaca Pidato Presiden Republik Indonesia mengenai keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun Anggaran 2020 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2019.

Visi Kemendikbud 2014-2019, yakni “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”, memiliki arah tegas untuk melahirkan insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter. Setidaknya ada tujuh elemen ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang menjadi sasaran dan diharapkan mampu memberikan pengaruh kuat (*impact*) dan hasil (*outcome*) bagi penyiapan insan atau SDM berkualitas dan berkarakter. Elemen pendidikan dan kebudayaan itu meliputi: 1) sekolah yang kondusif; 2) guru sebagai penyemangat; 3) orang tua yang terlibat aktif; 4) masyarakat yang sangat peduli; 5) industri yang berperan penting; 6) organisasi profesi yang berkontribusi

besar; dan 7) pemerintah yang berperan optimal.

Elemen guru, dan tenaga kependidikan menjadi kunci penting untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pemerintah dan pusat pemerintah daerah harus mampu menjamin ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antarprovinsi, kabupaten, dan kota, serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Sejumlah kebijakan prioritas untuk menguatkan peran guru dan tenaga kependidikan sudah dilaksanakan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sepanjang kurun tahun 2015-2019. Kebijakan prioritas itu meliputi perencanaan dan penataan kebutuhan; peningkatan kualifikasi akademik; penuntasan sertifikasi guru; peningkatan kompetensi berbasis kelompok kerja profesi; serta pemberian penghargaan, kesejahteraan, dan perlindungan.

Merencanakan dan Menata Kebutuhan Guru

*“Guru adalah pembangkit inspirasi,
memberikan ilmu kepada kita, membimbing
anak-anak kita, membimbing kita semuanya
agar kita bisa meningkatkan kualitas sumber
daya yang ada”.*

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan pembagian tugas konkuren antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah tentang tata kelola karier pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki kewenangan untuk mengendalikan formasi, pemindahan, dan pembinaan. Perhitungan kebutuhan guru menjadi perangkat yang dipakai untuk menjalankan amanat UU tersebut.

Psikotes pada Seleksi Guru untuk Sekolah
Indonesia Luar Negeri (SILN)





Capaian Program



Perencanaan dan penataan kebutuhan guru

Mencakup

Pengendalian Formasi

Pemindahan

Pengembangan

• Titik Awal



Sebelum UU No. 23 Tahun 2014, Kemendikbud tidak mempunyai wewenang dalam mengatur pemenuhan kebutuhan guru.

• Capaian Program



Kemendikbud melakukan intervensi sesuai dengan wewenang yang diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014.

2015 - 2017	2018	2019
Pengawasan pengangkatan 7.054 Guru PNS di 93 kabupaten tertinggal (Guru Garis Depan)	Penyampaian kebutuhan 100 ribu guru hingga tingkat sekolah dan mata pelajaran ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Pendampingan Kemenpan RB dalam melakukan rekon data formasi CPNS dengan pemerintah daerah



Inovasi



Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penataan dan Pemerataan
Guru yang bernama SIMRASIO
(simrasio.gtk.kemdikbud.go.id)



Dampak



SIMRASIO membantu daerah
dalam menghitung
kebutuhan guru untuk usulan
formasi CPNS guru

Ketepatan pengangkatan
CPNS guru sesuai dengan
kekurangan guru di sekolah



Testimoni



"Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Perencanaan dan Penataan Kebutuhan Guru sudah digelar pada tahun 2019. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dinas pendidikan untuk mengetahui kekurangan guru-guru di sekolah-sekolah,"

(Darlisman, Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Disdikpora Kota Padang Panjang)



Rekomendasi



SIMRASIO digunakan oleh Pemda untuk mengusulkan formasi CPNS guru



Perhitungan kebutuhan guru dari SIMRASIO menjadi dasar penetapan formasi CPNS

Meningkatkan Kualifikasi Akademik Guru

“Guru tidak boleh berhenti untuk belajar, harus terus menerus belajar. Kalau tidak bisa nanti disalip oleh anak didik kita yang sekarang keingintahuan peserta didik semakin tinggi sekali.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Peningkatan kualifikasi akademik guru melalui pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik bagi guru bertujuan untuk memotivasi guru menyelesaikan studi sampai memperoleh ijazah S1/DIV. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1/DIV wajib ditingkatkan kualifikasi akademiknya supaya sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud untuk guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1/DIV.

Peningkatan Kualifikasi Guru Meningkatkan
Kualitas Pengajaran





Capaian Program

Peningkatan kualifikasi akademik guru dilakukan melalui pemberian bantuan biaya peningkatan kualifikasi akademik

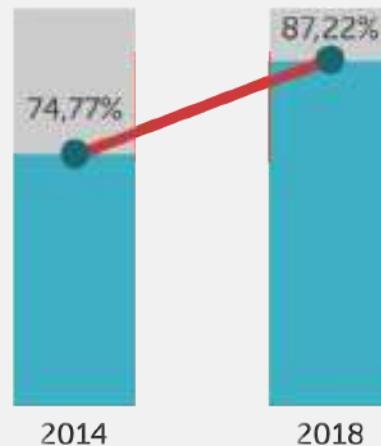
- Titik Awal



Guru belum S1/D4
25,23%.

- Capaian Program

Presentase Guru Berkualifikasi S1/D4



Inovasi



Bantuan pemerintah peningkatan kualifikasi akademik S-1/D-IV.



Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar



Pendaftaran Bantuan secara Daring



Dampak



- Guru termotivasi menyelesaikan studi S1/DV
- Kinerja guru meningkat
- Kualitas pendidikan meningkat
- Biaya akademik yang ditanggung guru berkurang



Testimoni



"Di Bidang Ketenagaan kita menyediakan anggaran untuk kualifikasi guru dan programnya diperuntukan untuk guru kita yang belum berkualifikasi S1 karena amanat Undang-Undang guru itu menjelaskan bahwa pendidik atau guru itu kualifikasi minimalnya adalah S1 atau DIV."

(Taufikurahman, Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan, Dinas Pendidikan Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan)



Rekomendasi



Memerlukan konsistensi dan komitmen penyelenggaraan bantuan untuk menuntaskan permasalahan kualifikasi guru

Menuntaskan Sertifikasi Guru

"Saya ingin menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan inpassing dan sertifikasi."

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Sertifikasi guru merupakan salah satu implementasi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikat guru menjadi bukti formal pengakuan pemerintah kepada guru profesional yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi. Menurut ketentuan pada bagian Penutup UU Guru dan Dosen, semua guru harus sudah memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak berlakunya UU Guru dan Dosen, atau maksimal tahun 2015.

Ketentuan baru pelaksanaan sertifikasi guru mengacu pada PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Pasal 66 PP Guru menegaskan "Bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik SI/ DIV tetapi belum memperoleh sertifikat pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru".

Kegiatan Simposium Guru





Capaian Program



Sertifikat guru sebagai bukti formal guru profesional



Penuntasan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGDJ)

• Titik Awal

2014

Jumlah Guru
Lulus Sertifikasi

110.502

• Capaian Program

Akumulasi Guru
Lulus Sertifikasi





Inovasi



PPGDJ menggantikan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)



PPGDJ di 38 Perguruan Tinggi



Pendidikan dengan *Hybird Learning*



Bekerjasama dengan Pemda dalam pendanaan PPGDJ



Pelaksanaan Pelatihan Guru Daerah



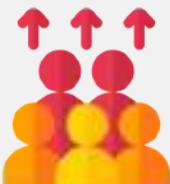
Penyediaan Pengajar Pengganti



Dampak



Penurunan kuantitas dan peningkatan kualitas lulusan sertifikasi melalui PPG



Peningkatan peran Pemda dalam penuntasan sertifikasi guru

2018

Sebanyak 4 Pemda mengalokasikan APBD untuk sertifikasi 894 guru

2019

Sebanyak 156 Pemda mengalokasikan APBD untuk sertifikasi 9.129 guru



Testimoni



“PPG dapat meningkatkan kompetensi guru, terutama metode pembelajaran daring, yang sesuai tuntutan abad 21 di mana guru dituntut melek teknologi. Kemudian diperkaya pelatihan berupa tatap muka, pengembangan materi, dan praktik pengalaman lapangan (PPL).”

(Sitha Nirmala, peserta PPGDJ asal Kabupaten Bandung)



Rekomendasi



PPGDJ dirancang secara sistematis dengan prinsip mutu

Meningkatkan Kompetensi Guru Berbasis Kelompok Kerja

“Seorang guru atau tenaga pendidik merupakan profesi dengan tanggung jawab besar. Mereka menjadi tulang punggung keberlangsungan generasi penerus bangsa.

Berkaca dari hal itu, menjadi penting untuk terus mendongkrak kompetensi mereka. Dengan kompetensi tinggi yang dimiliki guru diharapkan kompetensi peserta didik kian terasah.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Kebijakan zonasi pendidikan yang diterapkan mulai tahun 2017 juga diimplementasikan dalam pengembangan keprofesian bagi guru-guru, yakni melalui program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP). PKP menjadi langkah terobosan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk melengkapi kegiatan pengembangan keprofesian guru di masa sebelumnya, yakni melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Guru Pembelajar.

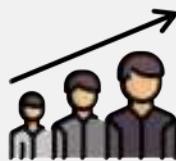
PKP bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan bermuara pada peningkatan kualitas siswa. Pola pelatihan berbasis zonasi melalui pemberdayaan kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan ini berbeda dengan pelatihan guru di masa lalu yang dilaksanakan di kota tertentu atau pelatihan per wilayah regional. Artinya, meski mengikuti PKP, guru-guru tidak perlu meninggalkan sekolah sehingga tetap dapat mengajar selama mengikuti PKP.



Capaian Program

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sebagai pengembangan keprofesian guru

- Titik Awal



2014

Fokus PKB:

Pelatihan Kurikulum 2013

- Capaian Program

Jumlah akumulasi GTK yang mengikuti perkembangan kompetensi berkelanjutan





Inovasi



Pemilihan pelatihan Tatap Muka, Daring dan Hybrid (gabungan)



Berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi *Higher Order of Thinking Skill* HOTS



Pemanfaatan nilai UN untuk pemilihan unit pembelajaran



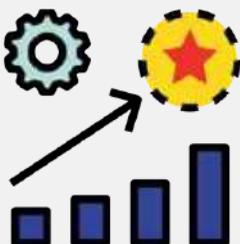
Memberdayakan kelompok kerja GTK



Perhatian keragaman mutu pendidikan PPK dengan Zonasi



Dampak



Peningkatan Kualitas Pembelajaran bagi siswa



Testimoni



"Kami yakin dengan pelatihan ini ke depannya bisa berdampak pada naiknya hasil Ujian Nasional siswa karena materi yang diberikan kepada siswa mengarah pada karakteristik yang tingkatnya analisis, evaluasi, bahkan sampai pada tingkat mencipta."

(Daryanto, peserta PKP Guru Inti dari SMPN 3 Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara)



Rekomendasi



Perlunya partisipasi pemerintah daerah yang lebih besar

Mewujudkan Kesejahteraan dan Perlindungan Guru

*"Menghormati guru, seperti menghormati orang tua sendiri.
Itulah nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus kita jaga."*

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Jaminan Kesejahteraan

Dalam melaksanakan tugas keprofesioalan, guru mendapat jaminan dari Undang-Undang Guru dan Dosen atas sejumlah hak, diantaranya, hak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; serta hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual (Pasal 14 UU Guru dan Dosen). Jaminan kesejahteraan bagi guru itu berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Perlindungan guru

Pelindungan guru mencakupi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan guru ini memiliki payung hukum kuat yang dimuat dalam UU Guru dan Dosen, serta PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pelaksanaan Tugas Keprofesian Guru Memerlukan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan





Capaian Program

Jaminan kesejahteraan bagi guru itu meliputi gaji pokok, berbagai tunjangan dan maslahat tambahan terkait dengan tugas guru. Guru juga mendapatkan perlindungan guru yang mencakup perlindungan hukum, profesi keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual

• Titik Awal



Sistem pendataan tunjangan manual

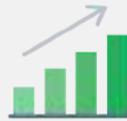


Akurasi data penerima tunjangan rendah

• Capaian Program

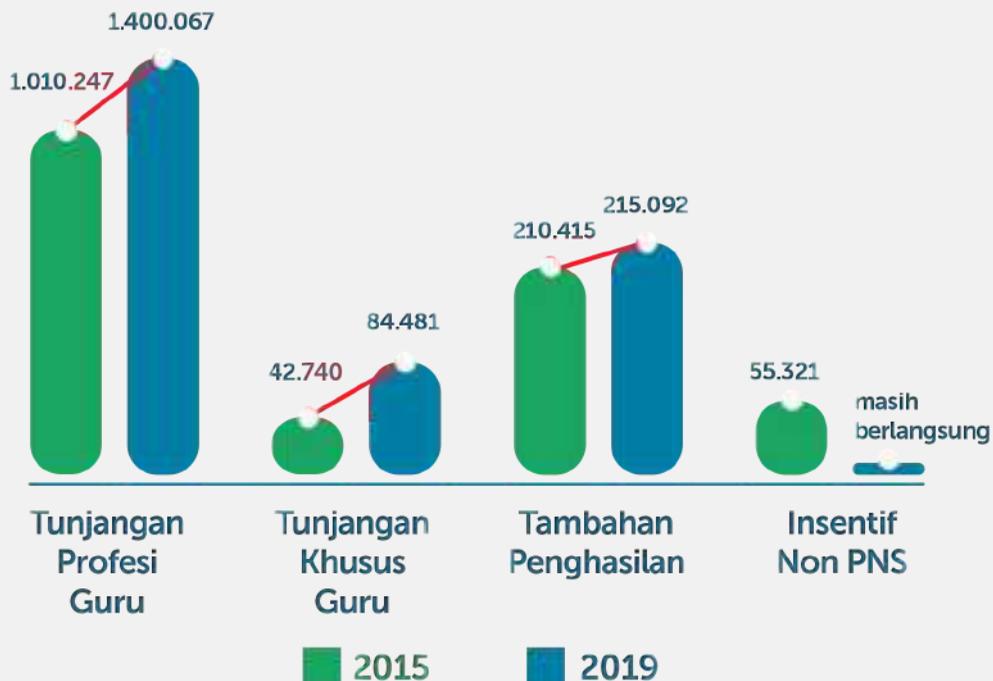


Sistem pendataan tunjangan *Online*



Akurasi data penerima tunjangan meningkat

Jumlah Penerima



Guru mendapat jaminan, di antaranya hak memperoleh perlindungan

• Titik Awal



Belum ada Permendikbud tentang perlindungan profesi GTK

• Capaian Program



Terbitnya Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Inovasi



Sinkron Dapodik untuk validasi data



Sistem Pemantauan pembayaran tunjangan (SIMBAR) versi *web-based* dan android



Aplikasi verifikasi dan validasi online untuk pemberian tunjangan guru (SIMTUN)



Trauma Healing dan Psikososial dampak bencana



Info profil GTK berdasarkan data dapodik versi *web-based* dan android



Dampak



Adanya
transparansi
penyaluran
tunjangan guru



Adanya kepastian
perlindungan atas
profesi guru



Testimoni



“Melalui tunjangan profesi dan sertifikasi guru itu ada perhatian yang lebih dari pemerintah. Ini digunakan guru untuk menunjang kegiatan guru yang bersangkutan”.

- BudiYanti, guru SMP di Kota Depok, Jawa Barat.

“Bimbingan teknis dukungan psikososial sangat bagus sekali, dengan saya ikut bimtek ini menambah ilmu yang sangat luar biasa, dan kesan yang kami rasakan selama 3 hari ini yaitu merasa sangat bersemangat, menyenangkan dan banyak ilmu yang kami dapatkan. Semoga di masa yang akan datang akan diadakan Bimbingan teknis dukungan psikososial yang berkelanjutan atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa melibatkan guru-guru SLB”

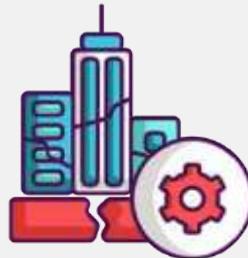
- (Budi, Peserta Bimbingan Teknis Dukungan Psikososial, Guru dari SLBN 2 Palu)



Rekomendasi



Perlunya kerja sama antara guru dan operator dinas pendidikan terkait verifikasi dan validasi data guru penerima tunjangan.



Perlu ada satuan tugas perlindungan guru, penanganan paskatrauma, dan mitigasi bencana

Mengapresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan dengan Beragam Penghargaan

“Salah satu agenda dari Kemendikbud adalah memilih tenaga guru dan tenaga pendidikan yang berprestasi dan berdedikasi sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi guru yang menurut saya satu-satunya profesi di dunia ini. Karena tidak ada satu pun profesi yang terbebas dari sentuhan guru. Hanya karena gurulah banyak profesi-profesi tambahan.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamankan pemberian penghargaan kepada guru. Penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan yang diberikan kepada guru berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus. Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus pun juga berhak memperoleh penghargaan.



Capaian Program

Pemberian Penghargaan pada GTK melalui Program Apresiasi GTK

• Titik Awal



Pemilihan
Guru Berprestasi

Akumulasi Jumlah Peserta



• Capaian Program



- Perluasan Sasaran Program
- Pemilihan GTK Berprestasi
- Pemilihan GTK Berdedikasi
- Apresiasi GTK Berprestasi dan Berdedikasi



Inovasi



Berkas apresiasi GTK dikirim secara daring



Kompetensi sosial menjadi kriteria penilaian



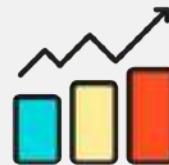
Dampak



GTK menjadi lebih aktif mengikuti beragam ajang kompetisi GTK



Gelar juara tidak lagi didominasi provinsi tertentu



Kualitas GTK semakin meningkat



Testimoni



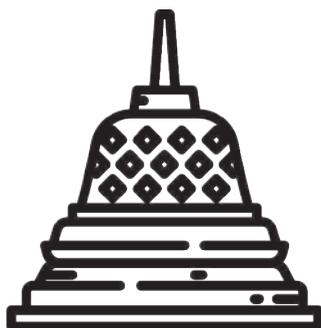
"Dapat berada di antara guru-guru berprestasi dari seluruh Indonesia adalah impian saya. Selain sebagai ajang berlomba, kegiatan ini sekaligus ajang untuk memupuk rasa persatuan dengan guru-guru berprestasi dari seluruh Indonesia. Kami dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pendidikan, bercerita tentang sekolah dan daerah kami" ucap I Made Nuryata Pemenang Guru Berprestasi Tingkat SMK Tahun 2017.



Rekomendasi



Penghargaan juga perlu diberikan kepada guru yang berkinerja baik



Bab 2

Pemajuan Budaya dan
Bahasa Indonesia,
Memperkuat Jati Diri
Bangsa

Pendahuluan

“Kita harus selalu ingat untuk terus aktif, nguri-uri kebudayaan Indonesia, kebudayaan nusantara dan sekaligus menguatkan dan mengembangkannya dalam menghadapi perkembangan zaman.”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Program

- Pemajuan Kebudayaan
- Penguatan Pelaku Kebudayaan dan Komunitas Budaya
- Pelestarian Cagar Budaya
- Revitalisasi Museum
- Revitalisasi Desa Adat
- Warisan Budaya Takbenda
- Uji Kemahiran Bahasa Indonesia
- Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing
- Pengembangan Istilah dan Kosakata
- Pembinaan Bahasa Indonesia dan Penggunaan Bahasa di Ruang Publik
- Pelindungan Bahasa Daerah
- Rumah Peradaban
- Beasiswa Darmawisata
- Festival Film
- Perkembangan Sensor Film

Penyambutan Mendikbud
dengan Budaya Papua



Pemajuan Kebudayaan Indonesia

“Kita ingin agar kebudayaan menjadi nafas dari kelangsungan hidup bangsa, menjadi darah kepribadian, menjadi mentalitas, dan nilai-nilai kebangsaan anak didik kita.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Program Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan untuk memenuhi amanat Pasal 32 UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan melibatkan berbagai pihak terkait agar seluas mungkin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pokok Pikiran Kebudayaan merupakan dokumen mengenai kondisi dan permasalahan nyata di daerah masing-masing beserta tawaran solusinya yang pertama-tama disusun pada tingkat kabupaten/kota, lalu diolah pada tingkat provinsi. Hasil dari setiap provinsi kemudian dihimpun pada tingkat nasional sebagai bahan untuk merumuskan Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh pemerintah pusat.

Pemajuan Kebudayaan melalui Pengembangan Bidaya Daerah





Capaian Program

- **Titik Awal**

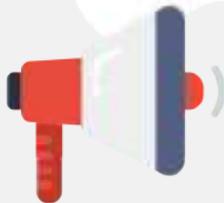
Dokumen PPKD terkait UU Pemajuan Kebudayaan belum ada di tahun 2014.



- **Capaian Program**

Kegiatan Program Pemajuan Kebudayaan antara lain

Sosialisasi pada
Maret 2018



**Penyusunan
Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah**



oleh

• Provinsi

34 dokumen per
Maret 2019

• Kab/Kota

339 dari 514

dokumen per September 2019



Inovasi

UU Pemajuan Kebudayaan



Mensyaratkan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan yang berisi kondisi dan permasalahan nyata di daerah masing-masing beserta tawaran solusinya.

Pokok Pikiran Kebudayaan itu harus disusun oleh masyarakat. Jika tidak, dokumen tersebut akan dianggap tidak sah oleh negara.



Dampak

Masyarakat merasa memiliki kebudayaan di masing-masing daerahnya

Masyarakat terlibat aktif memajukan kebudayaan

Tercipta ketahanan budaya nasional





Testimoni



*Ini adalah momen sebagai langkah awal
untuk memajukan kebudayaan, lewat
pendataan dengan PPKD (Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah)*

-Budayawan Lokal



Rekomendasi



**Perlu adanya anggaran khusus dalam
penyusunan dokumen PPKD serta
pendampingan oleh tim Direktorat
Jenderal Kebudayaan**

Penguatan Pelaku Kebudayaan Komunitas Budaya

“Pembangunan infrastruktur fisik adalah bagian penting dari pembangunan infrastruktur budaya. Infrastruktur itu yang akan semakin mempersatukan 714 suku di bumi Nusantara ini, yang memajukan kebudayaan dan kesenian di masyarakat, yang akan semakin meningkatkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat.”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Setelah keluarnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pada 2017, muncul istilah Sumber Daya Manusia kebudayaan. Mereka diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai investasi untuk membangun masa depan, dan peradaban bangsa.

Sumber daya manusia kebudayaan atau pelaku kebudayaan meliputi, antara lain komunitas tradisi, komunitas kepercayaan, komunitas sejarah, komunitas seni dan budaya, serta penemu cagar budaya.

Penari Piring, Provinsi
Sumatera Barat





Capaian Program

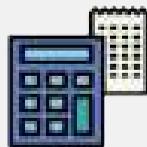
- Titik Awal

< Tahun 2014

fasilitas diberikan kepada



Komunitas, lembaga, yayasan, paguyuban, perkumpulan, padepokan, dan sebagainya



Berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan kebutuhan secara umum



- Capaian Program

Setelah keluar Permendikbud Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Kemendikbud tahun 2016, maka pemberian bantuan menjadi lebih baik dari segi tata kelola Bantuan lebih terarah dan fokus terhadap peningkatan kemampuan ekonomi, kesejahteraan, dan daya saing



Inovasi



Aplikasi mobile kesejarahan berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dibuat untuk menyebarkan nilai dan pemahaman sejarah kepada publik



Untuk memperkenalkan sejarah khususnya bagi kalangan muda

- Gerakan Cinta Tanah Air
- Gerakan Melek Sejarah



Fasilitas untuk membuat film sejarah diberikan kepada komunitas film atau pembuat film untuk membuat film tentang sejarah



Dampak

Pemberian bantuan pemerintah mampu meningkatkan kemampuan ekonomi, kesejahteraan, dan daya saing di bidang kebudayaan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.





Testimoni



"Penampilan komunitas budaya merupakan sebuah langkah kreatif, terutama bagi masyarakat yang sibuk, kebutuhan untuk menonton kesenian tradisional merupakan kebutuhan yang kesekian kali. Dengan Penampilan Komunitas ini, kesenian dapat mendekati masyarakat"

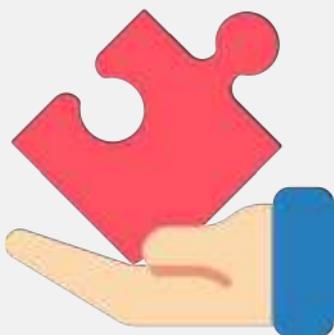
-Sulistyo Tirto Kusumo, Pengamat Budaya



Rekomendasi



Pada pelaksanaan program terdapat beberapa masalah antara lain, pada program peningkatan komunitas sejarah ditemukan masalah legalitas, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana.



Solusi yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat kebijakan untuk mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai dan meningkatkan kesadaran. Dengan demikian, semangat masyarakat menjaga dan melestarikan budaya tetap menyala.

Pelestarian Cagar Budaya

"Saya mengajak kita semua untuk bergerak melestarikan cagar budaya."

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Revitalisasi Cagar Budaya adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Cagar Budaya dan Situs Manusia Purba Sangiran,
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah





Capaian Program

• Titik Awal

Sebelum UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terdapat



66.513

Cagar Budaya yang terdaftar terdiri dari 54.398 Benda Ex Situs dan 12.115 Situs



Jumlah objek yang didaftarkan tahun 2013 hanya

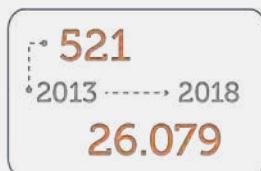
521

• Capaian Program

Setelah UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terdapat



Program pemberian bantuan kepada Dinas Kab/Kota museum provinsi, dinas provinsi, dan museum provinsi seluruh Indonesia



Jumlah objek yang didaftarkan



program pemberian bantuan kepada Dinas Kab/Kota, museum provinsi, Dinas Provinsi dan museum provinsi seluruh Indonesia



Inovasi

<http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id>

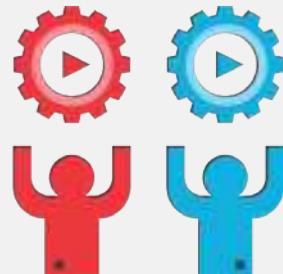


Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya dibuat sehingga masyarakat luas dapat mengakses dan mendaftarkan penemuan benda-benda kuno atau bersejarah untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi bagian dari Cagar Budaya.



Dampak

Dengan adanya perlindungan cagar budaya, terjadi peningkatan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.





Testimoni



*Penting sekali kita memproteksi,
melindungi cagar budaya kita, tidak bisa
kita parsial,"*

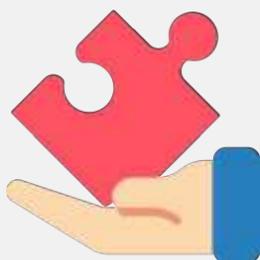
*-Ahli hukum Lingkungan dan Hukum
Administrasi Negara, I Gusti Ayu Rachmi.*



Rekomendasi



Berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pelestarian cagar budaya



Perlu pelibatan pemilik/pengelola objek yang berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya. Selain itu, perlu peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

Revitalisasi Museum

"Museum yang mengedepankan interaksi kepada pengunjung sangat baik dan juga menjadi langkah nyata untuk menjaga mata rantai tradisi luhur yang ada di masyarakat."

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)



Museum Kepresidenan Balai Kirti, Kota Bogor, Jawa Barat

Revitalisasi museum merupakan salah satu dari kegiatan Pelestarian Permuseuman. Selain revitalisasi, terdapat juga program standardisasi pranata, sertifikasi sumber daya manusia, inventarisasi, pengakuan, pemberdayaan, fasilitasi, dan penelitian.

Revitalisasi museum adalah upaya untuk meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian, masyarakat berminat mengunjungi museum.



Capaian Program

- Titik Awal

Revitalisasi Museum menjadi salah satu program unggulan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 dan dilanjutkan 2015-2019



- Capaian Program

Revitalisasi
Museum



2018 **100%**
Tercapai 15

2017 **94,11%**
Tercapai 16/17



Inovasi

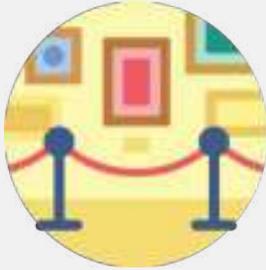


Sebagian besar museum belum tertata baik yang berakibat sepi pengunjung. Untuk itu, telah dilakukan publikasi melalui SMS Blast dan penyusunan katalog berisi 435 museum yang melibatkan

319.000
Pelaku Kebudayaan



Dampak



Program revitalisasi telah meningkatkan kualitas pengelolaan permuseuman, sehingga memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, baik sebagai sarana pelestarian budaya, edukasi, maupun rekreasi



Testimoni



"Pendidikan dan Kebudayaan ini satu frase yang tidak dapat dipisahkan. Kalau pendidikannya kuat, kebudayaan juga harus maju," -Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, Asrun Lio.



Rekomendasi



Agar tercapai pelaksanaan revitalisasi museum yang baik maka diperlukan perencanaan, proses lelang fisik, dan pelaksanaan fisik sesuai jadwal



Perlu koordinasi melalui rapat atau pertemuan aktif dengan pemerintah daerah. Perlu program pengembangan kompetensi tenaga edukator museum agar mereka bisa mengedukasi pengunjung.

Revitalisasi Desa Adat

“Upaya membangun dari pinggiran tidak hanya dilakukan dengan pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan upaya revitalisasi desa adat.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Program Revitalisasi Desa Adat bertujuan untuk menghidupkan kembali aktivitas budaya masyarakat setempat, baik fisik maupun non fisik, seperti membangun atau memperbaiki bangunan adat, kelengkapan adat, serta ritual adat.

Revitalisasi Desa Adat Ratenggaro,
Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa
Tenggara Timur





Capaian Program

- Titik Awal



- Capaian Program



Inovasi

Pemerintah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program ini, antara lain dengan mekanisme transfer dana bantuan secara langsung ke rekening desa adat.





Dampak



Revitalisasi desa adat turut mendukung program pengembangan pariwisata, sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat



desa adat turut aktif dalam penyelamatan pasca bencana alam, kebakaran, dan lain-lain



Program ini juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tradisi yang dikembangkan oleh suku-suku bangsa di Indonesia.



Testimoni



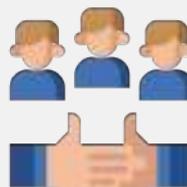
"Jangan sampai desa adat ditinggalkan generasi muda. Keberadaan desa adat sangat penting karena ada fungsi yang tidak mungkin dilakukan oleh desa lainnya." - Gubernur Bali Wayan Koster



Rekomendasi



Pada pelaksanaan program masih dirasa kurangnya data desa adat, komunitas adat, dan komunitas serta pelaku tradisi



Kerjasama dengan OPD dan lembaga terkait khususnya dalam hal pembiayaan pelaksanaan kegiatan, juga perlu digiatkan.

Warisan Budaya Takbenda

“Warisan budaya Indonesia, khususnya Warisan Budaya Takbenda Indonesia terancam punah, antara lain disebabkan warisan budaya takbenda tersebut tidak dilindungi dengan baik. Oleh sebab itu, pelestarian dan pengelolaan warisan budaya perlu dilaksanakan dengan penanganan serius dari semua pihak yang terlibat,”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Warisan Budaya Takbenda (WBTb) adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen-instrumen berupa objek, artefak, dan lingkungan budaya yang terkait. Dalam hal ini meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan perorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan perlindungan Warisan Budaya Takbenda di dalam Indonesia, antara lain melalui kegiatan identifikasi WBTb dengan mengikutsertakan berbagai komunitas, kelompok, maupun lembaga sosial masyarakat yang terkait.

Pencak Silat Betawi





Capaian Program

• Titik Awal



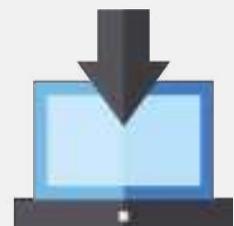
• Capaian Program



Inovasi

Setiap orang bisa mencatat warisan budaya melalui daring

<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id>



Dampak

Dengan adanya program identifikasi tersebut, Indonesia memiliki database semua budaya takbenda yang ada di seluruh Tanah Air.





Testimoni



"Kami sangat berbangga dengan rencana usulan pemerintah agar permainan megoak-goakkan menjadi WBTb dan kebudayaan yang diakui UNESCO, karena apa yang telah kita jaga dan yang kita punya dianggap penting dan menjadi sebuah kebanggaan bagi kami"
-Wayan Ganesha, Ketua Karang Taruna Desa Panji, Bali



Rekomendasi



belum tersosialisasinya dengan baik pencatatan secara online/daring



Untuk itu pencatatan secara daring sebaiknya tidak dipecah-pecah. Selama ini pencatatan dilakukan oleh banyak pihak: PPKD, Dapobud, Pusat Data dan Statistik, dan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

“Kemampuan berbahasa menggambarkan keadaan alam pikiran, maka guru harus berbahasa yang runtut dan indah,”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. Sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar, Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Tanpa menafikan peran wahana lain, UKBI memiliki fungsi amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas Bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya.

UKBI juga diharapkan dapat berperan dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Peran UKBI adalah dengan memberikan dorongan atas peta capaian kemahiran penutur bahasa Indonesia, khususnya bagi penutur asing. Peran UKBI tersebut juga sejalan dengan peran pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA). Peningkatan status bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional diharapkan dapat memartabatkan bahasa Indonesia dan memberi peluang kemajuan bagi bangsa Indonesia.

Uji Kemahiran Bahasa Indonesia Daring





Capaian Program

• Titik Awal

1988

- 1. KBI IV (1983)
- 2. KBI V (1988)

Penyusunan dan Pembukuan

2003

2004

Hak Cipta No. 023993 dan 023994 dari Depkeh dan HAM (8 Januari 2004)
Pengembangan UKBI berbasis komputer

Peluncuran Resmi

2006

2007

Peluncuran UKBI Berbasis Komputer

2009

Amanat UU No. 24/2009 PP No. 57/2014

2014

• Capaian Program

2016



- 1. Permendikbud No. 70/2016 &
- 2. PP 82/2016 PNPB
- 3. Pendirian 31 TUKBI Balai/ Kantor Bahasa

2017-2018

Pendirian TUKBI di luar negeri



Inovasi

Bentuk layanan uji

UKBI

• Daring

ukbi.kemdikbud.go.id

• Luring

• Berbasis Kertas



Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan juga sedang merintis pendirian TUKBI (Tempat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia) di luar negeri untuk memfasilitasi para penutur asing yang akan mengikuti tes UKBI di luar negeri.



Dampak



Meningkatkan Kualitas Bahasa Indonesia, dalam penggunaan, pengajaran di dalam dan luar negeri

UKBI juga dapat berperan dalam internasionalisasi bahasa Indonesia

memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya.

Dorongan atas pencapaian tingkat kemahiran yang semakin tinggi bagi penutur Bahasa Indonesia



Testimoni



"Pengalaman bagus dan unik, tapi sedikit sulit, banyak kata yang belum tahu, tapi masih mengerti, hanya tingkat dasar, mungkin bila saya belajar lagi, saya akan mencoba lagi mungkin lebih baik,"
Alana, peserta tes UKBI, 17 Januari 2019.



Rekomendasi



Pemakaian sistem daring dengan menggunakan akses internet harus terus dilakukan sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan



Program UKBI diharapkan dapat terus dikembangkan dengan meningkatkan kualitas pengembangan soal dan layanan. Pengembangan soal, teori dan teknologi mutakhir terus ditingkatkan



Layanan pengujian, kecepatan dan ketepatan dalam pengujian juga diprioritaskan

Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing

“Saudara ini ibarat pasukan tempur bukan hanya mengajar Bahasa Indonesia saja. Anda membawa misi diplomasi budaya Indonesia, untuk pertahanan bangsa dari luar negeri, melalui diplomasi bahasa.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) adalah salah satu program prioritas Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan sebagai sarana diplomasi kebahasaan untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Visi program ini adalah terlaksananya pengajaran BIPA yang mampu meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional. Hal ini dilakukan dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas pada tingkat antarbangsa.

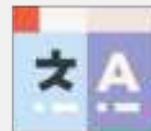
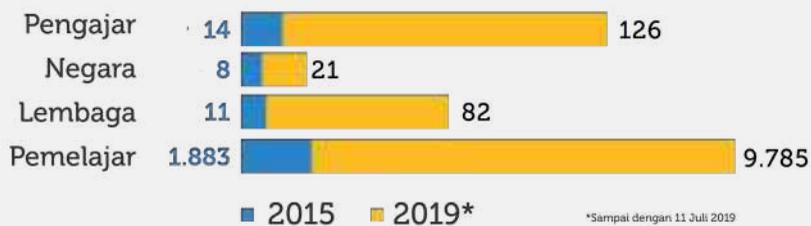
Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing





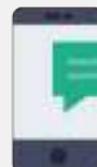
Capaian Program

Fasilitasi bagi Lembaga BIPA dengan Pengiriman dan Penugasan Pengajar BIPA 2015 dan 2019



Inovasi

BIPA
Luring



BIPA Daring

<https://bipa.kemdikbud.go.id/portal>



Dampak

Penginternasionalan bahasa Indonesia melalui program BIPA merupakan salah satu cara untuk menunjukkan dan mempromosikan potensi budaya dan sumber daya Indonesia supaya dikenal dan dipahami masyarakat dunia. Jika budaya dan sumber daya Indonesia tersebut telah dikenal secara luas dengan pandangan yang positif, korporasi, produk, karya, dan sumber daya Indonesia akan diminati dunia.



Testimoni



“bahasa Indonesia tata bahasanya tidaklah sulit, dan mempelajari bahasa Indonesia membuat saya cinta dengan negara Indonesia, dan ingin hidup lama di Indonesia”
Kutipan dari Mona Fawzy, wawancara mahasiswa BIPA asal Mesir pada Senin 8 Juli 2019



Rekomendasi



1. Perlu penambahan fasilitas anggaran program BIPA



2. Pengembangan kerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri untuk program mata kuliah Bahasa Indonesia



3. Perlu menjalin kerjasama dalam membuka pengiriman guru BIPA ke sekolah/lembaga penerjemahan

Pengembangan Kosakata dan Istilah

“Total yang memanfaatkan daring dari KBBI ini adalah pekerja profesional dan nonprofesional termasuk di dalamnya adalah wartawan yang turut memanfaatkan KBBI. Kita ucapkan terima kasih.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Pengembangan kosakata dan istilah merupakan kegiatan pengumpulan, pemilihan, validasi, dan penyuntingan kosa kata bahasa daerah dan bahasa asing untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Setiap tahun, tema inventarisasi kosakata ini berubah sesuai dengan profil daerah yang akan diambil datanya.

Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan usulan dari masyarakat melalui aplikasi KBBI Daring. Hasil inventarisasi ini merupakan bahan yang diproses oleh editor, redaktur, dan validator KBBI yang mengadakan rapat redaksi setiap minggu untuk menentukan usulan mana yang akan diterima. Hasil penyuntingan oleh editor KBBI selanjutnya ditampilkan dalam pemutakhiran setiap bulan April dan Oktober.

Tambahkan Tampilan
KBBI Daring





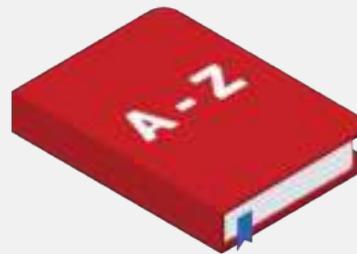
Capaian Program

• Titik Awal

Sebelum tahun 2015, terdaftar

90.000

kosakata dalam KBBI



• Capaian Program

Capaian KBBI



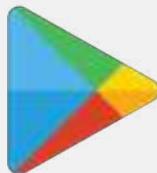
Inovasi

Selain dalam bentuk cetak, KBBI saat ini tersedia dalam bentuk



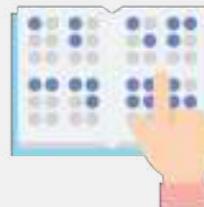
KBBI Daring

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>



Aplikasi KBBI

Kamus Besar
Bahasa Indonesia



KBBI Braille

di Perpustakaan
Nasional

Aplikasi KBBI
Luring dalam
perkembangan
selanjutnya





Dampak

Peningkatan literasi
baca tulis di masyarakat.



Testimoni



“Saya sangat mengapresiasi acara yang menjadi rutinitas ini. Saya juga tidak bisa membayangkan jika KBBI tidak hadir menemani aktivitas wartawan dalam menulis. Hal itu karena yang paling akrab dengan KBBI adalah media,”
Redaktur Majalah Tempo, Uu Suhardi, pada kegiatan lokakarya KBBI, 31 Oktober 2017



Rekomendasi

1. Perlu adanya penyatuan berbagai platform/laman daring ke dalam platform KBBI daring.
2. Peningkatan pengenalan dan penggunaan kamus menjadi bagian yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah



Pembinaan Bahasa Indonesia dan Penggunaan Bahasa di Ruang Publik

“Tiga sikap positif dalam berbahasa Indonesia, yaitu mencintai bahasa Indonesia, bangga berbahasa Indonesia, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang benar.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Peserta pembinaan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa di ruang publik dapat meningkatkan sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, menambah wawasan terhadap permasalahan kaidah-kaidah kebahasaan, meningkatkan penerapan dan penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan, dan mendukung pelaksanaan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pembinaan Bahasa Indonesia di
Lingkungan Masyarakat





Capaian Program

- Titik Awal

Kegiatan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang publik digagas pada 2015 dan mulai dilaksanakan pada 2016



- Capaian Program



Inovasi



Pemasyarakatan bahasa tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka, tetapi juga melalui media sosial, yaitu *Instagram, Facebook, Twitter, YouTube*, dan laman Badan Bahasa dan Perbukuan.



Dampak

Peningkatan kompetensi berbahasa dan mutu penggunaan bahasa



Peningkatan kedisiplinan dan keteladanan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia



Testimoni



"Bagai mendapat durian runtuh. Dahsyat! Itulah kalimat yang layak saya ungkapkan saat mengikuti acara penyuluhan bahasa Indonesia oleh Balai Bahasa Jabar. Sebagai orang yang hidup dalam lingkaran pejuang bahasa, yakni guru bahasa Indonesia, saya ibarat obor yang sudah mulai redup, kini mendapatkan suluh kembali dengan asupan ilmu bahasa yang terus berkembang,"

-Dra. N. Mimin Rukmini, Guru Bahasa Indonesia SMPN 1 Cililitan, Jakarta



Rekomendasi

Sebaiknya jabatan Ahli Bahasa, sebagai agen pembina Bahasa Indonesia, bisa ditingkatkan menjadi jabatan fungsional tertentu. Sehingga kompetensi dan jenjang ahli bahasanya dapat terus meningkat



Pelindungan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah

“Penyerapan bahasa itu tidak hanya secara alami, tetapi harus ada design, apalagi maaf kalau saya sebut wilayah di Indonesia Timur itu sangat banyak bahasa lokal, yang kalau tidak dirancang secara sungguh-sungguh agar ada proses saling menyerap, hal ini dikhawatirkan punah.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Untuk melindungi dan melestarikan bahasa daerah tersebut, Badan Pembinaan Bahasa dan Perbukuan memiliki dua program utama, yaitu konservasi dan revitalisasi bahasa. Untuk itu, peran Mitra Komunitas Pelindungan (Bahasa dan Sastra) sangat penting.



Capaian Program

• Titik Awal

Sebelum **2016** telah dilakukan identifikasi dan pemetaan bahasa daerah di Indonesia



• Capaian Program

Revitalisasi Bahasa 2016 Revitalisasi Sastra	Ponosakan Sulawesi Utara	Hitu Maluku	Betawi Ora DKI Jakarta	Samawa NTB	Dayak Desa Kalimantan Barat	Sentani Papua
	Bapandung Kalimantan Selatan	Gamat Sumatera Barat	Dampol Siburuk Sumatera Utara	Royong Sulawesi Selatan	Sandur Jawa Timur	Vaino Sulawesi Tengah

Revitalisasi Bahasa 2017 Revitalisasi Sastra	Rote NTT	Yalahatan Maluku Tengah	Tado-Lindu Sulawesi Tengah	Sawai Maluku Utara
	Basiacuong Riau	Cigawiran Garut, Jabar	Tanggomo Gorontalo	Wayang Cecak Kepulauan Riau

Revitalisasi Bahasa 2018 Revitalisasi Sastra	Rajang Lebong Bengkulu	Nedebang NTT	Kerinci Jambi	Bodong-Bodong Sulawesi Barat	Galik Kalimantan Barat
	Hiem Aceh	Kayat Riau	Ciawian Tasik, Jabar	Dolabololo Maluku Utara	Goet Manggarai, NTT

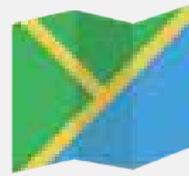


Inovasi



2

Video hasil kegiatan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah dikemas dalam bentuk film-film pendek yang disimpan di Laboratorium Kebinekaan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat



1

digitalisasi peta bahasa disimpan di Laboratorium Kebhinekaan di Pusat pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat



Dampak

Terlindungi dan terkelolanya Kekayaan batin bangsa





Testimoni



"Kegiatan ini tidak pernah terpikir sebelumnya. Anak-anak pun senang mengikuti proses latihan selama ini. Mereka ingin belajar bahasa Adang dengan baik. Selain itu, kegiatan pentas revitalisasi ini menjadi pemicu bagi para guru untuk membelajarkan kembali di Sekolah".

Obed Djaha, S.Pd, Kepala Sekolah Dasar Negeri Alaang



Rekomendasi



Bahasa dan sastra daerah juga harus diajarkan pada pendidikan formal dan nonformal melalui materi muatan lokal.

Rumah Peradaban

“Perpaduan dunia pendidikan dan kebudayaan sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang syarat nilai dan pengalaman, guna membingkai hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan.”

(Muhadjir Efendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

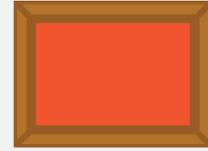
Rumah Peradaban merupakan media fasilitasi penelitian dan pengembangan arkeologi untuk lebih mendekatkan arkeologi dengan masyarakat.



Kunjungan Siswa Ke Situs
Penelitian Arkeologi



Capaian Program



• Titik Awal

Sebelum adanya program Rumah Peradaban pada tahun 2016, Puslit Arkenas hanya memiliki program tahunan untuk mensosialisasikan hasil penelitian berupa pameran yang diadakan dua kali dalam setahun, dan satu kali kegiatan sosialisasi.

• Capaian Program

2015 → 2 Rumah Peradaban

Puslit Arkenas :

- RP. Tambora
- RP. Gua Harimau

2016 → 23 Rumah Peradaban

Puslit Arkenas :

- RP. Sumba
- RP. Sangiran
- RP. Trowulan
- RP. Natuna
- RP. Karawang

Balar Sumsel :

- RP. Megalistik Pasemah

Balar Sumut :

- RP. Kota Cina-Kota Rintang

Balar DIY :

- RP. Liangan
- RP. Kota Lama Semarang

Balar Jabar :

- RP. Ciamis
- RP. Cirebon
- RP. Pugung Raharjo

Balar Bali :

- RP. Gilimanuk

Balar Kalsel :

- RP. Pengaron
- RP. Negeri Baru

Balar Sulsei :

- RP. Lapangan Terbang Kendari
- RP. Soppeng

Balar Sulut:

- RP. Kompleks Waruga

Balar Maluku:

- RP. Banda Neira
- RP. Tanimbar

Balar Papua:

- RP. Tugu Mac Arthur
- RP. Srobu

2017 → 15 Rumah Peradaban

Puslit Arkenas :

- RP. Penanggungan
- RP. Sriwijaya
- RP. Plawangan
- RP. Jatiluwih

Balar Sumsel :

- RP. Kawasan Eks Timah Bangka

Balar Sumut :

- RP. Gayo

Balar Jabar :

- RP. Pandeglang
- RP. Cirebon
- RP. Kuningan

Balar Kalsel :

- RP. Banua Kayong

Balar Sulsei :

- RP. Bantaeng

Balar Sulut:

- RP. Matuluntung

Balar Maluku:

- RP. Teluk Ambon
- RP. Halmahera

Balar Papua:

- RP. Megalitik Tutari



Inovasi

Rumah Peradaban memperkenalkan slogan (*tagline*)
"Mengungkap, memaknai, dan mencintai" dalam
mengungkap peradaban peristiwa masa lampau

Jadwal Pelaksanaan Rumah Peradaban 2019



Dampak



Peningkatan pemahaman tentang sejarah dan nilai-nilai budaya masa lampau dalam upaya mencerdaskan bangsa, serta menumbuhkan semangat kebangsaan untuk membangun insan berkarakter.



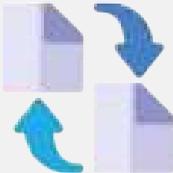
Testimoni



*“Program Rumah Peradaban sangat bermanfaat, karena dengan adanya program ini saya dapat mengetahui, memahami, serta mampu menjaga dan melestarikan tinggalan arkeologi,”
Kezia Christina Ludji Do, siswa SMA Negeri 1 Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.*



Rekomendasi



Perlu upaya peningkatan kerja sama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan pemerintah daerah.

Kegiatan Rumah Peradaban hendaknya dibuat dengan format yang bervariasi dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman.

Darmasiswa: Beasiswa untuk Mahasiswa Asing

“Program ini juga merupakan salah satu cara untuk mempererat dan memperkuat hubungan Indonesia dengan Negara-negara sahabat. Setelah mengikuti setahun program beasiswa Darmasiswa, saat kembali nanti, para peserta dapat menjadi duta kebudayaan Indonesia di negaranya masing-masing.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Darmasiswa merupakan sebuah program beasiswa bagi mahasiswa asing (*foreign students*) dari berbagai negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Peserta tidak hanya belajar di perguruan tinggi, tetapi juga belajar dari lingkungan masyarakat sekitar. Mereka diajarkan dan dikenalkan dengan budaya dan kearifan lokal sebagai bekal mereka tinggal di Indonesia. Diharapkan melalui program ini dapat memberikan kontribusi pada pembentukan perdamaian dan ketertiban dunia.

Pertunjukan Tari oleh Mahasiswa Asing Penerima Darmasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang





Capaian Program

- Titik Awal

2015

pemberian beasiswa bersifat kelompok/provider



2016

pendekatannya lebih kepada individual.

- Capaian Program



Keterangan : Jumlah akumulasi



Inovasi

Semua sistem berbasis daring meliputi





Dampak

Mahasiswa asing menjadi lebih tertarik terhadap bahasa, seni, dan budaya Indonesia



Testimoni



"Saya belajar tari Bali dan gamelan Bali di Bali. Cita-cita saya, setelah pulang ke Jepang, saya mau mengajar seni Bali di kota tempat hidup saya, sambil melakukan pementasaan sebagai penari dan penabuh." (Chihiro Morishita, mahasiswa asal Jepang)



Rekomendasi



Penerima beasiswa sebagian besar berada di Pulau Jawa, sehingga perlu dilakukan penguatan sosialisasi di daerah-daerah lain di Indonesia

Festival Film Indonesia

"Film Indonesia dengan tema nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa adalah tema film yang perlu dikembangkan. Selain sebagai konsumsi lokal Indonesia juga diharapkan kiprahnya di dunia internasional."

(Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016)

Festival Film Indonesia (FFI) adalah program rutin Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) Kemendikbud sejak 2015 yang merupakan puncak penghargaan tertinggi perfilman Indonesia. Penghargaan diberikan kepada setiap insan terbaik sebagai cerminan kualitas film Indonesia dalam bentuk Piala Citra.

Pemenang Piala Citra Festival Film Indonesia





Capaian Program

- Titik Awal

Sebelum adanya Pusbangfilm, FFI ditangani oleh Direktorat Kesenian dan Perfilman yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan



- Capaian Program

2015 17 kategori terbaik FFI

2016 19 kategori terbaik FFI

2017 22 kategori terbaik FFI

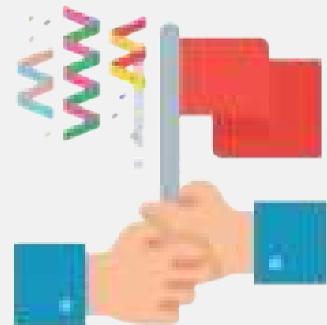
2019 24 kategori terbaik FFI



Dampak

Lahirnya banyak sineas muda berbakat yang menghasilkan karya film hingga dipertunjukkan ke dunia internasional.

Film Indonesia juga mendapat tempat di hati dunia yang dapat merekatkan hubungan kebudayaan.





Testimoni



*"Saat ini, hampir 40% jumlah film yang diputar adalah film nasional sedangkan sisanya film asing. Memang, film kualitas film asing berat untuk dikalahkan begitu saja. Namun, perlu Anda ketahui kalau di Australia film nasional yang diputar hanya satu koma sekian persen saja."
-Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf*



Rekomendasi

FBI diharapkan dapat menjadi barometer untuk meningkatkan kualitas film Indonesia dan menciptakan film yang dapat bersaing di dunia internasional



Perkembangan Sensor Film

"Saya berharap hendaknya proses penyensoran terhadap film- film yang berpotensi ditonton oleh anak-anak haruslah benar- benar memperoleh perhatian LSF dan juga pengusaha dan pegiat perfilman pada umumnya."

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Salah satu kegiatan utama Lembaga Sensor Film adalah melakukan penyensoran terhadap film dan iklan film. Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor (UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman pasal 57 ayat 1)

Kegiatan Dialog Film antara pelaku film dan Lembaga Sensor Film





Capaian Program

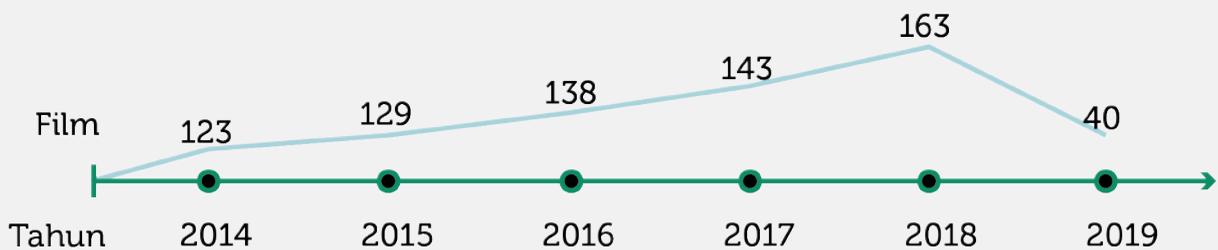
- Titik Awal

Pada Tahun 2014, Layar Lebar Nasional yang disensorkan ke LSF berjumlah

123 Film

- Capaian Program

Layar Lebar Nasional yang disensorkan ke LSF



Data per 21 Juli 2019



Inovasi

Tahun 2015, semua film sudah berbentuk digital, yaitu *Digital Cinema Package (DCP)* yang menggantikan seluloid.



Dampak



Masyarakat terlindungi dari pengaruh negatif film dan iklan film.



Testimoni



"Saya berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di periode Bapak Muhadjir Effendy, karena film Indonesia maju luar biasa. Semoga lebih baik lagi."
-Chand Parwez, Ketua BPI-Produser Film.



Rekomendasi



Kesulitan terbesar ketika komunitas film atau pemilik film di luar Jakarta ingin menyensorkan film atau ingin berdialog, tetapi memiliki keterbatasan anggaran sehingga **pemerintah perlu menghadirkan layanan sensor film di daerah dengan membentuk Unit Kerja LSF pada setiap provinsi atau regional**. Sehingga keterbatasan anggaran di luar daerah tidak menjadi hambatan bagi komunitas atau pemilik film diluar Jakarta yang ingin menyensorkan film atau ingin berdialog

Penyediaan Layanan Pendidikan Berkeadilan bagi Seluruh Anak





Bab 3

Peningkatan Akses Pendidikan
Berkeadilan, Berkualitas, Inklusif, dan
Berkesetaraan

Pendahuluan

“Pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Cirinya harus *non excludable, non rivarly, dan non discrimination.*”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Semua sepakat bahwa semua anak dianugerahi potensi yang berbeda. Setiap anak memiliki kecenderungan dalam salah satu atau beberapa domain spesifik. Setiap anak memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui peran institusi pendidikan yakni sekolah. Pada sekolah, masyarakat menyandarkan harapan perkembangan optimal dari potensi yang dimiliki anak. Sekolah menjadi tumpuan harapan masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakangnya. Pada kenyataannya, pendidikan sebagai bentuk layanan terhadap anak sering kali dirundung diskriminatif yang alih-alih mengembangkan potensi anak, justru menghambat. Beberapa perlakuan yang tergolong diskriminatif sejatinya berawal dari niat baik penyelenggara pendidikan untuk memberikan pelayanan yang efektif.

Pada kenyataannya, masih banyak anak bangsa yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan/wilayah pinggiran atau daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang belum terjangkau akses pendidikan yang selayaknya. Banyak pula di antara mereka yang terkendala pendidikannya, termasuk anak-anak inklusi yang perlu mendapat perhatian serius.

Pemanfaatan e-learning di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T)



Pembangunan Wilayah Perbatasan

*Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan
Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam
Kerangka Negara Kesatuan*

(Nawacita Ketiga)

Intervensi pemerintah dalam pengalokasian anggaran untuk daerah pinggiran cukup tinggi dan terus meningkat. Kenaikan anggaran difokuskan untuk pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di daerah 3T. Di era pemerintahan Joko Widodo, pembangunan kawasan pinggiran dipertegas dengan terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat.

4 Agenda Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan di Papua dan Papua Barat

1. Penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama
2. Pengembangan pendidikan vokasi
3. Pemberantasan tuna aksara Penerapan kurikulum kontekstual Papua
4. Pengembangan Kurikulum 2013 kontekstual di Papua dan Papua Barat



Capaian Program



Penyelenggaraan program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), dengan daerah sasaran meliputi Papua (prioritas) dan Papua Barat.



Pemetaan 18 bahasa daerah Papua dan 13 bahasa daerah Papua Barat.



Pembangunan Museum Noken di Papua dan Museum Mansinam di Manokwari, Papua Barat.

A. PROGRAM SEKOLAH BERPOLA ASRAMA DI PAPUA DAN PAPUA BARAT



1 Papua Barat
14 Papua



36 Papua Barat
75 Papua

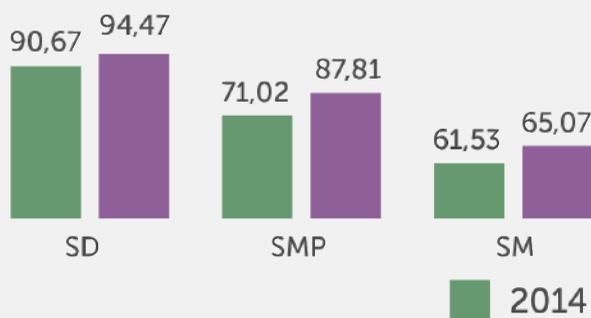


15 Papua Barat
35 Papua

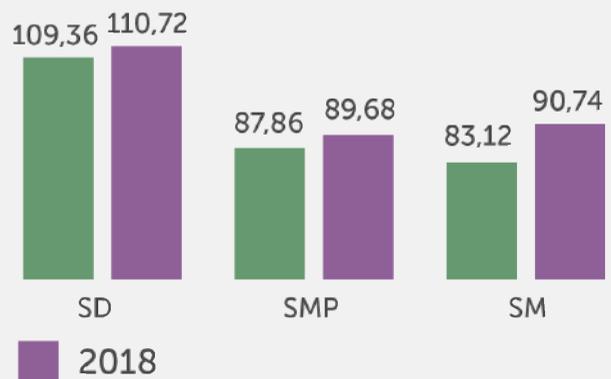


9 Papua Barat
17 Papua

APK Provinsi Papua



APK Provinsi Papua Barat



APK jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di Papua dan Papua Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018

IPM



IPM Papua dan Papua Barat juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018.

B. PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI DI PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2018 - 2019



- Pendirian SMK Perikanan di kabupaten Intan Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah.
- Pendirian SMK Penerbangan di Jayapura
- Pendirian SMK Pertanian di Merauke, Biak, dan Manokwari Selatan
- Serta peningkatan Sarana Prasarana SMK Pertanian, Pariwisata dan Perikanan di Maokwari, Raja Ampat, dan Sorong.

C. PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI PAPUA DAN PAPUA BARAT



Bantuan Penuntasan Tuna Aksara untuk Papua Barat

	2017		2018
7050 orang	Rp4.230.000	3780 orang	Rp2.268.000

Selama 2018-2019 juga terbentuk 29 PKBM penyelenggara pendidikan keaksaraan yang tersebar di 29 kabupaten di Papua

D. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 KONTEKSTUAL DI PAPUA DAN PAPUA BARAT 2018 – 2019



- Penyusunan dan penerapan kurikulum kontekstual Papua yang diakui sebagai standar pendidikan di wilayah Papua untuk SD, SMP, dan SMA/SMK yang menghasilkan 4 model untuk SD, SMP, dan SMA/ SMK.
- Penerapan model kurikulum kontekstual untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di 8 satuan pendidikan di Kabupaten Merauke.
- Pendampingan penerapan kurikulum 2013 di 10 kabupaten, yaitu Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Waropen, Jayapura, Biak, Supiori, Merauke, Nabire, dan Fak-fak.
- Penyusunan 3 buku sejarah Papua untuk mendukung pendidikan karakter di satuan pendidikan.

E. PROGRAM PENAMBAHAN KUOTA GURU 2018-2019

Terdapat 63 guru daerah khusus asli Papua dan Papua Barat yang terfasilitasi mengikuti PPG

Terlatihnya guru-guru di 1.000 di Papua dan Papua Barat tentang K13

Tersalurkannya Bantuan 8 paket Peningkatan Kompetensi GTK PAUD di Papua dan Papua Barat

F. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BAHASA DI TANAH PAPUA



384

Jumlah bahasa daerah di Papua dan Papua Barat, dengan rincian:

Papua: 290 bahasa

Papua Barat: 94 bahasa

Pengelolaan Kekayaan Bahasa di Tanah Papua

Bahasa Melayu Tempata (bahasa Melayu Papua) telah dipergunakan dalam buku pelajaran kontekstual mata pelajaran bahasa Indonesia dan Matematika untuk jenjang SD dan sebagai bahasa pengantar proses belajar kelas awal di daerah pegunungan tengah Papua.

G. PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH (ADEM) UNTUK PAPUA DAN PAPUA BARAT

1426

masih mengikuti pendidikan

1240

anak telah lulus

294

anak telah putus sekkolah



Inovasi



Pembangunan sekolah berpola asrama



Pemberdayaan TNI Angkatan Darat untuk menjadi guru di sekolah wilayah perbatasan, terutama daerah 3T



Pembangunan akses internet *Universal Service Obligation* (USO) bagi sekolah-sekolah di wilayah pinggiran



Memperkuat pemanfaatan *smartphone* dalam pembelajaran



Dampak



Menuntaskan tuna aksara di Papua dan Papua Barat



Mengembangkan wawasan kebangsaan dan keberagaman serta perubahan sikap dan mental anak papua dari subsistem menuju ke mental pekerja keras dan produktif.



Sejak tahun 2016 hingga 2018, terdapat 963 lulusan ADEM melanjutkan ke perguruan tinggi



Testimoni



"Banyak yang telah kami dapatkan dari tim pengajar kami seperti dasar membaca, menulis, dan menghitung. Terutama membaca, dasar-dasar yang telah dipahami. Bagaimana mengajari dari pada anak TK, SD, berikut SMP, berbagai jenjang kemudian dasar-dasar yang diberikan mereka sangat menarik dan dapat dipedomani yang nantinya kami bawa ke tempat penugasan. Dan menulis, dasar-dasar menulis seperti bagaimana cara memegang pena. Kemudian menghitung, metode tersebut sangat memudahkan nantinya untuk mengajarkan di daerah pedalaman dan daerah perbatasan,"

– Vinsensus Sinaga (Yonif Raider 303) peserta bimbingan teknis Pemberdayaan TNI untuk Pendidikan di Perbatasan.



Rekomendasi

A. Program Sekolah Berpola Asrama di Papua dan Papua Barat



Syarat bantuan pembiayaan dari Kemdikbud, terutama terkait legalitas kelembagaan PKBM dalam penuntasan buta aksara di Papua sangat ketat



Perlu rakor khusus bidang keaksaraan di Papua dengan pemerintah daerah yang memiliki angka buta huruf tinggi

B. Program Pengembangan Kurikulum 2013 Kontekstual di Papua dan Papua Barat tahun 2018 - 2019



- Perlu adanya Tim Validasi Buku tingkat provinsi.
- Pedoman implementasi K13 Kontekstual Papua perlu segera diterbitkan dan disosialisasikan
- Perlu dilakukan bimbingan teknis pada sekolah berdasarkan wilayah adat (DOMBERAY, BOMBERAY, SAERERI, LA PAGO, MEE PAGO, MAMTA, ANIM HA)

C. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) untuk Papua dan Papua Barat



- Perlu diadakan kelas pengayaan khusus sejak di SMP
- Pembinaan mental dan karakter melalui program ekstrakurikuler
- Pemberian visi dan motivasi kepada anak-anak ADEM agar kembali menjadi motivator pembangunan di daerahnya melalui PPG.

D. Program Pengelolaan Kekayaan Bahasa di Tanah Papua



- Perlu penataran Bahasa Indonesia menjadi *lingua franca*
- Perlu penguatan pembinaan bahasa daerah
- Pemberian anggaran yang memadai untuk pembelajaran tunaaksa di
- Pendidikan Non Formal (PNF)
Penambahan UPT Pendidikan dan Kantor Bahasa sesuai peta 7 wilayah budaya
- di Papua dan Papua Barat
Perlu dilakukan kajian sosiolinguistik pemilihan dialek bahasa lokal sebagai *lingua franca* dan muatan lokal di sekolah

Zonasi Pendidikan untuk Percepatan Pemerataan Pendidikan yang Adil dan Berkualitas

“Pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB saja, tetapi untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, dan kualitas sarana prasarana. Semua itu akan ditangani dengan berbasis zonasi.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Tahun 2019, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud mengembangkan laman zonasi pendidikan di semua daerah Indonesia yang terintegrasi dalam sistem yang dapat diakses bersama, yakni zonasi.kemdikbud.go.id.

Awalnya, zonasi pendidikan yang dirintis tahun 2016 merupakan bagian proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB berbasis zonasi ini memiliki tujuan, di antaranya, mendekatkan peserta didik dengan lingkungan sekolah; meningkatkan keragaman peserta didik di suatu sekolah; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri; meningkatkan akses layanan pendidikan pada kelompok rentan; dan mendorong kreativitas pendidik di kelas yang lebih heterogen.

Bersepeda Bersama menuju Sekolah





Capaian Program

• Titik Awal

Sistem zonasi mulai **diselenggarakan sejak tahun 2017**. Sebelum adanya sistem zonasi, beberapa permasalahan yang ada hingga mendorong lahirnya sistem zonasi yaitu sebagai berikut:



Adanya ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antardaerah, terutama antara daerah perkotaan dengan daerah pinggiran.



Belum meratanya persebaran sekolah



Terciptanya kastanisasi dan diskriminasi sekolah dengan adanya pelabelan sekolah favorit dan nonfavorit



Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam membantu sekolah meningkatkan mutunya



Belum meratanya sarana prasarana serta guru dan tenaga kependidikan antar sekolah



Adanya diskriminasi dan ketidakadilan akses dan layanan pendidikan yang mengakibatkan siswa tidak dapat bersekolah di dekat rumahnya



Banyak sekolah yang belum memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP)

• Capaian Program



Membentuk Satuan Tugas Implementasi Zonasi Pendidikan tahun 2019 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 248/P tahun 2019



Pembentukan Permendikbud yang mengatur ketentuan PPDB dengan kebijakan zonasi



Sudah ditetapkan **2.580** zona pendidikan di seluruh kabupaten/kota/provinsi



Pengembangan laman zonasi.kemdikbud.go.id yang memuat:

- Peta zona pendidikan,
- Data siswa yang akan lulus,
- Daya tampung sekolah,
- Jumlah satuan pendidikan tiap zona,
- Kebutuhan guru, sarana prasarana, prioritas pembinaan, dan
- Data intervensi program dan pendanaan



Inovasi



Mengembangkan aplikasi untuk merotasi dan mendistribusi guru melalui <https://gtk.ayaya.id>



Melaksanakan program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) melalui kelompok kerja guru berbasis zonasi.



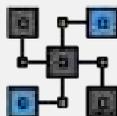
Memberikan prioritas bantuan sarana prasarana berdasarkan zonasi pendidikan.



Merampungkan draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Zonasi Pendidikan (per September 2019 draf sudah diserahkan ke Sekretariat Negara).



Dampak



Kebutuhan dan distribusi guru setiap zona pendidikan dapat diperhitungkan



Pemberian bantuan lebih mudah ditetapkan dan lebih tepat sasaran



Pemerintah daerah lebih mudah menetapkan program kegiatan peningkatan mutu pendidikan.



Penumpukan SDM berkualitas dalam satu wilayah zonasi dapat dihindari di masa mendatang.



Testimoni



“Filosofi yang menjadi pijakan Permendikbud No.51/2018 sudah benar. Bahkan Permendikbud ini layak menjadi langkah awal perbaikan serta pembenahan pendidikan dasar dan menengah guna mewujudkan keadilan bagi semua anak didik. Bukankah posisi atau lokasi sekolah negeri yang didirikan dan dibiayai negara itu disesuaikan dengan kebutuhan warga pada radius wilayah tertentu? Kalau ada anak didik dalam radius itu tidak mendapatkan akses, dia diperlakukan tidak adil. Mereka yang menjadi korban dari standar tinggi itu harus berjibaku mencari sekolah negeri yang jauh dari domisili keluarga. Di Jabodetabek saja, cukup banyak ditemui siswa-siswi yang berdomisili sangat jauh dari sekolahnya, karena tertutupnya akses untuk diterima di sekolah terdekat.”

– Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI



Rekomendasi

1. Perlu didorong Perpres tentang zonasi pendidikan agar implementasi zonasi pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan lebih lancar
2. Skema kebijakan pemenuhan guru, rotasi guru, dan redistribusi guru perlu dibuat dengan sistem zonasi
3. Pembuatan skema dan memprioritaskan bantuan pemenuhan sarana prasarana untuk sekolah yang terpinggirkan, terpelosok, dan kurang diperhatikan

Menuntaskan Pendidikan untuk Seluruh Anak Indonesia

“Program Indonesia Pintar (PIP) penting untuk mencegah generasi putus sekolah. Melalui PIP ini kita ingin memutus kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Tidak ada lagi alasan anak Indonesia untuk tidak sekolah. Saya mengajak semua pihak untuk ikut mendorong agar KIP betul- betul sampai ke tangan siswa yang berhak.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Pemerintah menggulirkan Program Indonesia Pintar (PIP) sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pelaksanaan PIP mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif. Tujuan PIP adalah untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun agar mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat di satuan pendidikan menengah, sekaligus untuk mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*).

PIP dapat dimanfaatkan untuk membeli buku dan alat tulis, membeli seragam dan perlengkapan sekolah, membiayai transportasi ke sekolah, uang saku peserta didik, biaya kursus bagi peserta didik pendidikan formal, dan biaya praktik tambahan. PIP tidak diperkenankan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan

Siswa yang berhak menjadi penerima PIP meliputi,

- Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/ piatu dari sekolah atau panti asuhan
- Peserta didik yang terkena dampak bencana alam
- Peserta didik inklusi, korban musibah, pemutusan hubungan kerja (PHK), daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan (LAPAS), dan memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah
- Peserta didik pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya
- Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13
- Peserta didik SMK Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, dan Kemaritiman

Besaran bantuan PIP per tahun untuk setiap siswa sebagai berikut:

Sekolah Dasar – Rp 450.000,00

Sekolah Menengah Pertama – Rp 750.000,-00

Sekolah Menengah Atas – Rp 1.000.000,00

Sekolah Menengah Kejuruan – Rp 1.000.000,00





Capaian Program

• Titik Awal



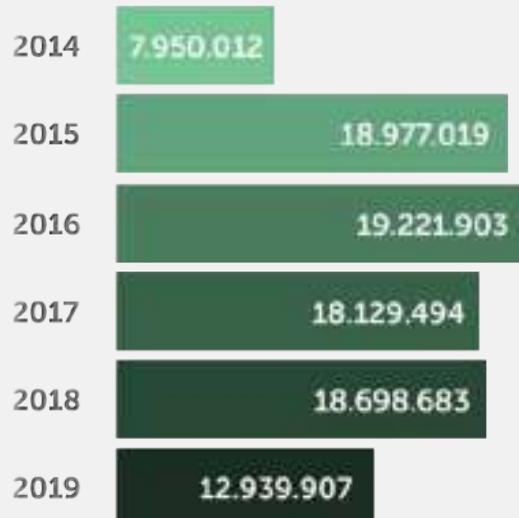
Sebelum tahun 2014, Pemerintah memiliki Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). BSM mengalami sejumlah masalah, dari serapan dana yang minim hingga pemotongan BSM di sejumlah daerah.



Angka putus sekolah masih tinggi, khususnya siswa SMK (2,05%) dan SMA (1,59%). Sedangkan angka putus sekolah di pendidikan dasar Tahun 2014, SD (0,016%) dan SMP (0,16%)

• Capaian Program

**JUMLAH
PENERIMA PIP
TAHUN
2014-2019**





Inovasi

Penggunaan data terpadu berbasis teknologi informasi. Data bersumber dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik yang divalidasi pemerintah daerah.



Sejak tahun ajaran 2017/2018 menggunakan KIP non-tunai atau KIP-ATM. Dana KIP masuk ke rekening tabungan Simpanan Pelajar (Simpel).



Dampak



Faktor sosial ekonomi tidak lagi menjadi kendala bagi masyarakat miskin dalam menyekolahkan anaknya.



Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang sejajar dengan negara-negara lain.



Testimoni



“Program Indonesia Pintar ini sangat bagus sekali, dan sangat membantu kami. Semoga program ini dapat terus diberikan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Terima kasih Pak Presiden”

– Sasmi Selvia (siswi SMA Negeri 1 Kota Sukabumi)



Rekomendasi



- Perlu adanya peningkatan koordinasi antarpihak, terkait validasi data penerima manfaat PIP
- Komitmen daerah perlu ditingkatkan agar lebih peduli terhadap keberhasilan PIP
- Bank penyalur PIP harus konsekuen mengikuti ketentuan sesuai kesepakatan antara Kemendikbud dengan bank penyalur
- Sosialisasi kepada orang tua/wali siswa perlu terus dilakukan agar dana PIP benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan siswa
- Peningkatan koordinasi dengan pihak pemerintahan daerah dalam penyaluran bantuan PIP di daerah-daerah 3T yang memiliki akses sulit

Meluaskan Akses, Meningkatkan Mutu

"Bantuan Operasional Sekolah memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Dengan demikian, diharapkan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah."

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Sejak bulan Juli tahun 2005, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah dimulai. Karena itu, perjalanan program ini sudah lama berlangsung. Sebelumnya, ada program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan yang diluncurkan pemerintah untuk menanggulangi dampak krisis moneter berkepanjangan. JPS Pendidikan berlangsung dari tahun 1998-2003.

JPS Pendidikan dalam bentuk beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) ke sekolah-sekolah. Tidak kurang dari Rp5 triliun anggaran pemerintah diperuntukkan untuk bantuan beasiswa dan DBO

BOS sebagai Dana Bantuan Operasional Pendidikan





Capaian Program

• Titik Awal

Sebelum

BOS diberikan untuk SD dan SMP

2016

Setelah

Perluasan jangkauan ke SMA/SMK yang sebelumnya hanya menerima Bantuan Operasional Manajemen Mutu tahun 2009-2011 dan rintisan BOS tahun 2012-2013.

2018

Pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar kepada sekolah berkebutuhan khusus dengan memberikan satuan biaya tersendiri yang lebih besar dari sekolah lainnya (Rp2.000.000,00 per siswa)

2019

Pemerintah mengubah tujuan BOS, dari pendekatan dan orientasi untuk perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

• Capaian Program

ALOKASI DANA BOS

2015-2019

Selama kurun tahun 2015-2019, Pemerintah telah mengucurkan dana BOS sebanyak

Rp221.803.168.400.000.

*dalam triliun





Inovasi

Portal BOS online (bos.kemendikbud.go.id) dapat dipakai setiap sekolah penerima dana BOS untuk pelaporan penggunaan dana BOS secara daring. Dana yang dilaporkan sesuai dengan alokasi yang diperoleh secara triwulan

Tahun 2019, pemerintah memberikan tambahan bantuan dana BOS, berupa BOS Afirmasi dan BOS Kinerja

Tanggal 25 Juni 2019, Kemendikbud meluncurkan Katalog Sektorak Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Tujuannya agar pengelolaan keuangan sekolah lebih transparan dan akuntabel

SIPLah digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa di sekolah secara daring (*online*)



Dampak



- Peserta didik yang memiliki orangtua/wali tidak mampu mendapatkan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
- Meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang ada di sekolah.



Testimoni

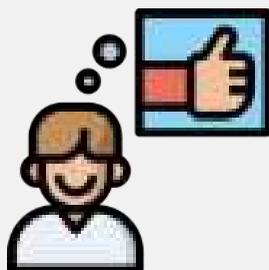


"Sangat membantu sekolah utamanya sekolah swasta dalam pengelolaan utamanya dalam melaksanakan kegiatan operasional yang sejalan dengan SNP. Dalam pemenuhan SNP, BOS sangat membantu mengembangkan sekolah dalam berbagai aspek utama, termasuk pemenuhan kebutuhan buku teks pelajaran, pemeliharaan dan pengadaan multi-media pembelajaran. Kami berharap ke depannya penyelenggaraan BOS untuk sekolah swasta tetap dilanjutkan sehingga kualitas pendidikan lebih baik lagi."

– Asnal Burhanuddin, S.Pd. (Kepala SMP Nur Milad *Boarding School*, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan)



Rekomendasi



Kemendikbud perlu mendisiplinkan sekolah dalam pemutakhiran data Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Besaran BOS sebaiknya ditetapkan berdasarkan biaya pendidikan setiap siswa di daerah

Memenuhi Standar Sarana Prasarana Pendidikan

“Kesulitan akses transportasi dan area pegunungan menjadi kendala pembangunan sarana pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Seperti di Papua, antara distrik satu dan distrik lain, serta antarkabupaten. Semua itu tidak bisa dijangkau lewat darat. Misalnya, di Pegunungan Bintang, ada 34 distrik, yang dapat dilalui dengan sarana transportasi darat hanya 5 distrik, sementara sisanya dengan naik pesawat.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan merupakan komponen penting dalam upaya menunjang peningkatan akses dan mutu pendidikan. Komponen sarpras pendidikan yang diperlukan, setidaknya ada ketersediaan lahan untuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), perpustakaan, laboratorium, dan juga peralatan penunjang yang mendukung ruang laboratorium.

Pembangunan sarpras mengacu pada data kebutuhan yang terekam dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sarpras yang sudah dibangun sepanjang kurun tahun 2015- 2019, meliputi USB, RKB, perpustakaan, laboratorium, dan ruang praktik.

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebagai Pemenuhan Standar Sarana Prasarana

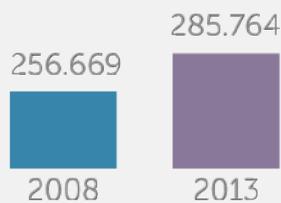




Titik Awal (*Baseline*) & Capaian Program

• Titik Awal

peningkatan jumlah sekolah (TK, SD, SLB, SMP, dan SM)



● Jumlah ruang kelas SD, SLB, SMP, dan SM meningkat 3,63% menjadi 1.524.527 ruang pada 2013.

● Peningkatan Jumlah Ruang Kelas Baik

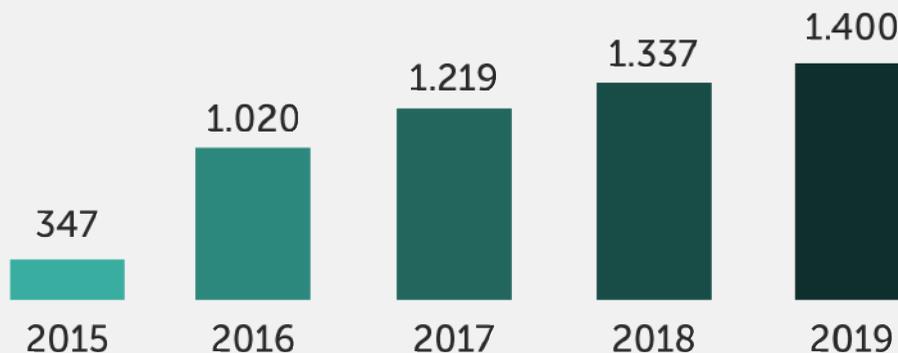


• Capaian Program

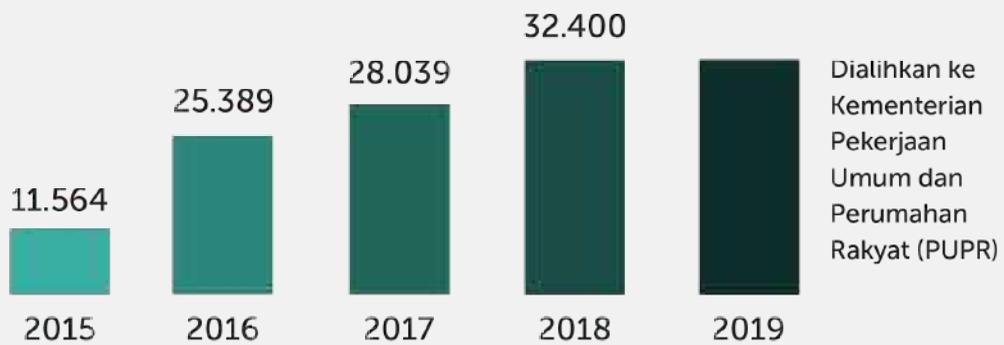
Akumulasi jumlah USB, RKB, Perpustakaan, Laboratorium, dan Ruang Praktik pada Tahun 2015 - 2019

Unit Sekolah Baru

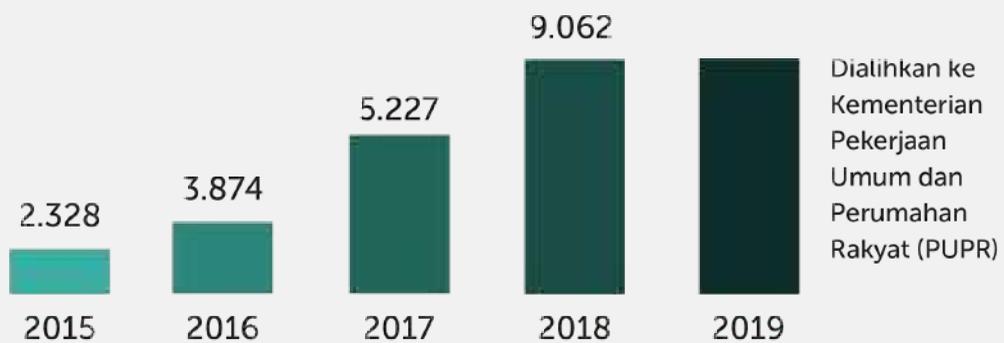
Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan PKLK



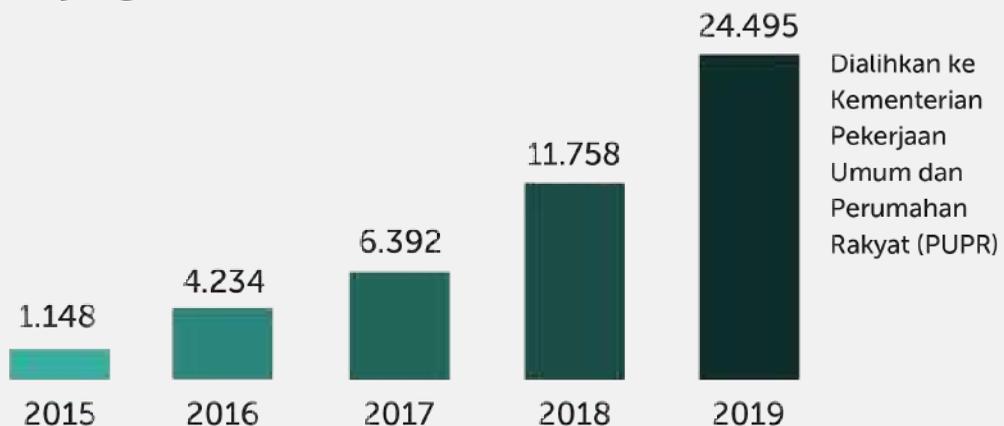
Ruang Kelas Baru Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan PKLK



Ruang Perpustakaan Baru Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan PKLK



Ruang Laboratorium dan Ruang Praktik Baru Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan PKLK





Inovasi



Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perkotaan dengan pertumbuhan penduduk tinggi



Pembangunan sarana prasarana berdasarkan kekhususan, yang meliputi pembangunan asrama siswa SLB dengan kondisi tertentu dan pendirian SD dan SMP satu atap



Dampak

Warga negara mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mengikuti pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pemerataan pendidikan.

Peningkatan rombongan belajar dan meningkatkan kenyamanan belajar siswa.

Pembangunan perpustakaan, laboratorium, disediakannya peralatan pendidikan, buku-buku, dan berbagai alat peraga meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.



Testimoni



"Kami tentunya sangat berterima kasih sekali dengan adanya bantuan anggaran perbaikan atau rehab ruang kelas di SDN Sukasirna dari pemerintah daerah. Terlebih bangunan sekolah memang sudah sangat tua. Kami juga belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya."

– Nugraha Purwanta, S.Pd, Kepala SD Negeri Sukasirna, Kab. Cianjur, Jawa Barat



Rekomendasi



Perlu dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang serius, rutin, maksimal, dan mengendalikan tingkat kebergunaan sarana

PENDIDIKAN KESETARAAN "MENJANGKAU YANG TIDAK TERJANGKAU"

"Kami berusaha memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh warga negara, terutama anak-anak putus sekolah dari keluarga yang kurang mampu. Dengan demikian, melalui pendidikan kesetaraan dipastikan tidak ada anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan karena telah diberikan kecakapan dan keterampilan hidup."

(Harris Iskandar, Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas)

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan formal di sekolah. Pendidikan itu, dikenal dengan nama Kejar Kelompok Belajar Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP, dan Paket C untuk setara SMA

Pendidikan Kesetaraan dengan slogan "Menjangkau yang tidak terjangkau", berupaya memberikan layanan pendidikan bagi warga negara yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan formal dengan berbagai alasan. Materi Pendidikan Kesetaraan, antara lain berupa ilmu pengetahuan, vokasional, atau pendidikan kecakapan hidup (*life skill*).

Pendidikan Kecakapan Hidup di Masyarakat





Titik Awal (*Baseline*) & Capaian Program

- Titik Awal

Sebelum tahun 2015 Pendidikan Kesetaraan ada di Pendidikan Formal

- Capaian Program

Tahun	Paket A	Paket B	Paket C
2015	11.583	86.090	24.190
2016	9.500	70.027	85.875
2017	6.000	67.120	98.500
2018	45.272	138.683	209.109
2019	72.900	232319	466.420



Inovasi



- Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
- Pelaksanaan K-13 secara kontekstual dan fungsional
- Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
- Pembelajaran daring dan luring
- Memperkuat pelaksanaan UNBK
- Terintegrasi dengan pendidikan vokasi melalui kursus dan pelatihan
- Memperketat sistem pendataan guna menjamin mutu pendidikan kesetaraan



Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan mengalokasikan dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK Nonfisik) BOP Kesetaraan dengan jumlah anggaran Rp1,5 milyar untuk peserta didik 771.639 orang.



Dampak



Masyarakat telah terlayani pendidikannya, terutama untuk anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) dan orang dewasa yang belum lulus pendidikan dasar dan menengah. Demikian juga untuk kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pendidikan, baik kondisi geografis, budaya (komunitas adat khusus/terpencil), sosial, ekonomi, dan psikologis (kenyamanan belajar)



Testimoni



"Dengan diadakannya ujian nasional oleh pemerintah Kota Depok, saya merasa terbantu karena dapat mengangkat derajat kehidupan.. Alhamdulillah, saya merasa sangat terbantu dengan diadakannya ujian kesetaraan, minimal bisa menunjang penambahan gaji yang didapat melalui pekerjaan sebagai OB di sekolah"

(Mamad 53 Tahun, Warga Beji, Depok, Jawa Barat)



Rekomendasi

- Mengupayakan tempat pembelajaran yang tidak jauh dari sasaran peserta didik
- Mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas tutor pendidikan kesetaraan
- Pengawasan terhadap perangkat pembelajaran tutor
- Pendampingan intens BP PAUD dan Dikmas (subdit teknis) dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota
- Mendorong satuan pendidikan untuk menginput data peserta didik kesetaraan terbaru
- Meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan
- Mengadakan pengangkatan tutor kontrak agar jumlah tutor dapat memadai
- Mengadakan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman daerah dalam DAK nonfisik BOP Kesetaraan

Satu Desa Satu PAUD

*“Mari kita semua mewujudkan PAUD
Berkualitas Universal sebagai kunci
keberhasilan masa depan anak Indonesia”*

*(Iriana Joko Widodo, Ibu Negara Republik
Indonesia)*

Program Satu Desa Satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar setiap desa di seluruh Indonesia memiliki minimal 1 lembaga PAUD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyediaan Akses Pendidikan Dasar untuk Anak Usia Dini.

Akses Pendidikan Anak Usia Dini Dicanangkan di Setiap Desa





Capaian Program

• Titik Awal



2013

anak yang mengikuti PAUD mencapai 34,54% dari total anak usia PAUD di Indonesia



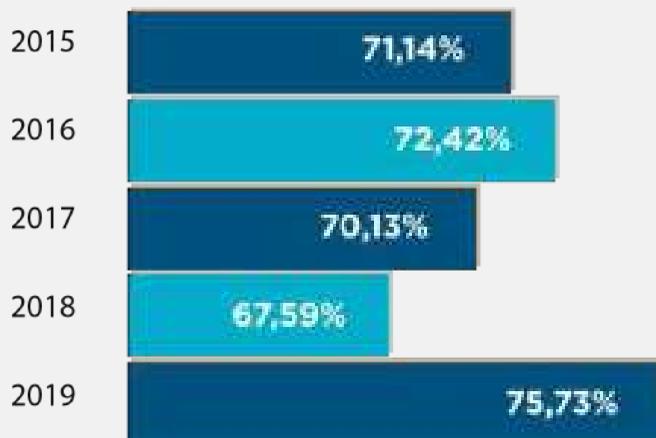
2013

74.982 Sekolah

2.654 PAUD negeri dan 72.328 PAUD swasta.

• Capaian Program

Perkembangan Program Satu Desa Satu PAUD





Inovasi



- Pemberian bantuan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD di daerah-daerah 3T
- Koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal terkait penggunaan dana desa yang dapat digunakan untuk PAUD.



Dampak



Berkembang dengan baik moral dan kecerdasan anak

Anak memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, cinta sesama, cinta tanah air, dan gizi

Anak cenderung lebih berprestasi, ceria, berani, dan memiliki semangat tinggi



Testimoni



“Dengan adanya gebrakan program satu desa satu PAUD ini, Pesawaran mengalami kemajuan signifikan. Pada tahun 2014 kabupaten memiliki 115 PAUD, sekarang mempunyai 129 PAUD.”

– Dendi Ramadhona, Bupati Pesawaran, Lampung



Rekomendasi



Perlunya peningkatan komitmen daerah terhadap PAUD sesuai amanat PP Nomor 2 Tahun 2108 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana PAUD menjadi salah satu layanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah

PAUD Holistik Integratif

“Sebanyak 99 persen pengelolaan PAUD ada di tangan masyarakat. Jadi, kalau ada tiga kawasan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat maka PAUD ini sebenarnya di orang tua dan masyarakat.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Program PAUD Holistik Integratif (HI) adalah komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini. Dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pelaksanaan PAUD Holistik Integratif dilandasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.



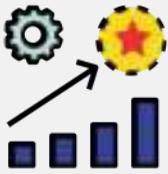
PAUD Holistik Instgratif memenuhi Hak Tumbuh Kembang Anak





Capaian Program

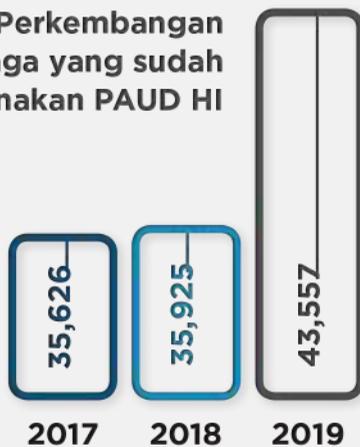
• Titik Awal



Meningkatkan jumlah peserta PAUD, terutama dari keluarga kurang mampu melalui penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada 45.000 lembaga PAUD yang menjangkau lebih dari 1,35 juta anak usia dini.

• Capaian Program

Perkembangan lembaga yang sudah melaksanakan PAUD HI





Inovasi

Pos
Pelayanan
Terpadu
(Posyandu)



Bina
Keluarga
Balita
(BKB)

Program yang awalnya berjalan secara sendiri-sendiri, sekarang sudah diintegrasikan. Selain itu, Direktorat Pembinaan PAUD menyediakan bantuan pemberian makanan sehat dan bantuan inisiasi PAUD 0 – 3 tahun.



Dampak



Tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal dan menjadikan anak sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif



Testimoni



"Konsep PAUD holistik integratif sangat baik karena juga menyangkut pengembangan karakter, moral, pelayanan kesehatan pemenuhan gizi anak serta stimulasi."

– Nooer Wachida Prihartini, Bunda PAUD Parigi Moutong.



Rekomendasi



Program perlu mendapat perhatian dan komitmen yang lebih baik dari pengelola program BKB dari tingkat pusat hingga desa

Buku Pendidikan Berualitas Berbasis Mutu, Murah, dan Merata

“Dengan Ilmu Kita Menuju Kemuliaan.”

(Ki Hadjar Dewantara)

Kurang lebih setengah abad silam, tepatnya tanggal 19 September 1975, sastrawan Ayip Rosidi, yang menjabat Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggagas perlunya undang-undang yang mengatur perbukuan. Pada Kongres Perbukuan Nasional I Tahun 1995, Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga mencetuskan perlunya undang-undang yang mengatur Sistem Perbukuan.

Perjalanan panjang Sistem Perbukuan, akhirnya menjadi jelas sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Sistem Perbukuan menjadi payung hukum tata kelola dan ekosistem perbukuan dari hulu sampai hilir mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

Penyediaan Buku Pendidikan Berbasis
Mutu, Murah, dan Merata (3M)



ANGKETAHUN MODERN
**Dunia
Tumbuhan**
PIUST
GROLIFER - PT. Widyadara
DUNIA TUMBUHAN



Titik Awal (*Baseline*) & Capaian Program

- Titik Awal



Sebelum ada UU Sistem Perbukuan, tata kelola perbukuan belum memiliki payung hukum. Pusat Kurikulum Perbukuan hanya mengatur tata kelola buku pendidikan.

Buku yang Dinyatakan Layak



• Capaian Program

Buku Teks Pelajaran yang Disusun Pusat Perbukuan Kurun Tahun 2013-2018

TAHUN	KEGIATAN	JUMLAH
2013-2016	Buku Teks Pelajaran (Revisi) K-13 Kelas I, IV, VII, dan X	121 judul
2017	Buku Teks Pelajaran (Revisi) Kelas II, V, VIII, dan XI	122 judul
2018	Buku Teks Pelajaran (Revisi) Kelas III, VI, IX, dan XII	119 judul
	Model Buku Teks Pelajaran	26 judul
	Buku Teks Pelajaran Pendidikan Olahraga, Jasmani, dan Kesehatan (PJOK) Kelas IV, V, VI	18 judul
	Buku Teks Pelajaran Matematika Kelas IV, V, dan VI	8 judul
Total Buku Teks Pelajaran Tahun 2013-2018		414 judul



Inovasi

mengembangkan portal Ekosistem Perbukuan Sekolah
(buku.kemendikbud.go.id)



Dampak



Masyarakat dapat memperoleh buku-buku yang berkualitas, baik dari segi materi penyajian bahasa maupun kegrafikan dengan harga yang terjangkau



Testimoni



“Buku-buku pendidikan, baik buku teks pelajaran maupun buku nonteks pelajaran, yang diberikan oleh pemerintah sangat bermanfaat untuk peserta didik dalam rangka peningkatan budaya baca dan tulis.”

– Martono, Guru SMP Negeri Kepung, Pare, Kediri



Rekomendasi

Buku-buku teks pelajaran untuk SMK perlu ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas

Pemerintah perlu menyediakan sarana prasarana yang baik untuk optimalisasi distribusi buku



Menjaring Masyarakat Berprestasi Hingga Daerah 3T

“Program Beasiswa Unggulan mendukung upaya Pemerintah dalam memperkecil kesenjangan kinerja pendidikan antar-kelompok masyarakat, sehingga program ini juga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat miskin dan/atau yang tinggal di daerah tertinggal.”

(Suharti, Kepala Biro PKLN, 2015 - 2019)

Program Beasiswa Unggulan yang digulirkan sejak tahun 2006, merupakan wujud tanggung jawab Kemendikbud untuk menjamin masyarakat berprestasi yang tidak memiliki cukup biaya agar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan tinggi. Pilihan kuliah mulai dari jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), hingga Doktor (S3), baik perguruan tinggi di dalam negeri (akreditasi minimal B) maupun di luar negeri.

Program Beasiswa Unggulan diselenggarakan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (PKLN), Sekretariat Jenderal Kemendikbud. Penerima beasiswa terbagi ke dalam dua kategori, yakni pegawai Kemendikbud, dan masyarakat berprestasi. Sejak tahun 2018 bertambah sasaran ke masyarakat daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sehingga menjadi tiga kategori.



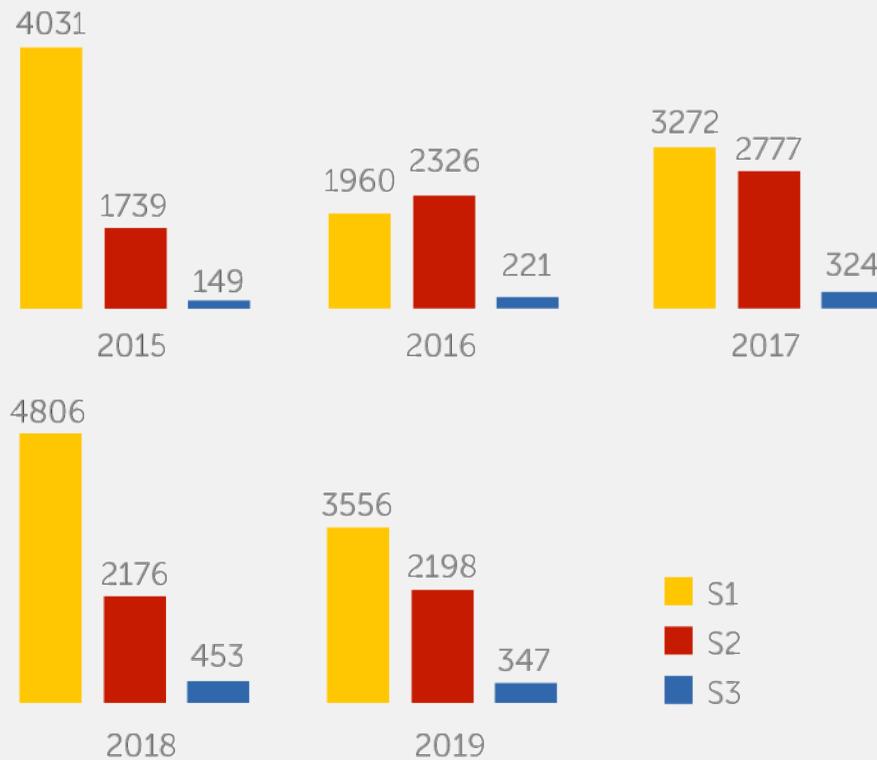
Capaian Program

• Titik Awal



• Capaian Program

Total Penerima Beasiswa Unggulan Per Jenjang



Data Beasiswa Unggulan yang Tersalurkan

2016 = Rp 115.348.325.765

2018 = Rp 166.549.280.000

2017 = Rp 126.974.046.539

2019 = Rp 154.663.451.179

Data per 21 Juli 2019



Inovasi



Tahun 2016, pemberian beasiswa kepada kelompok diubah menjadi pemberian beasiswa kepada individual



Proses pendaftaran hingga pelaporan sudah berbasis daring (*on line*)



Dampak



Memperkecil kesenjangan kinerja pendidikan antarkelompok masyarakat, baik di lingkungan pegawai maupun masyarakat sehingga makin bertambah jumlah masyarakat berpendidikan tinggi



Membuka peluang lebih besar bagi masyarakat miskin dan/atau yang tinggal di daerah tertinggal untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi



Testimoni



"Saat ini, saya terdaftar sebagai mahasiswa S-2 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Sudah sejak lama saya ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi untuk dapat meningkatkan kompetensi saya di bidang pendidikan. Saya sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan Beasiswa Unggulan dari Kemendikbud untuk meringankan beban biaya yang timbul selama studi. Beasiswa Unggulan memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa lebih berkonsentrasi menyelesaikan pendidikan tanpa terganggu masalah pembiayaan pendidikan. Terima kasih Beasiswa Unggulan."

– Indra Budi Setiawan, staf Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Penerima Beasiswa S2 BU



Rekomendasi



Sosialisasi lebih diperluas, bukan hanya dari situs Kemendikbud.

TIK dan Akses Internet Mendongkrak Mutu Pendidikan 3T

“Kemendikbud bertekad akan membangun pendidikan di sekolah daerah 3T melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis daring, pemberian perangkat TIK, dan memberikan pelatihan bagi guru yang mengajar di daerah tersebut.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Akses transportasi darat di sebagian besar wilayah di bumi Papua masih sulit. Namun, pendidikan di Papua bolehlah berbangga dengan kehadiran Program Akses Internet USO (*Universal Service Obligation*), yang memberikan akses internet di sekolah-sekolah di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) di 122 kabupaten dan 24 provinsi di Indonesia.

Program Akses Internet USO merupakan kerja sama Kemendikbud melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom Kemendikbud) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI). BPPPTI menyediakan layanan internet, sementara Pustekkom menyiapkan sekolah yang akan mendapatkan akses internet dan pelatihan peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK.



Capaian Program

• Titik Awal



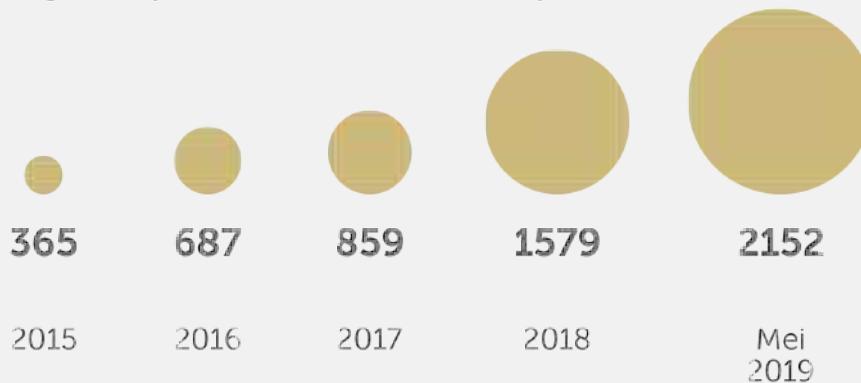
Program sebelumnya merupakan program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), yang belum mencakup akses internet dan pemanfaatan TIK

• Capaian Program

Survei Pustekkom Kemendikbud tahun 2018 di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Selatan, dan Gorontalo menghasilkan:

- Akses internet USO yang dimanfaatkan untuk pencarian konten pembelajaran.
- Terbentuk sekolah pusat sumber belajar dan sekolah inovatif
- Konten pembelajaran terbanyak berupa video.
- Media komunikasi paling populer di kalangan guru sekolah 3T adalah facebook.
- Tahun 2019 empat guru 3T mengikuti Pelatihan GTK di University of Queensland, Australia: Kalpin Ranto Sihol Berutu (Aceh), Makbul Muavi (Jawa Timur), Lalu Supriyadi (NTB) dan Amaranta Lestoin (Papua).

Progres Implementasi USO di satuan pendidikan





Dampak

- Kompetensi guru dan tenaga kependidikan menjadi semakin berkembang
- Partisipasi sekolah/satuan pendidikan dalam memanfaatkan TIK untuk e-administrasi dan e-pembelajaran meningkat
- Pendataan Dapodik, Sertifikasi Guru, Uji Kompetensi Guru, dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sudah menggunakan layanan internet



Testimoni



“Semangat ini saya dedikasikan untuk anak didik saya yang berjumlah sekitar 504 siswa dan 27 orang rekan guru yang ada di Papua. Apalagi sekolah kami saat ini telah menjadi sekolah rujukan. Semua ini berkat bantuan Program Internet USO dari Pustekkom, BAKTI Kominformo, dan pihak PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai vendor.”

– Amaranta Lestoin, guru di SD Inpres Syuru, Distrik Asgats, Kabupaten Asmat, Papua



Rekomendasi

1. Koordinasi dengan BNPP (Badan Nasional Penanganan Perbatasan) terkait sumberdaya listrik perlu untuk diusulkan dalam program-program lintas kementerian, lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
2. Pengembangan kualitas SDM melalui pengembangan model pembelajaran yang komprehensif baik dari sisi teknis pengelolaan ataupun pemanfaatan untuk pembelajaran
3. Kolaborasi dengan pihak swasta untuk ikut membangun daerah 3T

Penyediaan Internet di Sekolah di Daerah di daerah terdepan,
terluar dan tertinggal (3T)





Bab 4

Pembelajaran Bermutu,
Wujudkan Revolusi Karakter

Pendahuluan

“Perubahan zaman dan teknologi yang begitu cepat menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi. Tujuan pendidikan nasional tidak lagi mencetak siswa yang berpengetahuan, tetapi juga siswa yang berketerampilan, memiliki skill, dan berkarakter.”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Salah satu tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sesuai dengan visi misi Kemendikbud 2015-2019 adalah meningkatkan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter. Tujuan strategis ini merupakan wujud implementasi program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni “Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek Pendidikan Kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.”

Terbentuknya karakter bangsa yang kuat tidak terlepas dari keberadaan individu yang memiliki karakter serta cara berpikir dan berperilaku dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemendikbud memiliki amanah besar untuk turut melahirkan individu berkarakter bangsa yang kuat, yakni melalui kebijakan pendidikan dan kebudayaan di semua jenjang Pendidikan.

Melalui seluruh satuan kerja Kemendikbud, berbagai program dan kegiatan terkait pembelajaran bermutu untuk mewujudkan revolusi karakter bangsa, sepanjang tahun 2015-2019 ada sejumlah isu penting sebagai komponen penopang terwujudnya misi meningkatkan pembelajaran bermutu, yakni meliputi Penguatan Pendidikan Karakter; Prestasi Peserta Didik pada Berbagai Ajang Kompetisi; Gerakan Literasi; Pelibatan Keluarga dalam Pendidikan; Ujian Nasional Berbasis Komputer; Akreditasi; Kurikulum 2013; Rumah Belajar Digitalisasi Sekolah untuk merespon

Industri 4.0. Satu hal yang juga menjadi kebanggaan Kemendikbud adalah terpilihnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sebagai Presiden *The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)*.

Penguatan Pendidikan Karakter

“Pembangunan karakter bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai etika, agama, ke depan harus menjadi perhatian dunia pendidikan kita dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kualitas yang baik.”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kebijakan prioritas pemerintah melalui agenda Nawacita dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Kebijakan tersebut mendorong peran tripusat pendidikan, yaitu Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat untuk menumbuhkan nilai-nilai utama PPK, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. PPK diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Generasi Emas 2045 yang cerdas, berkarakter, berdaya saing, dan dijiwai oleh Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bineka Tunggal Ika.

Implementasi Nilai Gotong Royong dalam
Penguatan Pendidikan Karakter





Titik Awal (*Baseline*)



Pendidikan Karakter bukanlah suatu kebijakan baru karena sejak tahun 2010 pendidikan karakter di sekolah sudah menjadi Gerakan Nasional.



Banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk memastikan agar proses pembudayaan nilai-nilai karakter berjalan dan berkesinambungan



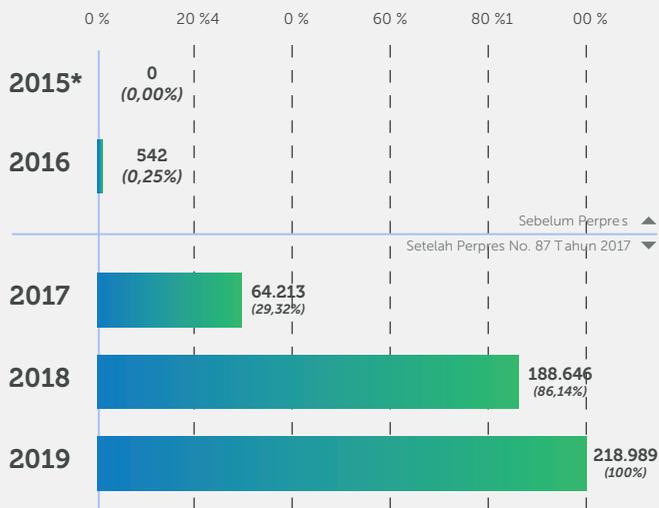
Mebutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif dan bertumpu pada kearifan lokal untuk menjawab tantangan zaman yang makin kompleks, mulai dari persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa sampai kepada persaingan global



Pada tahun 2015 Kemendikbud mengeluarkan kebijakan tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP) di sekolah.



Capaian Program



*2015 Kebijakan Penumbuhan Budi Pekerti

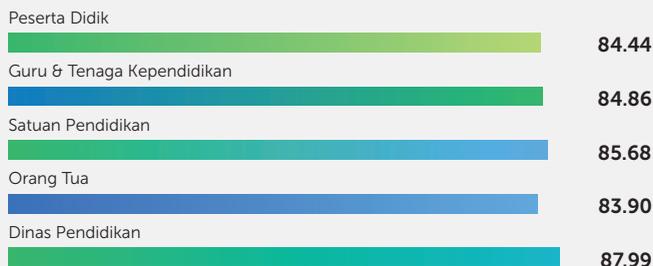
Pertumbuhan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal Tahun 2015-2019

Pertumbuhan implementasi PPK melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, TOT, lokakarya, rakor, semi-loka, sarasehan, Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD), pengimbasan, konsultasi, pendampingan, dan lain-lain di 34 Provinsi:

- 2016: 542 Sekolah (Piloting PPK)
- 2017: 64.213 Sekolah
- 2018: 188.646 Sekolah
- 2019: 218.989 Sekolah

Sasaran PPK Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Pengawas, Peserta Didik, dan seluruh UPT Kemendikbud di daerah.

Berdasarkan Pemangku Kepentingan



Rata-rata **85,34%**

Survei Kepuasan Pelanggan Stakeholder Satisfaction Survey (SSS) Tahun 2018 oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemdikbud.

Sebanyak **85,34%** dari **12.510** responden, berbagai pemangku kepentingan pendidikan **puas** dengan adanya kebijakan PPK khususnya terhadap **pembiasaan 5 nilai utama PPK yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas**

Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) 2018



Inovasi

Melakukan kerja sama dan pelibatan publik dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, antara lain sebagai berikut.

- 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk implementasi PPK di daerah 3T dan Penguatan Nasionalisme pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
- 

Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) untuk Penguatan Nilai-nilai Kejuangan dan Nasionalisme.
- 

Dewan Ketahanan Nasional untuk Program Bela Negara.
- 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk pencegahan radikalisme di sekolah.
- 

Badan Narkotika Nasional untuk program P4GN di sekolah.
- 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemenristekdikti, Kemenag, Kemendagri tentang Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi.
- 

Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk implementasi Pendidikan Karakter Kontekstual sesuai dengan kearifan lokal
- 

Komunitas seni dan budaya, pegiat pendidikan dan kebudayaan, komunitas keagamaan, serta perguruan tinggi.



Dampak



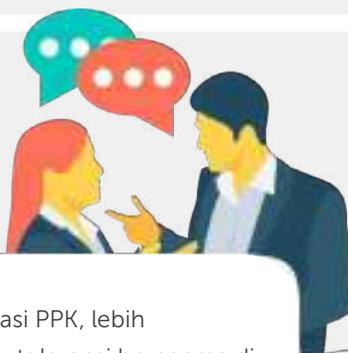
Meningkatnya jalinan kolaborasi antar Sekolah, Orang Tua dan Masyarakat dalam menumbuhkan karakter anak



Kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah, beradaptasi, berkolaborasi, mengembangkan kreativitas dan inovasi, serta jiwa kepemimpinan sebagai kompetensi yang dibutuhkan di era sekarang. Hal tersebut dilakukan melalui kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.



Testimoni



“Dengan adanya kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter, para kepala sekolah dan guru semakin bersemangat mendorong suasana belajar-mengajar yang menyenangkan, mencerahkan, serta mampu memacu kreativitas dan kompetensi peserta didik dalam rangka membangun Generasi Emas Indonesia 2045 yang dibekali keterampilan abad 21.”

**(Dr. Ujang Syarip Hidayat, M.Pd.,
Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kab.
Sukabumi Jawa Barat)**

“Dengan implementasi PPK, lebih menguatkan karakter toleransi beragama di sekolah saya. Kami memiliki murid dengan 5 latar belakang agama yang berbeda, di mana di sekolah, kami pupuk nilai-nilai toleransi sejak awal.”

**(Dwi Atmi Sutarini, M.Pd., Kepala SDN 1
Ungaran Yogyakarta)**



Rekomendasi

Permasalahan

1. Besarnya populasi siswa (51 juta), guru (3,26 juta), dan sekolah (218.989) yang tersebar di seluruh Indonesia.
2. Terjadi paradoks terhadap pendidikan karakter anak, yaitu antara lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan masyarakat.
3. Terbatasnya pendampingan orang tua sehingga diperlukan peningkatan kualitas hubungan orang tua dengan anak di rumah dan lingkungannya.
4. Pengaruh kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menghubungkan siswa dengan konten-konten negatif.
5. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap Kebijakan PPK masih belum optimal termasuk pemenuhan 20% anggaran pendidikan di setiap daerah yang masih belum dipenuhi.

Rekomendasi



1. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah proses pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, negara harus hadir melalui kampanye pembangunan karakter bangsa secara luas di seluruh media massa.



2. Kunci keberhasilan PPK adalah melalui "Gerakan Keteladanan". Oleh karena itu, perlu komitmen, aksi kolektif, dan konsistensi secara terpadu dari seluruh komponen bangsa, yaitu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, korporasi, dan masyarakat untuk mewujudkan "Gerakan Keteladanan".



3. Sekolah sebagai rumah dan arus utama Gerakan PPK perlu didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang berbudaya sehat dan positif sebagai satu kesatuan ekosistem yang strategis dan berkelanjutan.



4. Komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap implementasi PPK dan pemenuhan anggaran pendidikan 20% harus didorong guna mewujudkan Generasi Emas 2045 yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif.

Prestasi Siswa Indonesia

“Saya melihat senyum dan optimisme dari wajah kalian semua. Saya yakin kamu semua akan siap memangku tanggung jawab memenuhi kewajiban sebagai putra bangsa terbaik. Yang membantu Indonesia menjadi negara maju. Seajar dengan negara-negara besar lain di dunia.”

(Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara konsisten terus menjalankan amanah konstitusi untuk melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Untuk kompetisi di dalam negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen Dikdasmen menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Nasional (O2SN), Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI), National Debating Championship (NSDC), Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI), dan Festival Literasi Sekolah (FLS).

Begitu pula kompetisi di luar negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pendampingan dan apresiasi kepada siswa yang berhasil menoreh prestasi gemilang di kompetisi bergengsi Internasional. Salah satu kompetisi bergengsi, Word Skill Competition 2019, Indonesia berhasil memboyong 20 medali.

Peraih Medali Emas World
Skill Asia 2018



worldskills
Asia-Abu Dhabi

MEDALI EMAS
Rp. 27.000.000

(Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah)

UANG PEMBINAAN DIPOTONG PAJAK 6%

WORLD SKILLS ASIA 2018

SMK
BISA-BISA



Titik Awal (Baseline)



Kemendikbud melaksanakan pembinaan siswa-siswi Indonesia agar terus **berprestasi di level nasional dan internasional.**



Capaian Program

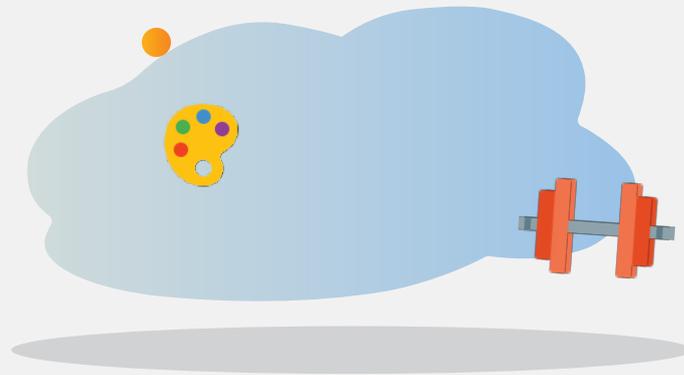
Prestasi Siswa di Kompetisi Internasional



Sumber: Ditjen Dikdasmen, 2019



Inovasi



Pengembangan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI) dan Festival Literasi Sekolah (FLS). Kemendikbud terus melakukan berbagai macam kegiatan **pembinaan peserta didik di semua lini bakat dan kecerdasan**, dari tingkat sekolah, daerah, nasional, hingga internasional.



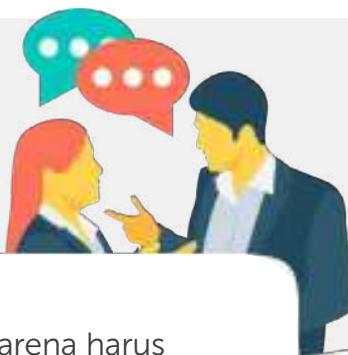
Dampak



Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, siswa mampu berprestasi pada kompetensi di level nasional dan internasional. Untuk jenjang SMA misalnya, melalui olimpiade sains, setiap tahunnya, lebih dari 370 ribu anak-anak *post-milenial* terekam memiliki potensi keunggulan di semua lini kecerdasan sains.



Testimoni



"Saya bangga sekali bisa mendapatkan medali ini, karena harus bersaing dengan peserta-peserta terbaik dari negara-negara yang kuat dalam prestasinya di bidang matematika,"

(Gian Cokro Wardana, Peraih Medali Emas IMO 2018)

"Walaupun masa remaja saya sedikit hilang karena setiap hari fokus latihan, tapi masih positif, dapat uang bisa bantu-bantu buat kebutuhan sekolah, ketimbang main-main dan nongkrong nggak jelas. Tetap semangat, jaga kekompakan, dan jaga ibadahnya."

(Paramitha Nur Dea Pujiastuti, Peraih Medali Emas Kejuaraan Karate Internasional)



Rekomendasi



Permasalahan

Kurangnya pembinaan di sektor guru. Standar kompetensi guru belum merata di penjuru daerah serta komitmen daerah dalam menganggarkan pelatihan guru juga masih kurang. Hal tersebut menyebabkan talenta-talenta anak yang berprestasi di bidang sains masih terpusat di daerah Jawa dan sekitarnya.



Rekomendasi

Program olimpiade dan kompetisi lain perlu dipertahankan, dilanjutkan, dan dikembangkan untuk mewujudkan Visi Presiden RI Tahun 2020–2024 tentang pembangunan sumber daya manusia.

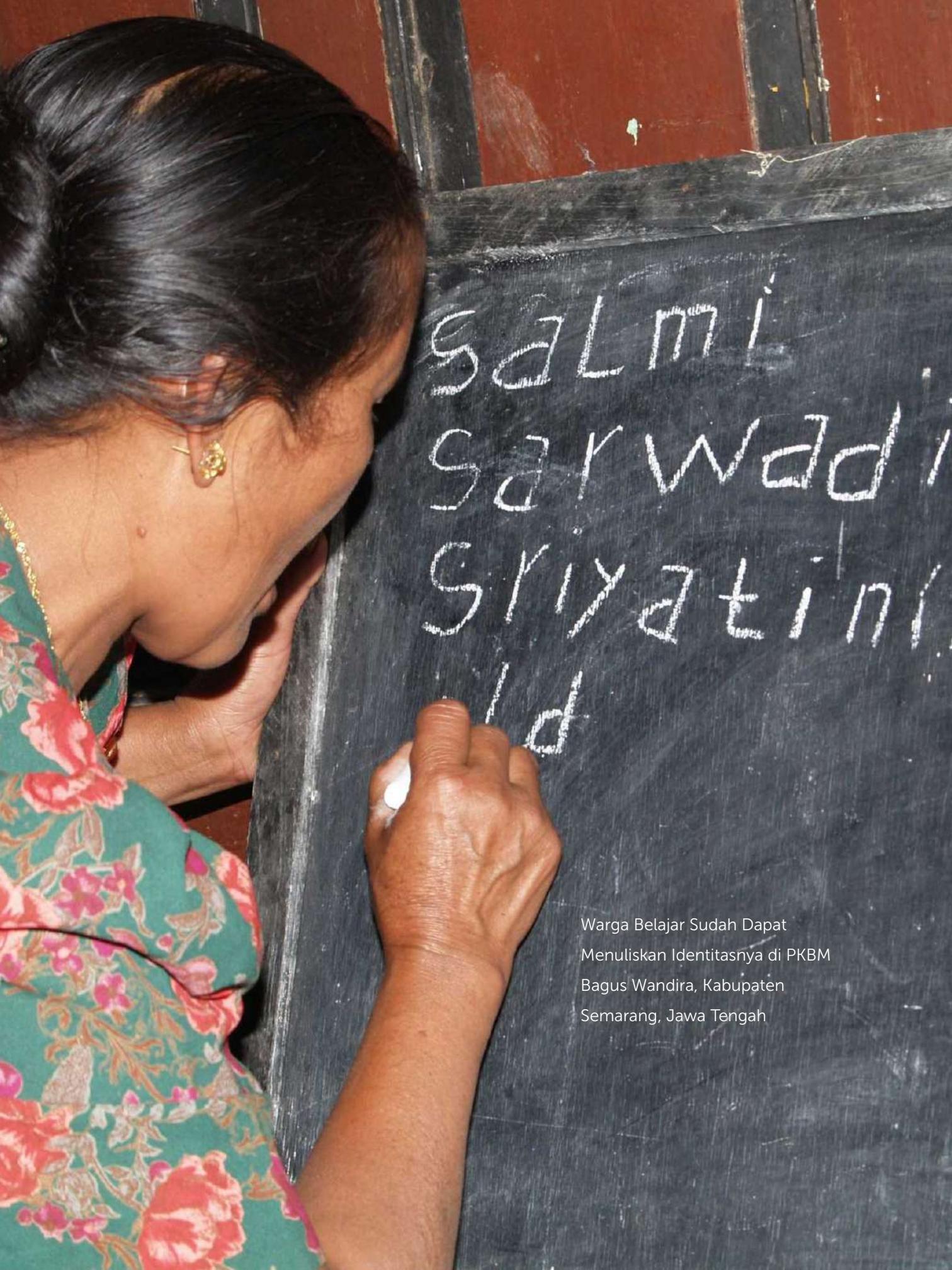
Pemberantasan Buta Aksara

“Meskipun jumlah buta aksara di negara kita sudah menurun, bukan berarti Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara ini sudah selesai. Tugas kita bersama untuk menuntaskan buta aksara dan membebaskan bangsa ini dari kebutaaksaraan harus terus kita lakukan.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Pemerintah Indonesia terus mengurangi jumlah buta aksara dan meningkatkan keberaksaraan masyarakat. Di antaranya, melalui program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar maupun keaksaraan lanjutan. Program penuntasan buta aksara, antara lain berupa program pendidikan keaksaraan dasar (keaksaraan dasar terpadat dan kawasan suku adat terpencil/khusus) dan keaksaraan lanjutan (keaksaraan usaha mandiri dan multikeaksaraan)





salmi

ipawjps

Yunitaris

pl

Warga Belajar Sudah Dapat
Menuliskan Identitasnya di PKBM
Bagus Wandira, Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah



Capaian Program

• Titik Awal

2014

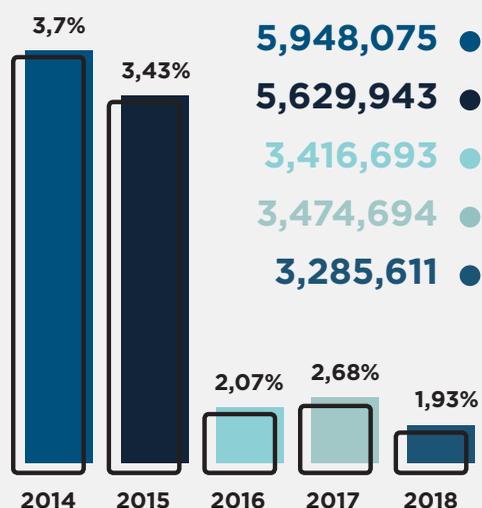
Persentase buta aksara nasional adalah 3,7% atau sekitar 5,9 juta jiwa dengan kelompok usia 15-59 tahun

Sebaran angka tuna aksara per provinsi yang masih melebihi rata-rata nasional tercatat ada 4, yaitu Nusa Tenggara Barat (16,48%), Nusa Tenggara Timur (10,13%), Sulawesi Barat (10,33%), dan Papua (36,31%).

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
BOPendidikanKeaksaraanDasarSuku Terasing/ Komunitas Adat Terpencil	-	-	100	2.500	2.100	2.100	6.800
BOPendidikanKeaksaraanDasar(Terpadat)	59.400	150.525	39.850	36.200	36.200	80,190	402.365
BOPendidikanKeaksaraanDasarPapuadan 3T	91.620	-	7.500	15.000	18.500	-	117.635
BOPendidikanKeaksaraanUsahaMandiri	130.000	95.200	57.940	41.400	29.060	25.740	353.625
BOP Keaksaraan Multikeaksaraan	-	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	29.500

• Capaian Program

Persentase Tren Penurunan Buta Aksara Tahun 2014-2018 Usia 15-59 Tahun





Inovasi



Kemendikbud bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui satuan pendidikan nonformal, perguruan tinggi, serta organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat



Dampak

Peningkatan melek aksara membuat masyarakat lebih berdaya di dalam kehidupan, mulai dari bisa membaca dan menulis, minimal 3 kalimat sederhana, bisa berhitung minimal 2 digit, bisa berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dan menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari.



Testimoni



“Saya senang mengikuti pembelajaran keaksaraan ini karena sudah mampu calistung. Sebelum bisa calistung, saya kesulitan ketika berbelanja. Ketika hendak membeli minuman misalnya, saya lebih sering menggunakan bahasa isyarat dengan mengepalkan tangan ke arah atas hampir menyentuh daguku. Ini saya lakukan karena meniru gambar yang ada di kemasan minuman yang hendak saya beli.”

– Riwa, (42 tahun), peserta didik keaksaraan komunitas Adat Terpencil Suku Bajo, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara



Rekomendasi

1. Pendekatan kelompok buta huruf, yang berjumlah 1,93%, yang mayoritas perempuan dari keluarga miskin dan tinggal di daerah terpencil dengan program keaksaraan dasar
2. Untuk memelihara yang sudah melek aksara agar tidak buta huruf kembali pengembangan program keaksaraan lanjutan
3. Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tentang pentingnya melek huruf dengan program keaksaraan dan literasi masyarakat

Gerakan Literasi Nasional

“Gerakan Literasi Nasional dimaksudkan agar menjadi landasan utama mewujudkan Indonesia yang maju. Ciri-ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang sangat kokoh dalam membangun tradisi literasinya,”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Gerakan Literasi Nasional dilaksanakan antara lain dengan program penyediaan buku bermutu bagi peserta didik. Program ini mendukung gerakan membaca lima belas menit sebelum belajar di sekolah. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra berikhtiar menyusun bahan bacaan literasi yang sesuai dengan konteks sosiokultural anak-anak Indonesia.

Membaca untuk
Kesenangan dapat
Dilakukan Di Mana Saja





Titik Awal (*Baseline*)

 **1** Dari **1.000**

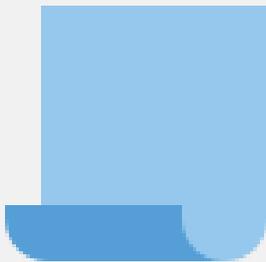
hanya satu dari 1.000 orang masyarakat Indonesia yang membaca terkait kebiasaan membaca masyarakat Indonesia



Inovasi



Pada 2019, mekanisme penyediaan buku bacaan dilakukan dengan seleksi penulis dan mengadakan riset di kelas usia dini dan kelas awal, agar penulis dapat memahami psikologi anak pada jenjang dini dan awal tersebut yang sedianya menjadi tolok ukur keberhasilan literasi baca- tulis.



Kegiatan pengalihwahan media baca, dari berbasis kertas ke bentuk digital. Buku-buku tidak hanya tersedia dalam bentuk cetak, tetapi juga dalam bentuk pdf yang dapat diunduh di laman Badan Bahasa dan Perbukuan. Saat ini bahan bacaan juga sedang dikembangkan dalam bentuk aplikasi Android.



Capaian Program

Capaian Program Penyediaan Bahan Bacaan Literasi dimulai Sejak Tahun 2016

Tersedianya 170 buku bacaan yang bertema sanitasi dan kesehatan lingkungan, arsitektur tradisional, bahasa dan sastra, lanskap perubahan perdesaan dan perkotaan, aktivitas ekonomi kreatif, diversifikasi pangan dan tradisi kuliner, toleransi dan kebinekaan, kebencanaan, kesenian, kecakapan hidup, antikorupsi, dan kemaritiman untuk jenjang kelas awal/PAUD.

2016

2017

Tersedianya 189 buku bacaan yang bertema anak Indonesia, kuliner, arsitektur, transportasi, lanskap perubahan perdesaan dan perkotaan, bahasa, dan tokoh Indonesia untuk jenjang SD kelas 4–6, SMP, dan SMA.

Tersedianya 137 buku bacaan yang bertema cerita rakyat, kuliner, arsitektur, transportasi, lanskap perubahan perdesaan dan perkotaan, bahasa, dan tokoh Indonesia untuk jenjang SD kelas 4–6, SMP, dan SMA.

2018

2019

Tersedianya 165 buku bacaan yang bertema cerita rakyat (folklore) dari seluruh Indonesia untuk jenjang SD kelas 4–6, SMP, dan SMA.

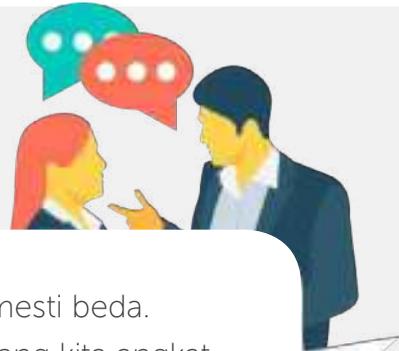


Dampak

1. Literasi memperkuat kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengakses kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan politik.
2. Literasi memiliki arti tidak hanya sekadar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga melek ilmu pengetahuan dan teknologi, keuangan, budaya dan kewargaan, berpikiran kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar.



Testimoni



"Khusus untuk mengikuti seleksi GLN, ya naskah mesti beda. Artinya ada kekhasan dari tulisan kita. Konten cerita yang kita angkat harus unik dan sebisa mungkin memuat unsur semangat literasi. Rancangan naskah saya yang diterima (Belajar Bisa di Mana Saja) bercerita tentang anak-anak jalanan yang membuat sekolah pohon di pantai Tanah Beru, Bulukumba",

(Andi Makkaraja, penulis asal Sulawesi Selatan)



Rekomendasi



1. Literasi memperkuat kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk mengakses kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan politik.
2. Literasi memiliki arti tidak hanya sekadar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga melek ilmu pengetahuan dan teknologi, keuangan, budaya dan kewargaan, berpikiran kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar.

Gerakan Literasi Sekolah

"Membaca buku, saya kira ini sebuah kegiatan yang memang di tempat manapun yang terpencil, di desa, di kampung-kampung, sangat diperlukan sekali oleh anak-anak."

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Berbagai studi membuktikan bahwa kecakapan dan kebiasaan membaca merupakan fondasi keterampilan abad ke-21. Karena itu, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) diluncurkan sejak 2015 sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. GLS mencakup berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut.

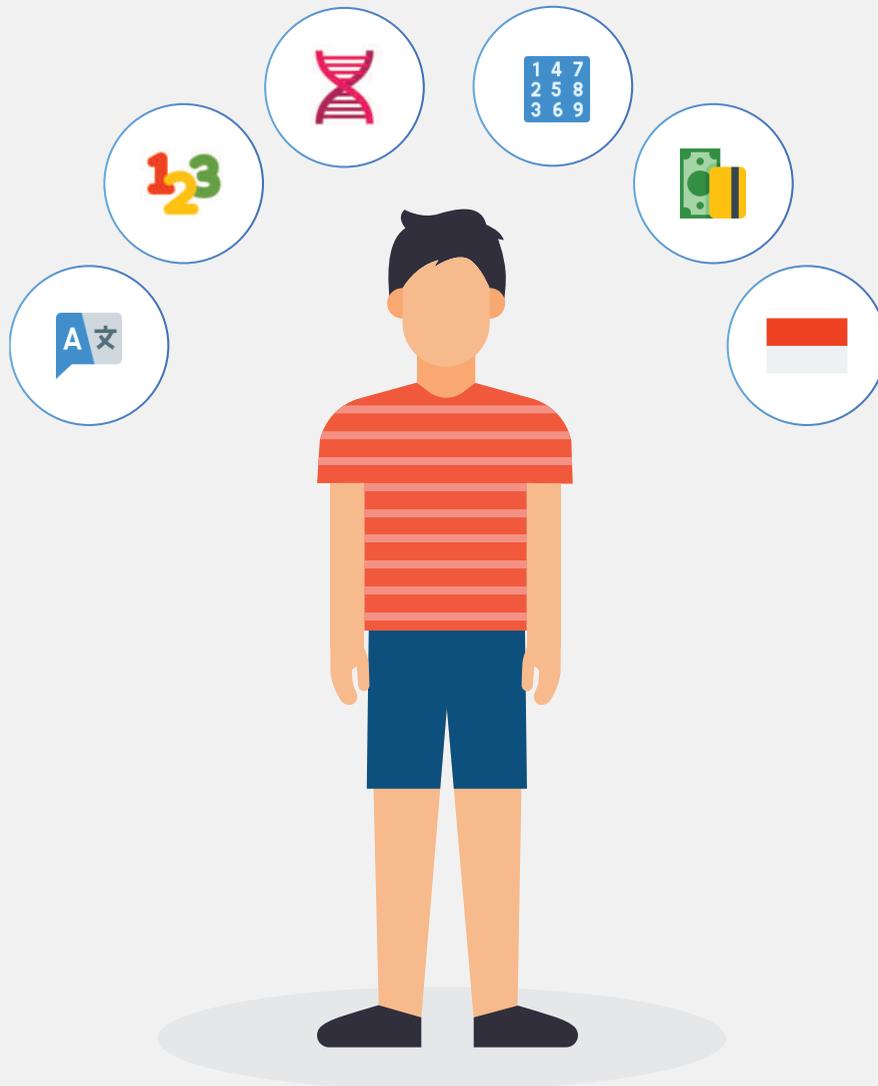
- Membaca 15 menit sebelum pembelajaran di semua satuan pendidikan.
- Peningkatan kualitas buku-buku nonteks pelajaran sebagai materi kegiatan membaca 15 menit.
- Lomba-lomba literasi yang diadakan secara rutin.
- Sosialisasi program membaca untuk kesenangan, menulis untuk kesenangan, pengembangan enam literasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan mengkampanyekan variasi kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran, serta pembiasaan kegiatan literasi di rumah dan di masyarakat.

Pengembangan Literasi Siswa
dengan Kegiatan Kunjungan ke
Museum





Titik Awal (*Baseline*)



Belum adanya program sistematis tentang upaya menumbuhkembangkan budaya literasi khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan enam literasi dasar, mulai dari **Literasi Bahasa, Literasi Numerasi, Literasi Sains, Literasi Digital, Literasi Finansial, serta Literasi Budaya dan Kewargaan.**



Capaian Program

CAPAIAN 2015-2019

2015

- Peluncuran GLS
- Penulisan Desain Induk GLS
- Penulisan Panduan-panduan GLS

2016

- Sosialisasi GLS kepada 547 Kadisdik provinsi dan kota
- Integrasi GLS dalam bimtek Kurikulum 2013

2017

Promosi GLS dalam bentuk videografis, infografis, sarasehan literasi sekolah, festival literasi sekolah dan penulisan buku praktik baik GLS

2018

- Penulisan dan peluncuran 12 manual GLS
- Monev ke 50 sekolah Peluncuran SE Dirjen Dikdasmen tentang pembentuk-kan satgas literasi daerah

2019

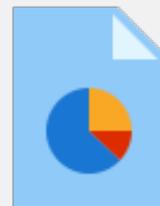
- Mengadvokasi pemda untuk membentuk satgas/pokja literasi daerah
- Perumusan juknis dan modul pendampingan literasi
- Monev GLS ke 60 sekolah



Inovasi



Pelaksanaan kegiatan GLS **melalui daring untuk** meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pengawasan



Identifikasi indikator literasi pada instrumen penjaminan mutu sekolah. Identifikasi bertujuan memperoleh rapor mutu literasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan GLS di sekolah.



Dampak



Dalam 4 tahun pelaksanaan, GLS merespons permasalahan rendahnya kecakapan siswa Indonesia dalam literasi baca-tulis, sains, dan numerasi yang diukur dalam tes *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang diselenggarakan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*). Melalui Program Literasi Sekolah diharapkan peringkat PISA Indonesia akan terus meningkat.



Testimoni



"Nilai USBN Bahasa Indonesia siswa sebelum pelaksanaan GLS rata-rata 6,1 dan setelah pelaksanaan GLS meningkat menjadi 7,8,"

(Darmawati, Kepala SDN 037 Tarakan, Kalimantan Utara)

"Melalui literasi, kami belajar melalui kolaborasi, kreativitas, berpikir kritis dan kemampuan berkomunikasi. Saat ini, semakin banyak siswa membawa buku bacaan selain buku pelajaran untuk dibaca pada waktu luang,"

(Sugiharti, guru SMK 3 Bandung, Jawa Barat)



Rekomendasi

Permasalahan



Pendampingan pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah belum dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh.



Komunikasi dengan lembaga donor yang melakukan pendampingan literasi belum terjalin intensif.

Rekomendasi



Kemendikbud perlu melakukan komunikasi lebih intensif dengan pemangku kepentingan di daerah untuk mewadahi forum komunikasi dan berbagi inspirasi antarpegiat dan warga sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan literasi.



Perlu memanfaatkan kemitraan lembaga donor dengan pemerintah daerah untuk membentuk satgas atau pokja literasi di daerah yang bekerja sama dengan LPMP dan Balai serta Kantor Bahasa di tiap provinsi.



Kemendikbud lebih proaktif memfasilitasi forum diskusi yang menyatukan beberapa lembaga pemerintahan untuk membahas permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah, misalnya kompetensi pustakawan sekolah dan alokasi dana BOS untuk buku nonteks pelajaran.

Gerakan Literasi Masyarakat

"Ini sebuah gerakan yang menurut saya sangat bagus sekali. Tidak disentuh oleh pemerintah, tetapi mereka bergerak sendiri."

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

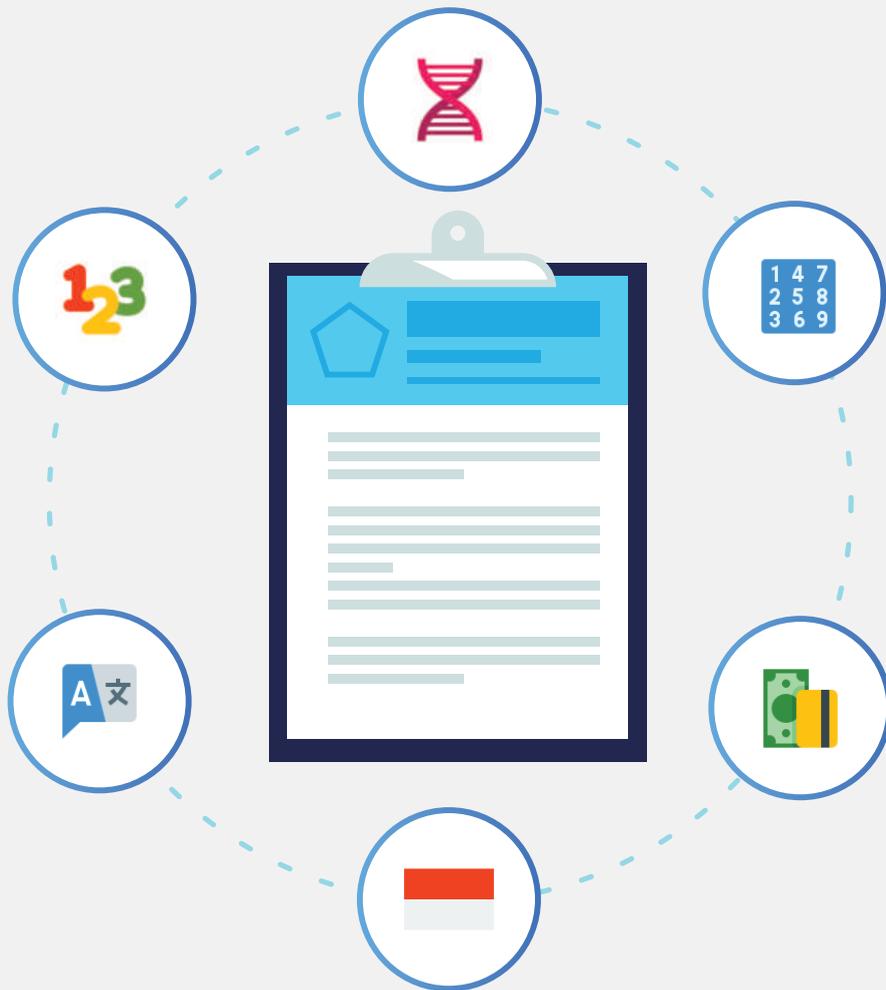
Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) sebuah gerakan untuk meningkatkan kesadaran literasi. GLM bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang literat, yaitu masyarakat yang memahami literasi secara utuh sehingga ia menjadi pembelajar sepanjang hayat memiliki kesadaran untuk terus belajar demi menguasai kecakapan hidup yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Mereka inilah yang dapat disebut sebagai generasi terdidik dan tercerahkan. Generasi unggul yang akan menjadi pemegang kunci kemajuan bangsa menuju Indonesia unggul.



Kegiatan Literasi di Masyarakat



Titik Awal (*Baseline*)



Belum ada **kebijakan yang masif** dalam upaya meningkatkan kesadaran literasi masyarakat.



Capaian Program

Capaian Program 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019	
Gerakan Indonesia Membaca	6	31	18	10	13	Kab/Kota
Kampung Literasi	-	31	42	10	21	Lembaga
Penguatan TBM	170	80	40	100	200	Lembaga
Sarana TBM berbasis IT	-	-	-	80	80	Lembaga
Residensi penggiat literasi	-	-	60	180	180	Orang

Total	Gerakan Indonesia Membaca	Kampung Literasi	Penguatan TBM	Sarana TBM berbasis IT	Residensi penggiat literasi
	78 Kab/Kota	104 Lembaga	590 Lembaga	80 Lembaga	420 Orang



Inovasi



Direktorat Bindiktara berkolaborasi dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), komunitas baca, pegiat literasi, serta pemerintah daerah melalui Gerakan Literasi Masyarakat ini menjalankan beberapa program inovasi, antara lain sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Gerakan Indonesia Membaca.
2. Pembentukan Kampung Literasi.
3. Perintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di daerah 3T.
4. Pendirian TBM di ruang publik.
5. Melakukan penguatan lembaga TBM dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana.
6. Penguatan kapasitas pengelola TBM melalui kegiatan Residensi Penggiat Literasi dan Workshop Penguatan TBM dan Kampung Literasi.
7. Penyediaan aplikasi donasi buku daring melalui laman: donasi buku.kemdikbud.go.id.

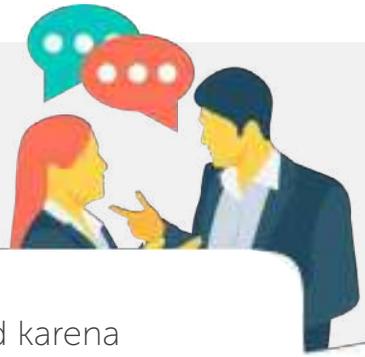


Dampak



Kegiatan literasi di masyarakat semakin berdenyut dan berkesinambungan dengan terlibatnya berbagai pegiat literasi. GLM menjadi tempat lahir dan tumbuhnya simpul-simpul masyarakat yang literat di setiap daerah.

Testimoni



"Saya ucapkan terimakasih kepada Kemendikbud karena sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan program Kampung Literasi. Kami merasa diberikan pengalaman dan wawasan baru untuk mengelola satu desa untuk dijadikan sebuah kawasan bernafaskan literasi,"

(Eldi Andiwinata Ketua PKBM Aykosh Nusa Ilmu Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat)

"Pengelola TBM dapat mengembangkan lembaganya melalui konsep literasi finansial. Harapannya TBM memiliki usaha ekonomi yang dapat menghidupi lembaga dan dapat mensejahterakan masyarakat sekitarnya,"

(Triyanto, Ketua TBM Teras Baca Guyub Rukun, Bantul, Yogyakarta)



Rekomendasi

Permasalahan



Literasi masih dipahami (hanya) sebagai baca tulis.



Komitmen pemerintah daerah pada program literasi masih minim.



Belum ada kajian yang komprehensif untuk mengukur keberhasilan program GLM.



Kolaborasi Dinas dengan para pemangku kepentingan dan pegiat literasi belum optimal.

Rekomendasi



Peningkatan keterlibatan pemerintah di tingkat pusat dan daerah melalui kolaborasi dengan para pegiat. Selain itu, juga dibutuhkan adanya kesadaran setiap individu untuk terus menghadirkan sarana dan media baca untuk dapat meningkatkan minat baca.



Penyusunan kajian untuk mengukur keberhasilan GLM.



Perlu kebijakan nasional yang dikeluarkan Kepala Negara untuk mendorong komitmen para kepala daerah (gubernur/walikota/bupati) agar dapat melahirkan kebijakan (Perda/Pergub/Perwal) yang mendorong berkembangnya gerakan literasi daerahnya

Pelibatan Keluarga dalam Pendidikan

“Melalui keluarga, kita membentuk dasar-dasar karakter manusia terutama karakter dan kepribadian anak-anak kita, generasi penerus bangsa, penerima estafet kepemimpinan bangsa.”

(Joko Widodo, Presiden Indonesia)

Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak dalam menumbuhkembangkan karakter dan budaya berprestasi anak. Pendidikan keluarga merupakan upaya dalam membangun sinergitas antara orangtua, sekolah dan masyarakat (Tri Sentra Pendidikan) guna memberikan pemahaman, kesadaran dan keterampilan untuk mewujudkan ekosistem pendidikan sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Sasaran utama Pendidikan Keluarga adalah orangtua yang memiliki anak pada usia 1000 Hari Pertama Kehidupan hingga anak remaja.

Tujuan Pendidikan Keluarga adalah melibatkan orangtua pada penyelenggaraan pendidikan melalui satuan pendidikan sebagai tempat berkumpulnya orangtua untuk melaksanakan program seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.



Keterlibatan Orang Tua
dalam Hari Pertama
Sekolah



Titik Awal (Baseline)



Belum ada unit kerja yang secara khusus menangani Pendidikan Keluarga



Capaian Program

2015

2016

2017

2018

2019

PROV

34 PROVINSI

KAB/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019
JUMLAH SATDIK (Lembaga)	122.023	189.190	237.976	281.836	351.854
POKJA DIKKEL			34 Prov dan 160 Kab/kota	34 Prov dan 240 Kab/kota	34 Prov dan 310 Kab/kota
PTPPO			30 Lokus	50 kab/kota	70 kab/kota
1000 HPK			8 kab/kota (1756 lembaga)	100 kab/kota (22.471 Lembaga)	160 kab/kota (33.691 Lembaga)
HIV/AIDS				10 lbg	30 lbg
KONTEN ARTIKEL/ BERITA DI LAMAN DAN MEDSOS SAHABAT KELUARGA	50	1073	2694	4375	5522
SUMBER BACAAN DLM Mendukung Penguatan Karakter	10	35	55	86	117

Capaian Perluasan dan Pembinaan Akses Layanan Program



380
KAB/KOTA

Pendampingan
Layanan Pendidikan
Keluarga



160
KAB/KOTA

Pendampingan
Program
Pengasuhan 1000
HPK



60
KAB/KOTA

Pendampingan
Program PTPPO



310
KAB/KOTA

Pokja Pendidikan
Keluarga



100
KAB/KOTA

Pokja Pengasuhan
1000 HPK

Data Capaian Sasaran Pendidikan Keluarga



14.991.761
ORANG

Orang Tua



351.854
LEMBAGA

Satuan Pendidikan dan Lembaga/
Organisasi Masyarakat



1.620
ORANG

Fasilitator Pendidikan Keluarga
Tingkat Kab/kota

Data Capaian Sumber Belajar/Konten Program Pendidikan Keluarga



117
NASKAH

Buku



152
VIDEO



5.522
KONTEN

Artikel/Berita di laman
sahabatkeluarga.go.id dan medsos
(Twitter, Facebook, Youtube,
Instagram)



Inovasi

Guna memberikan layanan pendidikan keluarga yang optimal, berbagai upaya inovasi terus dikembangkan, antara lain:



Pengembangan sumber bahan edukasi bagi orangtua berbasis dalam jaringan



Perluasan akses pegiat pendidikan keluarga dengan mengembangkan program Bimbingan Calon Fasilitator Pendidikan Keluarga Dalam Jaringan

Menjalin kerjasama dan melibatkan berbagai mitra pemerintah maupun masyarakat, seperti



1. Kemendes, Kemenkes, Kemenag, KPPI, BNN dan K/L lainnya
2. UNICEF dan World Bank
3. IPB dan UNJ
4. Lembaga atau mitra yang bergerak di bidang parenting: Keluarga Kita, *Mindfull Parenting*, *School of Human*, Yayasan Bhakti Asdira, *Resourceful Parenting Indonesia*, Yayasan Kita

dan Buah Hati, *Happy Holly Kids*, *Family Discovery*, Kerlip, Fatayat NU, Aisyah, Sejiwa, Himpaudi, IGTKI, Dharma Wanita, Komunitas Rumah Pencerah, Ikitan neurosains Terapan Indonesia, SATU Consulting, *Essa Consulting* dan Pegiat Literasi Keluarga.

5. Media cetak dan elektronik



Dampak



Meningkatkan perilaku positif anak



Meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak



Meningkatkan dukungan orang tua pada sekolah



Mendukung iklim sekolah yang lebih baik



Mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan



Testimoni



"Gernas Baku (gerakan nasional baca buku) membuat saya makin akrab dengan anak. Kegiatan ini sangat positif dan dapat meningkatkan minat baca anak,"

(Hadi Listiana, orangtua peserta didik TK Universal Ananda, Kendal, Jawa Tengah)

"Acaranya seru, meski Gernas Baku merupakan acara yang simbolik, tapi penting. Realitasnya adalah kehidupan sehari-hari orang tua dan guru untuk rutin membacakan buku atau membiasakan baca pada anak,"

(Ragil, orangtua peserta didik di BAI PAUD Rumah Cendekia, Bogor, Jawa Barat)

"Program Gernas Baku telah menyadarkan kami akan pentingnya berinteraksi dengan anak. Dengan membacakan buku saya menjadi tahu akan kemampuan anak saya dan juga saya merasa dekat anak,"

(Syahril, orang tua murid di PAUD Alam Saibas, Aceh Besar)



Rekomendasi



Himbauan kepada Pemerintah Daerah mengeluarkan regulasi tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan untuk memperkuat implementasi Pendidikan Keluarga.



Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan sinergitas dengan komunitas masyarakat dalam meningkatkan akses layanan pendidikan keluarga.



Pengembangan bahan edukasi orang tua berbasis dalam jaringan untuk mempermudah akses informasi pendidikan keluarga.

Penilaian Pendidikan

“Ujian Nasional penting karena sebagai salah satu cara mengukur mutu pendidikan nasional.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Ujian Nasional dilaksanakan untuk mengukur kompetensi siswa dan menjadi salah satu dasar untuk seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu UN juga digunakan untuk melakukan pemetaan capaian pendidikan secara nasional.

Sejak tahun 2015, selain mengukur pencapaian akademik, UN juga digunakan untuk mengetahui tingkat kejujuran ujian dengan hasil IIUN (Indeks Integritas Ujian Nasional) untuk setiap sekolah. Kemendikbud juga telah mengeluarkan Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pelaksanaan UN dilakukan melalui UNBK.



*Prestasi Penting,
Jujur yang Utama*

Pelaksanaan Ujian
Nasional Berbasis
Komputer





Titik Awal (Baseline)

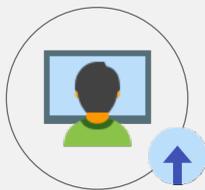


Penyelenggaraan UNBK pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014 secara online dan terbatas di SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur (SIKL)

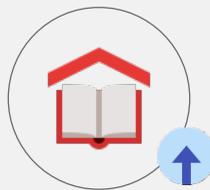
Hasil penyelenggaraan UNBK pada kedua sekolah tersebut cukup menggembirakan dan semakin mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan mendorong pelaksanaan UNBK di sekolah-sekolah lainnya.



Capaian Program



Jumlah peserta Ujian Nasional dari tahun ke tahun terus meningkat

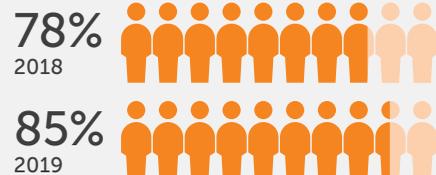
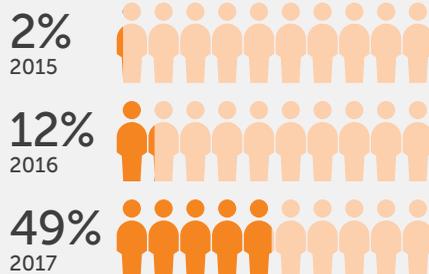


Jumlah sekolah yang mengadakan UNBK juga semakin meningkat.



Peningkatan paling masif terjadi pada pelaksanaan UN 2017. Terjadi peningkatan 37% dari tahun 2016 atau total sekitar 49% peserta UNBK

GRAFIK JUMLAH PESERTA UNBK



Milestone Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)



Program Penilaian untuk mengukur Kompetensi Siswa dalam berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah matematika, pemahaman pembaca, serta sains.

AKSI dikembangkan sebagai penilaian progresif yang memotret perkembangan kompetensi siswa dari Kelas 2, 4, 6, 8, dan 10.



AKSI Survei dilaksanakan secara terpusat untuk mendapatkan peta capaian kompetensi, sedangkan AKSI Sekolah dilakukan mandiri oleh guru sebagai pengayaan penilaian formatif dan self-diagnosis terhadap standar kompetensi nasional.

Pengembangan soal AKSI berbasis teknologi sehingga memuat simulasi percobaan, hyperlink, animasi, serta pembangkit data dalam konteks dunia nyata.



Dampak



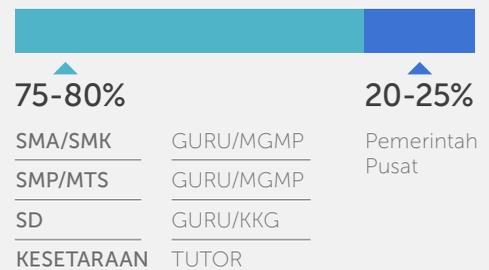
- Peningkatkan integritas siswa dan sekolah dalam pelaksanaan Ujian Nasional sehingga hasil UN lebih objektif dan lebih dipercaya.
- Pengumpulan dan penilaian jauh lebih efektif dan efisien
- Pengumuman hasil Ujian Nasional jauh lebih cepat.
- Terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan Ujian Nasional.

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Perkembangan



Penyiapan Soal



Capaian

1. Peningkatan kualitas soal ujian sekolah.
2. Peningkatan kompetensi guru dalam penilaian secara umum dan penulisan soal pada khususnya.
3. Pemberdayaan dan pengaktifan asosiasi profesi.

Upaya Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas ujian sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Karakteristik USBN adalah kisi-kisi ujian dan 20–25% soal disiapkan Pusat. USBN menggunakan soal pilihan ganda dan uraian, serta melibatkan KKG/MGMP/Forum Tutor/Pokja PPS dalam penyiapan naskah ujian.



Testimoni



"Lebih enak memakai komputer karena lebih cepat dan tidak capai juga."
(Dwi Sulistyawan, siswi kelas 9B, SMPN 1 Kalasan, Sleman, Yogyakarta)

"Kalau berbasis kertas 'kan membulatkan itu juga harus hati-hati, kalau pakai ini cukup klik."
(Jihan Fadhilah, siswi di SMAN 88 Jakarta)



Rekomendasi



UNBK terbukti bermanfaat. Oleh karena itu, program ini layak dilanjutkan sebagai kebijakan selanjutnya.



Komputer untuk pelaksanaan UNBK di sekolah dapat dipergunakan untuk pembelajaran sehari-hari.



Pemerintah menargetkan pada tahun 2020, peserta UNBK mendekati angka 100% sehingga pelaksanaan UN semakin berintegritas.

Mengembangkan SDM Unggul Melalui Akreditasi PAUD dan PNF

“Program perencanaan dan pengembangan pada setiap satuan pendidikan hendaknya disesuaikan dengan hasil akreditasi. Untuk itu, hasil akreditasi betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk diperbaiki atau ditingkatkan oleh satuan pendidikan. Mari kita gunakan data akreditasi ini menjadi dasar perumusan kebijakan untuk kita sampaikan kepada para pemangku kepentingan.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Sispena memang belum sesohor Dapodik. Sispena, kependekan dari Sistem Penilaian Akreditasi, setidaknya sudah dikenal di kalangan yang berurusan dengan akreditasi satuan pendidikan. Sispena adalah piranti daring (online) yang merupakan basis data penilaian akreditasi yang terpadu dengan Dapodik, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi akreditasi lembaga pendidikan yang cepat, akurat, dan mudah diakses para pemangku kepentingan.

Penggunaan Sispena dirintis Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) pada tahun 2017. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) pun turut menerapkannya pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Sispena yang digunakan sudah dikembangkan menjadi versi 2.0.

Satuan Pendidikan Jenjang PAUD





Titik Awal (Baseline)



2014



A



B



C

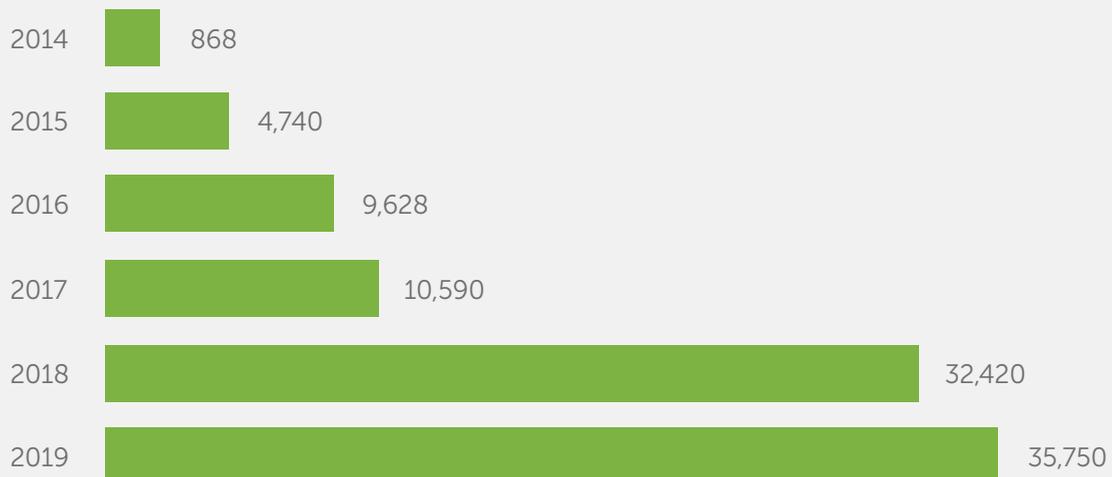


Pada tahun 2014, akreditasi PAUD dan PNF hanya mendata satuan pendidikan yang terakreditasi dan tidak terakreditasi. Belum ada klasifikasi akreditasi A, akreditasi B, dan akreditasi C. Berdasarkan data capaian akreditasi, pada tahun 2014 Satuan PAUD dan PND yang terakreditasi dan tidak terakreditasi berjumlah 868 satuan pendidikan.

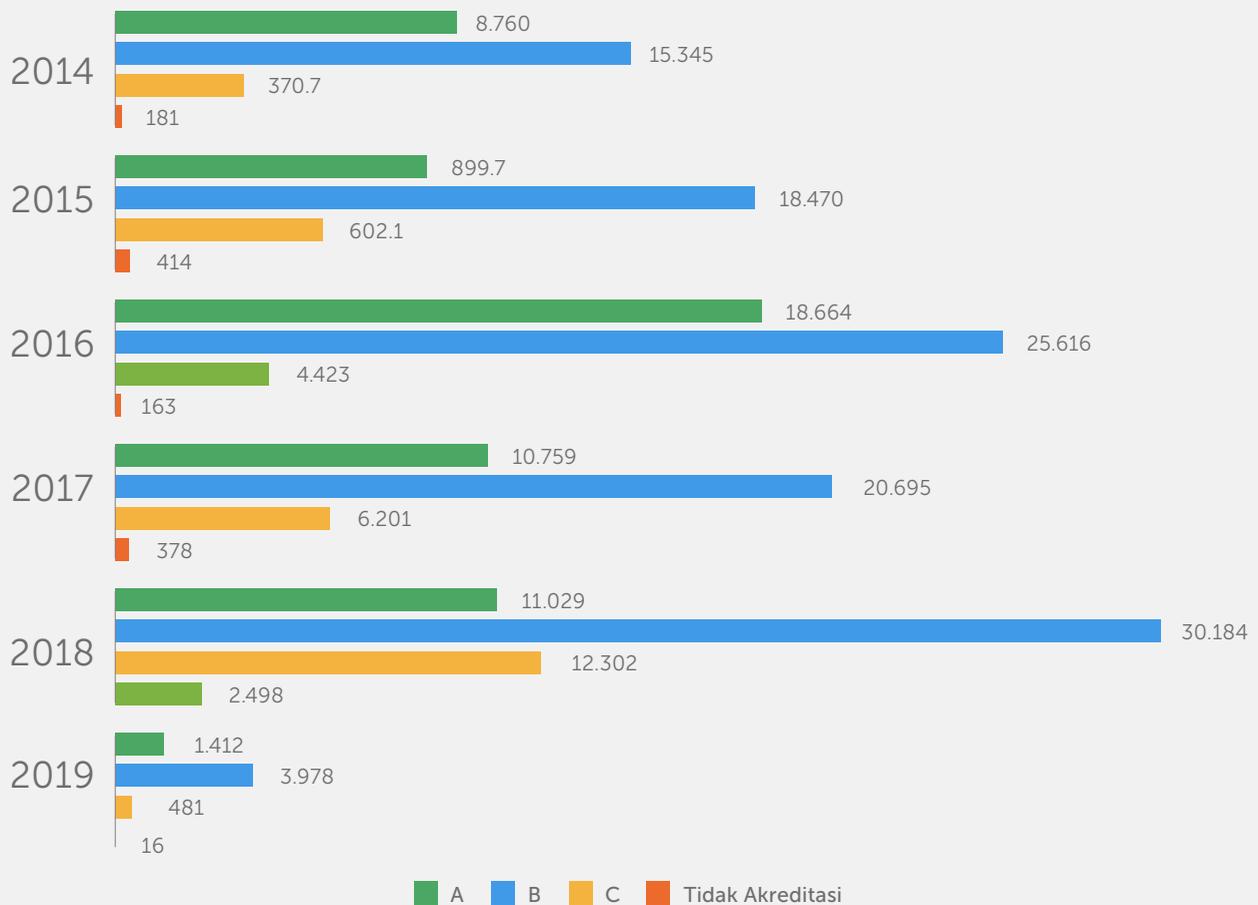


Capaian Program

Grafik Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2014-2019



Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2014-2019 (Per 31 Juli 2019)



Inovasi



BAN PAUD dan PNF Provinsi harus melaksanakan proses akreditasi terhadap seluruh program yang ada di satuan yang mengajukan akreditasi dalam aplikasi Sispena.



Mengintegrasikan Dapodik dengan Sistem Akreditasi.



Kerja sama dengan PP/BP PAUD Dikmas/Dinas Pendidikan, organisasi mitra, dan Kemenag.



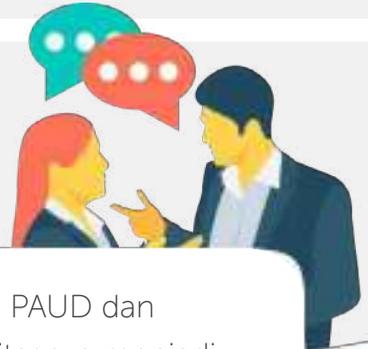
Dampak



Penggunaan Sispena meningkatkan kinerja BAN PAUD dan PNF. Jumlah satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi meningkat lebih banyak yang didorong oleh semakin banyaknya satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi peningkatan mutu PAUD dan PNS.



Testimoni



"Kami harap dengan adanya akreditasi online, semua PAUD dan PNF bisa melakukan akreditasi sehingga standar kualitasnya menjadi lebih baik. Dengan adanya akreditasi, diharapkan pendidikan paling dasar ini bisa menjadi lebih berkualitas, baik dari sisi sumber daya manusia maupun guru dan juga sarana dan prasarana."

(Muhtar Gojali, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon)



Rekomendasi



Komitmen tinggi dari pemerintah daerah untuk turut menyiapkan satuan pendidikan untuk siap diakreditasi secara berkesinambungan dan terus-menerus. Hasil akreditasi ini merupakan acuan bagi pemerintah yang juga bertindak sebagai pembina untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan. Harapannya, keberhasilan akreditasi akan diikuti dengan peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Pengembangan Kurikulum 2013

“Biasa mandiri, percaya diri, gotong royong, dan saling peduli harus kuat ditanamkan dalam pendidikan dasar kita. Mencari sumber belajar sendiri, berpikir kritis, dan tidak mudah terhasut, problem solving, harus sudah tertanam kuat pada pendidikan menengah kita,”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Dari tahun 2015 Pusat Kurikulum dan Pembelajaran telah melaksanakan berbagai program, yaitu (1) pengembangan dan/atau penyempurnaan kurikulum; (2) pengembangan, penyusunan, atau penyempurnaan perangkat kurikulum; (3) pengembangan model kurikulum operasional dan bahan pembelajaran satuan pendidikan yang memiliki karakteristik khusus; dan (4) pengembangan diversifikasi dari kurikulum nasional berdasarkan kebutuhan, potensi, prospek dan keunggulan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan seni budaya pada tiap daerah.

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan di
Laboratorium





Titik Awal (Baseline)



2006



2013

Kurikulum 2013 diterapkan untuk menggantikan Kurikulum 2006 yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa implementasi di tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah percontohan/rintisan. Di tahun 2013 tersebut, Kurikulum 2013 diterapkan secara bertahap, yaitu pada Kelas I, IV, VII X dan XI. Pada tahun 2016, Kurikulum 2013 mengalami perbaikan pada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian.



Capaian Program



Program



Kegiatan

2014

Implementasi ide, desain, dan dokumen kurikulum.

Implementasi Kurikulum 2013 secara bertahap pada sekolah-sekolah rintisan (6%).

2015

Penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

- Monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013.
- Penjaringan masukan publik terhadap Kurikulum 2013.
- Implementasi Kurikulum 2013 secara bertahap pada sekolah-sekolah rintisan (6%)

2016

Penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

- Perbaikan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013.
- Perbaikan Sistem Pembelajaran.
- Perbaikan Sistem Penilaian.
- Implementasi secara bertahap Kurikulum 2013 dari hasil perbaikan (6%).



Program



Kegiatan

2017

Pengembangan perangkat-perangkat kurikulum.

- Penyusunan Model Silabus (62 dokumen).
- Penyusunan Model Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (62 dokumen).
- Penyusunan Naskah Muatan Mata Pelajaran (58 dokumen).
- Penyusunan Naskah Akademik Kurikulum Berdiversifikasi (1 dokumen).
- Pelaksanaan secara bertahap Kurikulum 2013 hasil perbaikan (60%).

2018

Pengembangan model kurikulum operasional dan bahan pembelajaran satuan pendidikan yang memiliki karakteristik khusus yang disesuaikan dengan kapasitas, konteks, kebutuhan, potensi, budaya, tingkat sosial ekonomi, kondisi geografis, demografis, dan etnografis daerah, serta karakteristik tertentu lainnya dari peserta didik, satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat setempat.

- Pelaksanaan secara bertahap Kurikulum 2013 hasil perbaikan (100%).
- Pengembangan model-model pembelajaran sesuai konteks daerah dengan berbagai muatan (kurikulum berdiversifikasi) (40 umum, 46 vokasi).
- Penyusunan naskah akademik dan panduan-panduan implementasi kurikulum sesuai konteks daerah dengan berbagai muatan (kurikulum berdiversifikasi) (8 naskah)
- Pelaksanaan model rintisan implementasi kurikulum dan pembelajaran dengan berbagai muatan (kurikulum berdiversifikasi) (80 satuan pendidikan)

2019

Pengembangan model kurikulum operasional dan bahan pembelajaran satuan pendidikan yang memiliki karakteristik khusus yang disesuaikan dengan kapasitas, konteks, kebutuhan, potensi, budaya, tingkat sosial, ekonomi, kondisi geografis, demografis, dan etnografis daerah, serta karakteristik tertentu lainnya dari peserta didik, satuan pendidikan orang tua, dan masyarakat

- Pelaksanaan secara bertahap Kurikulum 2013 hasil perbaikan (100%).
- Penyempurnaan dan penambahan model-model pembelajaran sesuai konteks daerah dengan berbagai muatan (kurikulum berdiversifikasi) (50 umum, 48 vokasi).
- Penyempurnaan dan penambahan panduan-panduan implementasi kurikulum sesuai konteks daerah dengan berbagai muatan (kurikulum berdiversifikasi) (10 naskah)
- Pelaksanaan model rintisan implementasi kurikulum dan pembelajaran dengan tambahan jenis muatan (kurikulum berdiversifikasi) (10 muatan).
- Kajian konsep kurikulum masa depan (31 naskah).



Inovasi



Perubahan mendasar Kurikulum 2013 melalui perbaikan tahun 2016 adalah memperbaiki kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD), pembelajaran, dan penilaian.



Penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 melalui kurikulum berdiversifikasi yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.



Dampak



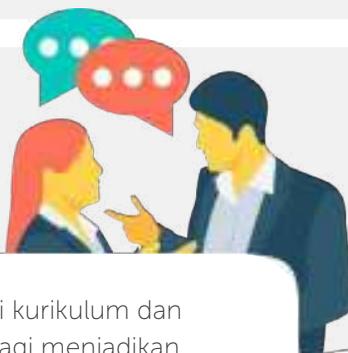
Penguatan budaya sekolah dengan pengintegrasian kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler, peran BK, dan pembenahan manajemen sekolah, terutama pemanfaatan fasilitas sekolah



Tersusunnya kurikulum operasional dan bahan pembelajaran satuan pendidikan sesuai dengan konteks daerah (Kurikulum berdiversifikasi)



Testimoni

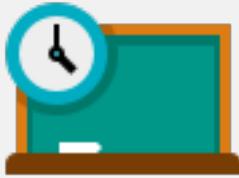


"Dengan adanya program sekolah model rintisan implementasi kurikulum dan pembelajaran muatan kemaritiman, SDN 02 Pulau Kelapa 02 Pagi menjadikan sekolah kami memiliki karakteristik yang sesuai dengan letak geografis sekolah kami, yakni Kepulauan Seribu. Muatan kemaritiman kami integrasikan dalam konteks pembelajaran sehingga menciptakan pembelajaran yang bernuansa yang dekat dengan peserta didik dan menyenangkan bagi siswa."

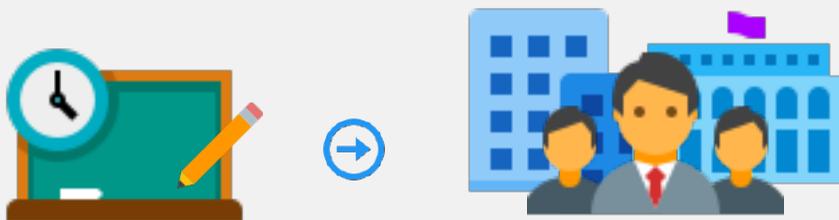
(Rustini, Kepala SDN Pulau Kelapa 02 Pagi, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta)



Rekomendasi



Pengembangan Kurikulum 2013 layak terus dilakukan agar selalu sesuai dengan tuntutan zaman.



Kurikulum 2013 merupakan bagian penting pembangunan sehingga perbaikan kurikulum merupakan bagian dari pembangunan modal manusia Indonesia.



Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengubah lulusan sehingga kelak menjadi masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Rumah Belajar Belajar dengan Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja

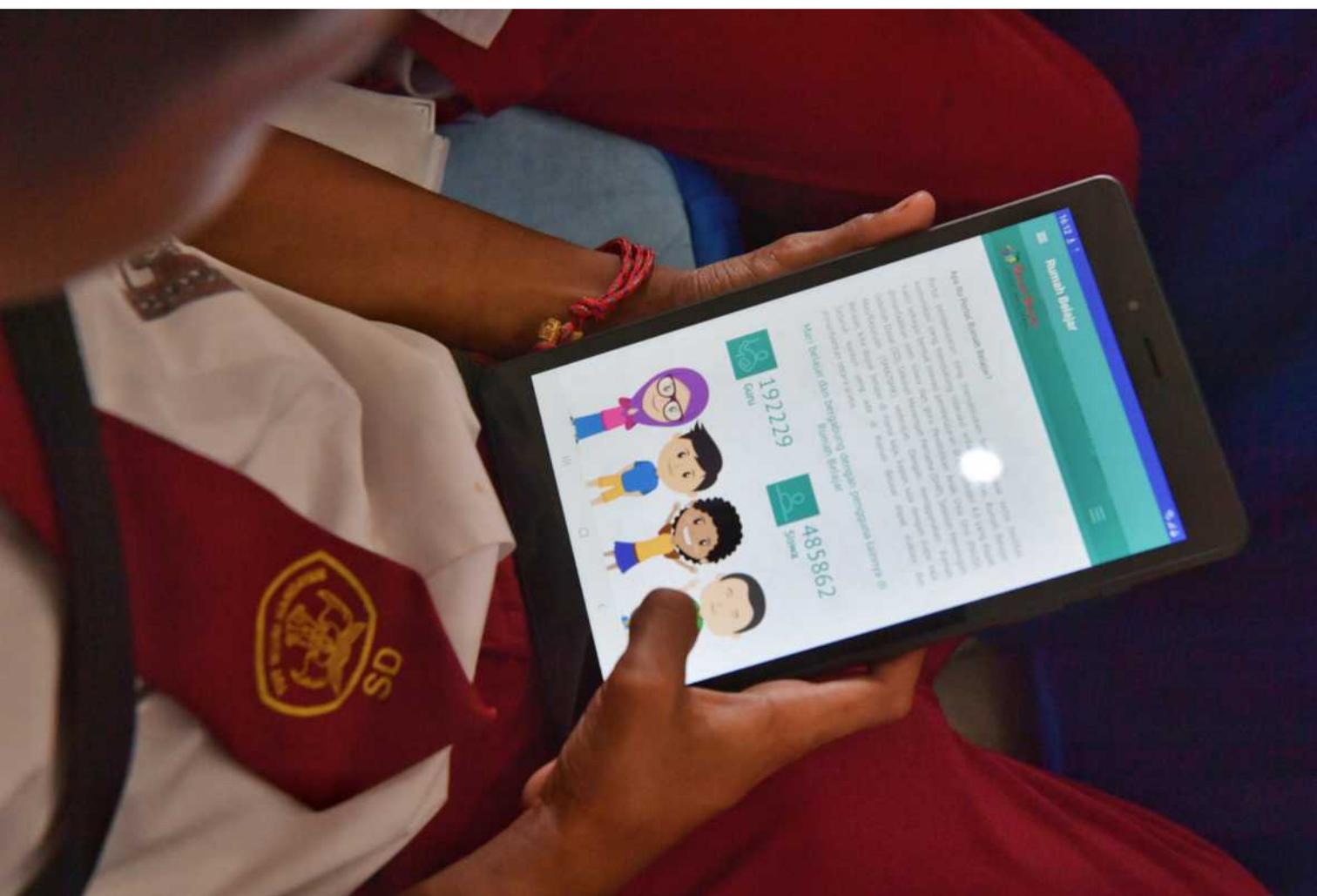
“Seperti kita ketahui, banyak sekolah di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) sulit dijangkau secara langsung karena kondisi geografisnya. Dengan ketersediaan aplikasi pembelajaran berbasis internet seperti Rumah Belajar, insya Allah mereka lebih cepat dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana diperoleh oleh saudara-saudaranya yang bermukim di daerah perkotaan.”

(Muhajir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Belakangan ini di dunia medsos, khususnya Facebook dan Instagram, semakin banyak guru yang mengunggah aktivitas pembelajaran menggunakan Rumah Belajar. Yel-yel pun membahana, “Belajar dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.” Ya, itu memang slogan baru Rumah Belajar yang sudah semakin bergaung.

Laman Rumah Belajar (belajar.kemdikbud.go.id) berisi konten bahan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA/ SMK. Ada 8 fitur, yakni Sumber Belajar, Buku Sekolah Elektronik, Bank Soal, Laboratorium Maya, Peta Budaya, Wahana Jelajah Angkasa, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dan Kelas Maya.

Penggunaan Aplikasi Rumah Belajar
oleh Siswa Jenjang SD





Titik Awal (Baseline)



2008-2011



2011-Sekarang

Rumah Belajar merupakan pengembangan portal yang diluncurkan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) pada 15 Juli 2011. Rumah Belajar di era awal rintisan pada tahun 2008-2011, masih menggunakan konten pembelajaran cakram padat. Era portal berbasis web dilengkapi dengan aplikasi yang bisa dibuka dari ponsel pintar.

Sejarah Rumah Belajar

2011



Rumah Belajar diluncurkan pada tanggal 15 Juni 2011



Fitur: RPP, Bahan Belajar Interaktif, Aktifitas Belajar, Bank Soal, dan Katalog Media



Berfokus pada pengembangan RPP Interaktif berbasis TIK yang dibuat oleh guru-guru dari seluruh Indonesia

2012



Tambahan fitur Kelas Maya sebagai sebuah *Learning Management System* (LMS) yang mengintegrasikan RPP Interaktif



Tambahan Fitur Wahana Jelajah Angkasa untuk mengenal luar angkasa lebih dekat



Capaian Program

2018

JUMLAH
PESERTA PEMBATIK

6.809
ORANG

Level 1

2.734
ORANG

Level 2

2019

JUMLAH
PESERTA PEMBATIK

28.624
ORANG

Level 1

13.015
ORANG

Level 2

JUMLAH
PENGGUNA

485.862
SISWA

192.229
GURU

Jumlah Pengguna Terdaftar Rumah Belajar



Sumber: Data Pustekkom Kemendikbud Per 3 September 2019



Inovasi



Program Duta Rumah Belajar dipilih dari seluruh provinsi. Mereka menjadi perpanjangan tangan Pustekkom dalam melakukan pengembangan dan pendayagunaan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran di masing-masing provinsi.



Program Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pembatik) diluncurkan pada tahun 2017. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru di bidang TIK. Pembatik yang dirancang dalam 4 level, sudah menjangkau 6.809 guru (level 1) dan 2.734 guru (level 2) pada tahun 2018. Tahun 2019, jumlahnya semakin meningkat menjadi 28.624 guru (level 1) dan 13.015 guru (level 2).



Dampak



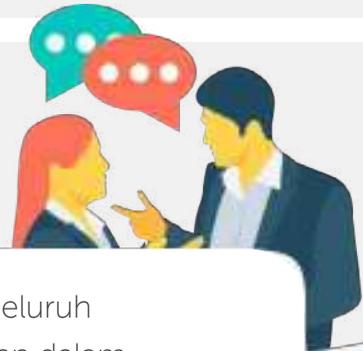
Portal rumah belajar sangat membantu pendidikan di daerah 3T dalam pelaksanaan proses pembelajaran karena materi dalam rumah belajar dapat disimpan dalam alat penyimpanan data sehingga meningkatkan minat belajar peserta didik



Bahan belajar alternatif di luar jam sekolah



Testimoni



“Program PembaTIK sangat bagus untuk guru di seluruh Indonesia. Kami diajari membuat konten pembelajaran dalam bentuk video yang menarik bagi siswa. PembaTIK juga mengenalkan kami pada Rumah Belajar yang kontennya sangat lengkap untuk pembelajaran siswa di era modern.”

(Anik Sulistyorini, S.Pd, Guru SDN Keniten II Kediri, Jawa Timur, Peserta Level III PembaTIK)



Rekomendasi



Bantuan internet untuk guru-guru di daerah khusus yang belum terjangkau sinyal internet agar dapat mengakses Rumah Belajar

Program Digitalisasi Sekolah

Digitalisasi sekolah merupakan terobosan baru di dunia pendidikan, yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek sistem pengajaran. Kelebihan sistem ini adalah mempermudah proses belajar-mengajar karena siswa akan mudah mengakses semua bahan ajar ataupun bahan ujian dalam satu jaringan. Bukan hanya untuk siswa, gurupun memperoleh banyak manfaat dari program digitalisasi sekolah karena menjadi semakin kreatif dan inovatif. Misalnya dalam hal pembuatan materi pembelajaran secara global, guru bisa membuat *e-book* yang berupa kombinasi teks, gambar, dan video.

Digitalisasi sekolah memberikan bantuan sarana pembelajaran TIK untuk sekolah dan tablet untuk siswa tersebut merujuk pada Juknis BOS tentang pemanfaatan BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019, khususnya pada poin penyediaan alat pendukung akses rumah belajar khususnya pada daerah 3T.

Program Digitalisasi Sekolah: Bantuan Sarana
Pembelajaran TIK di Kabupaten Natuna





Capaian Program

- Titik Awal

Program digitalisasi sekolah baru dimulai pada tahun 2019 dan diluncurkan pertama kali di Kabupaten Natuna



- Capaian Program

	Sekolah Dasar	27.398 Sekolah	620.057 Siswa	 Anggaran (dalam ribuan)	1.879.386.000
	Sekolah Menengah Pertama	6.432 Sekolah	524.209 Siswa	 Anggaran (dalam ribuan)	1.197.501.000
	Sekolah Menengah Atas	2.091 Sekolah	329.816 Siswa	 Anggaran (dalam ribuan)	706.906.000
	Sekolah Menengah Kejuruan	1.308 Sekolah	263.828 Siswa	 Anggaran (dalam ribuan)	556.103.000
	Sekolah Luar Biasa	145 Sekolah	3.614 Siswa	 Anggaran (dalam ribuan)	10.103.000
	Total Sekolah	37.374		Total Siswa	1.741.524
				 Total Anggaran	1.741.524



Inovasi



Program digitalisasi sekolah ini merupakan terobosan atau inovasi yang dibuat oleh Kemendikbud pada tahun 2019 dalam rangka menyongrong era Revolusi Industri 4.0



Dampak



Komunitas guru dapat saling bekerja sama membuat materi pembelajaran secara digital. Mengunggah bahan ajar tersebut ke dalam jaringan untuk digunakan bersama. Membuat tes ujian harian dan melaksanakannya secara bersama-sama lintas sekolah dalam jaringan online.



Peserta didik mendapatkan akses pelayanan pendidikan di wilayah-wilayah pinggiran dengan menggunakan tablet dengan diarahkan oleh guru dengan memanfaatkan platform rumah belajar.



Testimoni



"Kita ingin menjadikan Pulau terdepan jadi beranda Indonesia, bukan lagi sekadar halaman belakang" Joko Widodo

"Program digitalisasi sekolah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan sumber daya manusia menyongsong revolusi industri 4.0. Saya yakin dengan digitalisasi ini semua hambatan akibat kesenjangan struktural dan spasial akan bisa diselesaikan dengan digitalisasi ini" Muhadjir Effendy" Muhadjir Effendy

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah meluangkan waktu untuk meninjau proses pembangunan pendidikan di daerah kami. Melalui kunjungan kerja kali ini, Bapak sudah berkenan meluncurkan beberapa program seperti penyerahan Kartu Indonesia Pintar, penerapan sekolah digital dan beberapa program lainnya. Semoga segala perhatian yang diberikan bagi kami dapat memberikan pengaruh positif bagi kami dalam menyelenggarakan program kerja di bidang pendidikan yang pada gilirannya akan membawa putra dan putri daerah menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing" Abdul Hamid Rizal, Bupati Kabupaten Natuna



Rekomendasi



Guru diharapkan bisa mempelajari platform rumah belajar baik untuk pengembangan kompetensi guru, menciptakan inovasi pembelajaran, maupun untuk sumber belajar peserta didik



Tahun depan, program digitalisasi sekolah akan memberikan laptop kepada 62.186 guru, memberikan tablet kepada 7.034.053 siswa, 62.186 server untuk sekolah.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengembangkan platform **Rumah Belajar** dengan menarik dan sesuai kebutuhan peserta didik. Para guru juga perlu dilatih bagaimana membuat konten pembelajaran yang bisa diunggah di rumah belajar sehingga bisa menjadi inspirasi bagi guru yang lain di seluruh Indonesia.

SEAMEO di Bawah Kepemimpinan Muhadjir Effendy

"Indonesia dan SEAMEO akan terus berupaya berkontribusi secara signifikan untuk kemajuan pendidikan, sains, dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara."

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, selaku Presiden SEAMEO tahun 2017-2019)

SEAMEO organisasi yang terdiri dari para menteri pendidikan di Asia Tenggara didirikan pada 30 November 1965. Pada Juli 2017 melalui *Southeast Asian ministers of education organisation* (SEAMEO) *Council Confrence* ke-49, di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada 24-27 Juli 2017 menggantikan Menteri Pendidikan Thailand Teerakiat Jaareonsettasin. Target dari SEAMEO adalah mengembangkan kapasitas guru dan sekolah di Asia Tenggara melalui program dan kegiatan yang dijalankan oleh lembaga spesialis SEAMEO. SEAMEO mendirikan 26 SEAMEO Centres di 10 negara, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Singapura

Penyerahan Jabatan Presiden
SEAMEO dari Menteri Pendidikan
Thailand kepada Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Tahun 2017





Titik Awal (Baseline)

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nama Bidang	Nama Program	
Regional Leadership	A. Research and Development	1. Mother Tongue Based - Multi-lingual Education	
		2. SEAQIL REGRANTS 2014	
	B. Capacity Building	1. Symposium	
		2. Regional Professional Development Programmes	
		3. In-Country Professional Development Programme	
		4. Workshop	
	C. Recognition and Benchmarking	Internship in Division of ICT and Network	
	Regional Visibility	A. Strengthening Linkages with Inter-Centre, National, Regional and International Institutions	1. Visit of SEAMEO SEARCA
			2. Visit of the Secretary for Education of Hong Kong
3. Study Visit in Southeast Asia			
4. Study Visit to SEAMEO INNOTECH			
B. Increase Means for Stakeholders to Access SEAMEO Programmes		1. Presentation in Regional/International Conferences	
		2. Printed Material Publications	
		3. Digital Material Publications	
Solid Resource Base	A. Financial Viability	Budget Expenditure	
	B. Management Efficiency	1. SEAMEO Coordination Meetings	
		2. Governing Board Meeting	
	C. Human Resource Management	1. Staff Development	
		2. Staff Participation in Other Institutions' Activities	
		3. Centre's Documents Development	
		4. Social Activities	



Capaian Program

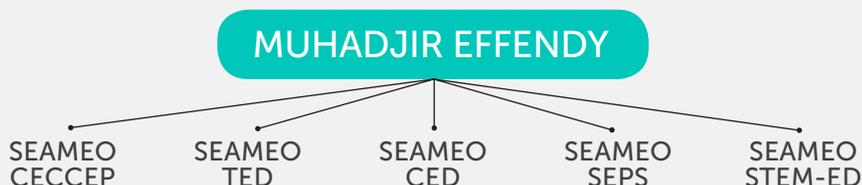
(Capaian *Flagship*, Program Berdasarkan 7 Prioritas Pada Masa Jabatan Mendikbud Muhajir Effendy sebagai Presiden SEAMEO Council, Tahun 2017-2019)

Prioritas	Nama Program	Kegiatan
Prioritas 1	Early Childhood Care and Education	<ol style="list-style-type: none"> 1. International Seminar on Early Childhood Care Education and Parenting: Children's Well-being and Effective Parenting in the Digital Era. 2. Survey of Teachers in Pre-Primary Education (STEPP) 3. Regional Documentation on Innovative Financing Mechanism and Partnership for ECCE 4. Evaluating the Effectiveness of Parenting Programmes in order to Support Children's School Readiness 5. Workshop on ECCE and Parenting Models Selection and Learning Material Development 6. Service Training for Teachers and Parents of Children with Autism 7. National Teachers Training on Quality Learning Environment 8. Training on "Stories and Sciences Experiment to Develop Scientific Attitude for Children" 9. Partnership Programmes
Prioritas 2	Addressing Barriers to Inclusion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program SEAMEO Regional Centre for Community Education Development (CED) 2. Program SEAMEO Regional Centres for Special Needs Education (SEN)
Prioritas 3	Resiliency in the Face of Emergencies	Program Sekolah Aman di Indonesia
Prioritas 4	Promoting Technical and Vocational Education and Training (TVET)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Southeast Asia Creative Camp 2. Program SMART-BE SEAMEO BIOTROP 3. Program SEAMEO TED 4. SEA-VET.net
	Revitalising Teacher Education	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program SEAMEO RECSAM 2. Program SEAMEO RETRAC 3. Program QITEP in Language 4. Program QITEP in Mathematics 5. SEMAO QITEP in Science
Prioritas 5	Promoting Harmonisation in Higher Education and Research	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program SEAMEO BIOTROP 2. Program SEAMEO RELC 3. Program SEAMEO RIHED
Prioritas 6	Adopting a 21st Century Curriculum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Rumah belajar.id: Open Educational Resources (OER) Hub 2. SEAMOLEC Educational Resources for Remote Area (SIERRA) 3. Program SEAMO CHAT 4. Program SEAMO RECSAM



Inovasi

Selama menjabat Presiden SEAMEO, Mendikbud menorehkan sejarah pendirian 5 SEAMEO Regional Centre baru

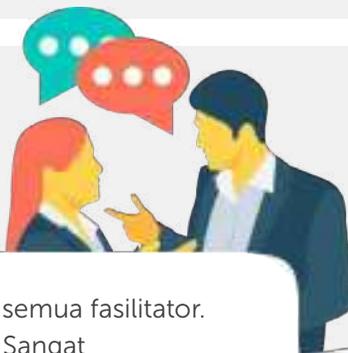


Dampak



Meningkatnya kerja sama bidang pendidikan di Indonesia dan di Asia Tenggara.

Testimoni



"Saya belajar banyak hal dari pelatihan ini. Terima kasih untuk semua fasilitator. Pendekatan Anda dalam mengajar sangat menginspirasi saya. Sangat menyenangkan belajar dengan Anda."

(Suaiba, SMP Negeri 3 Malang, Jawa Timur, Indonesia, Peserta Pelatihan Joyful Learning in Mathematics Education)

"Pelatihan ini merupakan pembelajaran yang sangat baik yang dapat digunakan di sekolah saya."

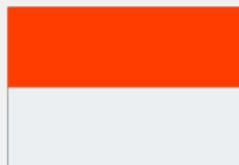
(Kamisah binti Ahmad, SMK Bandar Sungai Buaya, Selangor, Malaysia, Peserta Pelatihan Joyful Learning in Mathematics Education)



Rekomendasi



Pengoptimalan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program *high impact* bagi pengembangan kualitas pendidikan nasional.



Berkolaborasi dengan unit utama di Kemendikbud serta kementerian/lembaga lain yang relevan agar program unggulan SEAMEO Centres dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia serta masyarakat di Asia Tenggara



Bab 5

Revitalisasi Pendidikan Vokasi,
Meningkatkan Daya Saing Bangsa

Pendahuluan

“Supaya bonus demografi yang puncaknya ada kurang lebih tahun 2030 bisa kita manfaatkan, dan kita bisa melakukan pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Kuncinya adalah langkah perbaikan, reformasi di pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Inti kekuatan daya saing sebuah bangsa terletak pada manusianya. Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus menerus berkembang. Dengan demikian, dunia pendidikan juga harus mengikuti perubahan zaman. Tidak ada jalan lain, revitalisasi pendidikan vokasi perlu dilakukan untuk menyiapkan tambahan 58 juta tenaga kerja dengan keterampilan Abad ke-21 pada kurun 15 tahun mendatang untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 dunia pada tahun 2030.

Revitalisasi pendidikan vokasi sebagai salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing bangsa. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia, mengamanatkan Kemendikbud untuk melakukan penyesuaian dan pemutakhiran kurikulum, inovasi pembelajaran, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, kemitraan sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan perguruan tinggi, standardisasi sarana dan prasarana utama serta penataan/ pengelolaan kelembagaan, dan pengembangan *teaching factory* dengan prioritas bidang kemaritiman, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif.

Berbagai program terkait revitalisasi pendidikan vokasi tersebut, kami sajikan pada Bab 5 yang terdiri dari 4 topik, yaitu (1) revitalisasi pendidikan vokasi pada SMK; (2) revitalisasi pendidikan vokasi pada pendidikan khusus; (3) unjuk keterampilan di level dunia; dan (4) bekal kecakapan kerja dan wirausaha melalui kursus dan pelatihan

Revitalisasi Pendidikan Vokasi Pada SMK

“Fokus dunia pendidikan saat ini adalah untuk memberikan keterampilan kerja bagi generasi muda. Hal ini dalam rangka menyambut bonus demografi dan persaingan antarnegara yang semakin ketat. Pendidikan dan pelatihan vokasi atau kejuruan akan semakin diperkuat seiring bergesernya strategi pembangunan dari pembangunan infrastruktur fisik, menjadi pembangunan manusia. Kita ingin pendidikan yang fokus pada keterampilan bekerja. Ini sangat penting.”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Pendidikan kejuruan dan keterampilan lebih diarahkan pada pembentukan kemampuan yang diperlukan di dunia kerja sesuai dengan jabatan yang ada di setiap kompetensi keahlian. Kemendikbud menggulirkan program Revitalisasi SMK sebagai upaya meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing bangsa. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM, Indonesia mengamanatkan Kemendikbud melakukan penyelarasan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, serta penyesuaian standar kompetensi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja.





Titik Awal (Baseline)



Pendidikan vokasi masih belum mempunyai **peta jalan**



Kekurangan **guru produktif**



Tidak adanya **lembaga sertifikasi**

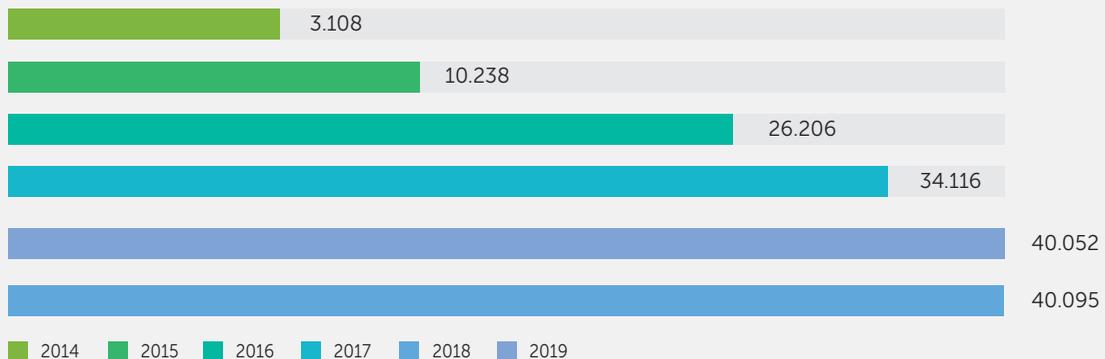


Kurikulum yang belum mendukung **dunia usaha dan dunia industri (DUDI)**.

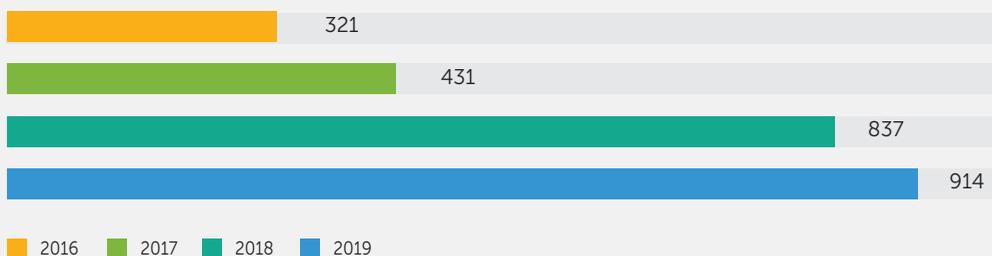


Capaian Program

Jumlah Kerja Sama Sekolah dengan Industri (per Juli 2019)

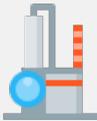


Kemendikbud dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) telah melaksanakan kegiatan pengembangan SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama (LSP- P1).



Sumber: Dapodik Kemendikbud

Capaian Program

	 Pengembangan SMK Kemaritiman	 Pengembangan SMK Pariwisata	 Pengembangan SMK Pertanian	 Penguatan Kerjasama SMK dengan Industri	 Pengembangan <i>Teaching Factory</i> SMK
2015	-	-	-	-	59
2016	105	-	32	859	73
2017	44	46	87	1.540	200
2018	90	90	160	301	228
2019	90 SMK	90 SMK	162 SMK	215 SMK	500 SMK



Inovasi

Terdapat enam isu strategis yang menjadi **prioritas revitalisasi SMK**:

1.



Penyelarasan
dan pemutakhiran kurikulum

2.



Inovasi
pembelajaran

3.



Pemenuhan dan peningkatan
profesionalitas guru dan tenaga
kependidikan

4.



Kemitraan sekolah dengan
dunia usaha/dunia industri (DU/
DI) dan perguruan tinggi

5.



Standarisasi
sarana dan prasarana
utama

6.



Penataan/ pengelolaan
kelembagaan



Dampak



Semakin banyak lulusan SMK yang bekerja



Sumber: BPS



Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK menurun



Testimoni



"Adanya kerja sama antara SMK dan industri membuat orang tua sangat antusias untuk menyekolahkan anaknya ke SMK, karena mereka yakin bahwa lulusan SMK siap kerja, bisa langsung bekerja atau membuka usaha."

(Ahmad Hadadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)

"Sertifikat kompetensi itu ibarat paspor bagi siswa untuk melamar ke industri yang sesuai dengan kompetensinya. seluruh industri pasti mengakui sertifikat kompetensi itu (LSP-P1) karena standarnya sudah diatur oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)."

(Purwosusilo, Kepala SMK Negeri 26 Jakarta)



Rekomendasi

Perlu peningkatan kinerja, dukungan, dan pengembangan enam isu strategis prioritas revitalisasi SMK sebagai berikut.

1. Penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum
2. Inovasi pembelajaran
3. Pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan
4. Kemitraan sekolah dan dunia usaha/dunia industri (DUDI) dan perguruan tinggi
5. Standardisasi sarana dan prasarana utama
6. Penataan/pengelolaan kelembagaan/pengelolaan kelembagaan.

Revitalisasi Pendidikan Vokasi pada Pendidikan Khusus

"Kita bertugas membuat anak-anak SLB ini bisa mandiri. Buat teman-teman guru semua, Insya Allah akan mendapatkan aliran pahala karena anak-anak ini pasti mencintai Bapak dan Ibu guru seperti mencintai orangtuanya."

(Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2016)

Dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus menggulirkan Program Revitalisasi Pendidikan Keterampilan/Vokasi di Satuan Pendidikan Khusus.

Hal tersebut semakin menguatkan program keterampilan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) mengingat prioritas utama bagi satuan pendidikan khusus adalah memberikan layanan pendidikan yang berorientasi pada program keterampilan/vokasi kepada peserta didik penyandang disabilitas terlebih yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, intelektual, mental, dan sensorik.



Pengembangan Keterampilan
Siswa SLB



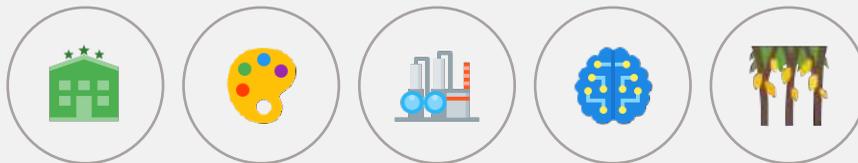
Titik Awal (*Baseline*)



Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki peluang relatif kecil untuk bekerja dan atau melanjutkan ke pendidikan tinggi.



Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus memuat 20 jenis mata pelajaran keterampilan dengan porsi lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran umum.



Keterampilan/vokasi SLB terdiri atas keterampilan di bidang pariwisata, seni dan budaya, mesin dan teknologi, serta pertanian.



Capaian Program

2015



Bantuan Penguatan Pendidikan
Kecakapan Hidup

40 Sekolah
@150.000.000



Bantuan Pendidikan
Kewirausahaan

75 Sekolah
@ 40.000.000

NO.	CAPAIAN PROGRAM	2016	2017	2018	2019
1	Sinkronisasi Kurikulum Keterampilan SMALB	Dokumen KI-KD 20 Mapel Pilihan Keterampilan	Perdirjen Nomor 10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar, Dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus.	-	-
2	Penyusunan KI-KD Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan Jenjang SMPLB	-	-	Dokumen KI-KD Mata Pelajaran Keterampilan Pilihan Jenjang SMPLB	-
3	Sekolah yang memiliki school development plan untuk Revitalisasi Pendidikan Vokasi/Keterampilan	40 sekolah	60 sekolah	86 sekolah	100 guru
4	Peningkatan Kompetensi Guru di bidang keterampilan	400 guru	400 guru	860 guru	1000 guru
5	Peningkatan Kompetensi Peserta Didik melalui pelatihan	-	-	1000 Peserta Didik	860 Peserta Didik
6	Sekolah yang mendapat pendampingan usaha	-	-	100 Sekolah	86 Sekolah
7	Sekolah yang melakukan kerjasama dengan DUDI/SMK/LKP/BLK/Dinas Pariwisata/Dinas Perindustrian, dan Lembaga yang berkaitan dengan magang peserta didik/guru/	40 sekolah	60 sekolah	86 sekolah	100 sekolah
8	Dokumen Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Penyandang Disabilitas	-	Penyusunan Peta Jalan dan Koordinasi lintas K/L	Penyusunan Draft Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Penyandang Disabilitas	Verifikasi dan Validasi Dokumen Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Penyandang Disabilitas



Inovasi



Penguatan 20 jenis mata pelajaran keterampilan pilihan antara lain sebagai berikut.

1. Pariwisata (Tata Boga, Tata Busana, Tata kecantikan, Massage, dan Tata Graha)
2. Mesin dan Teknologi (TIK, Perbengkelaan Sepeda Motor, Elektronika Alat Rumah Tangga)
3. Seni dan Budaya (Cetak Saring/Sablon, Teknik Penyiaran Radio, Desain Grafis, Fotografi, Seni Membatik, Seni Lukis, Seni Musik, Seni Tari, Cenderamatan (Souvenir))
4. Pertanian (Budidaya Perikanan, Budidaya Peternakan, dan Budidaya Tanaman)



Peningkatan kompetensi peserta didik dan pendampingan usaha



Pengembangan kewirausahaan



Kerja sama dengan Kemenaker dan BNSP dalam Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas



Dampak



Pendidikan keterampilan di SLB lebih banyak diajarkan, dengan tetap memenuhi standar minimal di lingkungan masyarakat dan dapat diimplementasikan bagi anak berkebutuhan khusus.



Meningkatnya kompetensi pendidikan keterampilan guru SLB.



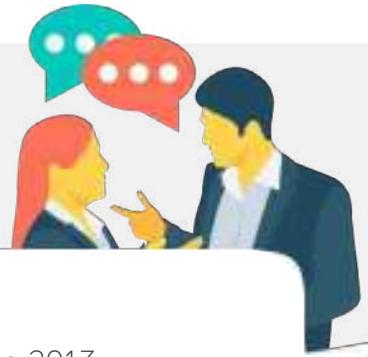
Bertambahnya unit sekolah baru SLB dan ruang kelas baru (RKB).



Meningkatnya peluang peserta didik berkebutuhan khusus untuk bekerja atau ke pendidikan tinggi



Testimoni



“Saya lulus dari SLB B Negeri PTN Jimbaran tahun 2013. Saya suka menari dan memasak. Saat masih bersekolah dulu, saya ikut keterampilan tata boga. Waktu kelas XI SMALB saya juga diikutkan training di Hotel Westin di bagian dapur dan restoran Burger King. Setelah tamat, saya bekerja di Burger King di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali. Untuk menampung alumni siswa disabilitas, Burger King berkomitmen mendirikan Outlet Burger King khusus alumni siswa difabel dari SLB.”

(Kadek Deby, 27 tahun, tunarungu alumni SLB B Negeri PTN Jimbaran, Bali)

“Pada awalnya perusahaan ragu-ragu mempekerjakan anak SLB. Namun faktanya, kerja anak berkebutuhan khusus lebih disiplin dan bagus dalam bekerja. SLBN Subang meminta lulusannya lebih banyak dipekerjakan di SUAI. Sekarang jumlah pekerja disabilitas di PT SUAI sudah melebihi 1% karyawan sesuai UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. PT SUAI saya rasa adalah perusahaan pertama yang melaksanakan UU No. 8 tahun 2016.”

(Direktur PT Subang Autocomp Indonesia (SUAI))



Rekomendasi



Program peningkatan pengetahuan dan kompetensi bidang keterampilan untuk guru SLB



Sertifikasi tahun 2019 sudah mengakomodasi guru SLB berlatar belakang pendidikan keterampilan



Bantuan peralatan praktik serta sarana prasarana penunjang pembelajaran



Penyusunan Standar Kompetensi kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas



Pemenuhan alokasi tenaga kerja disabilitas sebanyak 2% pada instansi pemerintahan dan 1% pada perusahaan swasta sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Unjuk Keterampilan di Level Dunia

"Lewat WSC ini, kita ingin menunjukkan bahwa talenta-talenta yang kita miliki bisa bersaing dengan negara-negara lain."

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

World Skill Competition (WSC) adalah kompetisi pendidikan menengah kejuruan terbesar tingkat internasional yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil. Tak hanya WSC, Anak Indonesia juga berhasil menorehkan prestasi pada berbagai kompetensi Internasional yang bergengsi seperti demo robotik di China.

Kemendikbud terus berupaya untuk meningkatkan daya saing bangsa serta menorehkan prestasi Internasional melalui pendampingan dan apresiasi kepada siswa yang berprestasi.



Siswa SMK Indonesia Menorehkan Prestasi
di Ajang World Skill Competition





Titik Awal (Baseline)

Pada keikutsertaan Indonesia di ajang WSC tahun **2013**, Indonesia berada di peringkat **21** dari 54 negara dengan meraih



1 Emas



1 Perak



8 MOE.



Capaian Program

JUMLAH BIDANG
LOMBA YANG
DIKUTI

30

30

29

29

PERINGKAT

21/54 Negara

18/55 Negara

16/57 Negara

15/62 Negara

2013

2015

2017

2019

Milestone Partisipasi Indonesia dalam *WordSkills*





Inovasi



Expert (pelatih) di beberapa bidang keahlian lomba mengajak peserta untuk berlatih langsung di berbagai bidang industri untuk memberikan banyak pengalaman peserta sehingga mereka siap menghadapi kompetisi WSC. Seperti yang dilakukan oleh *expert* bidang *Automobile Technology*, para peserta WSC berlatih langsung di beberapa perusahaan, yaitu Nissan, Daihatsu, Toyota, BMW, dan Audi.



Sebelum berkompetisi di WSC 2019, peserta Indonesia dibekali persiapan mental. Hal itu merupakan pengalaman dari WSC tahun-tahun sebelumnya bahwa peserta tidak hanya memerlukan persiapan fisik dan keterampilan (*skill*), tetapi juga memerlukan persiapan mental. Oleh karena itu, pada WSC 2017, kontingen Indonesia didampingi oleh psikolog pada saat berkompetisi di Abu Dhabi.



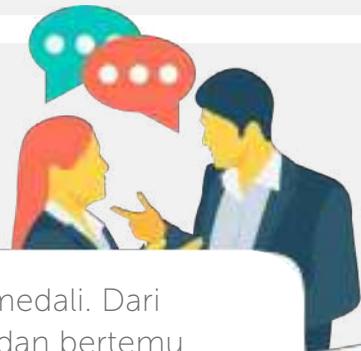
Dampak



Meningkatnya pengalaman dan keterampilan peserta didik di tingkat dunia melalui berbagai fokus kompetisi yang sangat dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.



Testimoni



“Tentunya saya sangat senang bisa mendapatkan medali. Dari ajang ini, saya mendapatkan banyak pengalaman, dan bertemu pemuda-pemuda hebat. Saya berharap mengikuti ajang Internasional ini dapat terus dilakukan.”

(Hengky Sanjaya, Peringkat 2 Dunia bidang IT Software Solutions for Business)



Rekomendasi

Permasalahan



Jumlah *expert* dari industri masih sedikit.



Sulit mencari tempat pelatihan di industri sesuai dengan bidang keahlian lomba.



Beberapa bidang lomba memerlukan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan fisik, seperti *Bricklaying* dan *Wall and Floor Tiling*. Dari segi fisik, kontingen Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara lain.

Rekomendasi



Proaktif membangun jejaring dengan industri untuk mendapatkan dukungan baik berupa *expert*, tempat pelatihan, serta alat dan bahan.



Menelusuri jejak alumni WSC, ASC, dan WSA untuk ikut mendukung WSC selanjutnya.



Indonesia perlu meningkatkan *sponsorship* dari industri dan menambah anggaran untuk memaksimalkan pelatihan persiapan WSC. Mendirikan *training centre* khusus WSC yang juga menyediakan alat dan bahan sesuai dengan standar WSC seperti yang dimiliki negara Korea, Cina, Jepang.



Mengajak peserta WSC mengikuti *Show Skill* di Lomba Kompetensi Siswa (LKS) untuk menguatkan mental peserta agar tidak gugup saat dilihat banyak orang.



Pembekalan bagi peserta WSC secara komprehensif, dari segi *hard skill*, *soft skill*, fisik, mental, dan juga kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Bekali Kecakapan Kerja dan Wirausaha Melalui Kursus dan Pelatihan

*“Dengan meningkatnya kebutuhan SDM,
maka pendidikan nonformal seperti kursus dan
pelatihan mempunyai peranan yang sangat
kuat.”*

*(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan)*

Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) merupakan program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan. Program ini berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), sedangkan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wirausahawan yang tergolong masih sedikit.

Kursus Tata Rias dan Kecantikan dalam
Program Pendidikan Kecakapan Kerja





Titik Awal (Baseline)

Pada tahun **2014**, program PKK dan PKW
masih belum berdiri sendiri

PKH

merupakan bagian dari Program Keluarga
Harapan (PKH)

PKW

merupakan bagian dari program
Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
(PKM)



Capaian Program

Capaian dan Sasaran Program PKK dan PKW Tahun 2015-2019





Inovasi



Pengajuan bantuan melalui **e-proposal** untuk mempercepat proses.



Pembelajaran sebagian penyelenggara PKK menggunakan sistem *Massive Open Online Course* dan *blended learning system*.



Bahan ajar sebagian penyelenggara PKK menggunakan digital, di antaranya e-book



Jenis keterampilan mengangkat potensi/ kearifan lokal



menambahkan materi digital marketing pada pembelajaran untuk mendukung industri 4.0 sudah dilakukan



Dampak



Menghasilkan lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki **pengetahuan, keterampilan, kompetensi** dan **sikap mental wirausaha** dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha menuju Indonesia Unggul.



Testimoni



"Alhamdulillah pembelajaran ini juga sangat membantu sekali sebagai usaha sampingan di rumah. Para murid diberi pembelajaran selama 150 jam tentang desain grafis dan aneka souvenir."

(A. Hambali, Pimpinan LKP Cadre Ability Informatika)



Rekomendasi



Sosialisasi program PKK dan PKW belum merata kepada seluruh stakeholder dan masyarakat. Solusinya dengan mengoptimalkan media sosial, media elektronik (laman) dan media cetak untuk mensosialisasikan bantuan.



Proses pengajuan proposal oleh lembaga, penilaian proposal dan verifikasi lapangan terlambat dilakukan. Solusinya petunjuk teknis program bantuan disampaikan pada awal tahun saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi program kursus dan pelatihan. Selain itu juga memberikan peningkatan kapasitas kepada tim penilai di PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas dan penanggung jawab program bantuan di awal tahun anggaran.



Komposisi dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas masih terbatas. Solusinya berkoordinasi dengan PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas secara intensif dengan meminta laporan perkembangan setiap pekan, melakukan pendampingan.



Bab 6

Reformasi Tata Kelola Pendidikan melalui Pelibatan Publik

Pendahuluan

“Indonesia bisa menjadi negara maju jika memiliki birokrasi yang tangguh yang didukung tenaga birokrasi yang mau bekerja keras, berani berinovasi, serta mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan lain.”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Zaman sudah berubah. Era konvensional perlahan ditinggalkan berganti era digital. Orang yang hanya diam dan berpangku tangan, akan terlibas oleh hempasan gelombang digital tersebut. Begitupun dunia pendidikan. Ia akan terus berjalan dan berganti warna meskipun esensi pendidikan tetaplah sama. Mengacu pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan, yaitu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak bersifat pemeliharaan, tetapi bermaksud memajukan serta mengembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan.

Saat zaman memasuki era digital, lembaga pengelola pendidikan juga dituntut berbenah. Demikian juga dengan Kemendikbud yang telah lama melakukan pembenahan birokrasi internal. Hal ini dilakukan demi tercapainya visi, misi, dan tujuan Kemendikbud yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini dipertegas dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden



Peningkatan Kinerja Pegawai dan Integrasi Sistem Informasi di Lingkungan Kemendikbud

RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peta jalan reformasi birokrasi Kemendikbud juga dilakukan penyesuaian/perubahan mengacu pada Perpres tersebut.

Ketika kita memahami pelibatan publik, publik yang dimaksudkan bukan semata Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, publik bisa berarti kumpulan orang atau individu, masyarakat, tokoh panutan, dan lain sebagainya. Dalam konteks pemajuan pendidikan, Kemendikbud memandang perlu peran dari kelompok masyarakat tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dari sumber lain untuk mendukung kekayaan ilmu dan keterampilan.

Pelibatan publik juga diterjemahkan Kemendikbud melalui perbaikan sistem pelayanan di internal Kemendikbud. Dapat dilihat berbagai inovasi dan gerakan perubahan untuk pelayanan yang lebih baik dan sesuai harapan. Secara internal, inovasi-inovasi tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan berikut ini.

Reformasi Birokrasi Internal

“Untuk mewujudkan pemerintah yang terbuka, bukan hanya butuh perubahan karakter, mentalitas atau perubahan pola pikir di kalangan birokrasi pemerintahan dan badan-badan publik. Justru yang utama butuh reformasi sistem dan pola kerja. Terutama dengan menerapkan sistem pemerintahan elektronik atau e-government mulai dari *e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, sampai cash flow management system.*”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbud salah satunya diwujudkan melalui program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assesement) oleh kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang mencakup penilaian terhadap dua komponen, yaitu Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit.

Hubungan sebab-akibat antara komponen tersebut mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran. Proses perbaikan inilah akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.



Temu Awal Menpan RB dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud



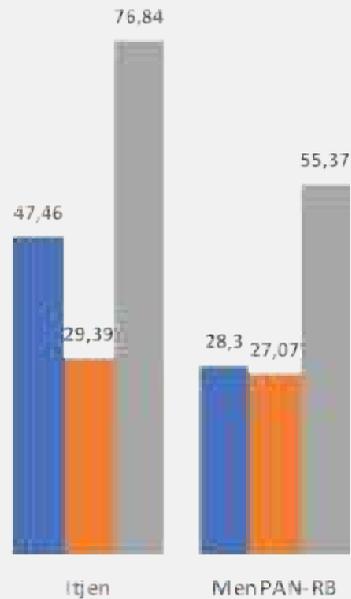


Capaian Program

• Titik Awal

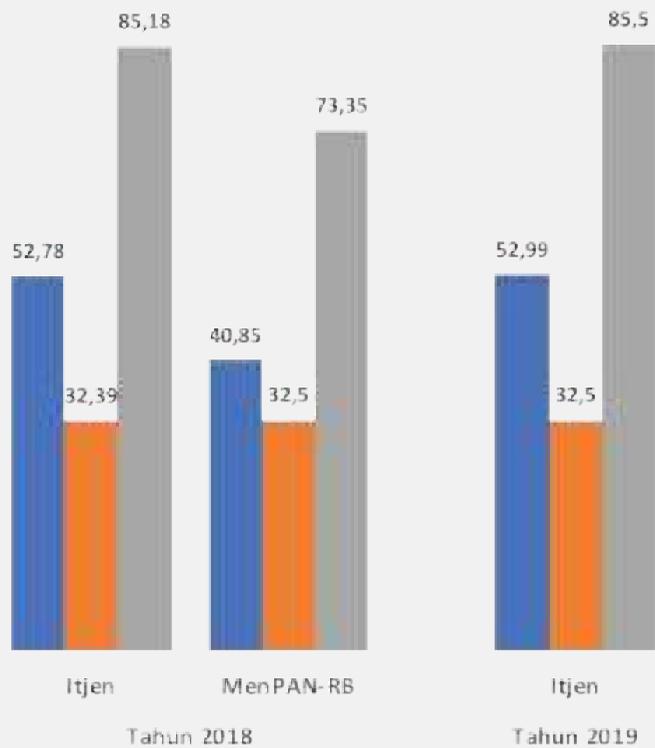
Penilaian RB dimulai sejak 2014.
Penilaian dilakukan oleh Itjen
Kemdikbud dan Kemenpan RB.

- Komponen Pengungkit (KP)
- Komponen Hasil (KH)
- jumlah



• Capaian Program

- Komponen Pengungkit (KP)
- Komponen Hasil (KH)
- jumlah





Inovasi

Penerapan sistem pemerintahan elektronik dan pendampingan satker.

Tingkat kelulusan sebelum tahun 2018 hanya 17 satker yang lulus dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 33 satker.



Dampak



Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN



Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi



Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



Testimoni



“RBI itu menuntut serba kepastian karena di situlah inti dari adanya perubahan *good governance*.”

(Harmanto, Kepala LPMP Jawa Tengah)



Rekomendasi



Internalisasi RB ke satker yang belum berhasil lulus *desk evaluation* (evaluasi sederhana).



Itjen Kemendikbud mengusahakan lebih banyak lagi satker yang lulus *desk evaluation* Menpan RB 2019 melalui beberapa strategi.



Itjen Kemendikbud menargetkan pada tahun 2024 bahwa semua satker Kemendikbud lulus 100% WBK dan 50% lulus WBBM.



Kemendikbud perlu menitikberatkan penguatan RB/ZI-WBK/ WBBM.



Itjen Kemendikbud melakukan *Quality Assurance* untuk kesiapan usulan Satker ZI WBK.

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

“Usaha untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi harus selalu kita budayakan. Berbagai cara telah kita lakukan, seperti melakukan reformasi birokrasi, terus melakukan perbaikan sistem, dan menata kelola agar dapat melayani dengan lebih baik, serta membangun zona-zona integritas.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Zona Integritas (ZI) diterapkan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hakikat pembangunan ZI adalah

- Merupakan miniatur implementasi reformasi birokrasi di Unit Kerja;
- Bertujuan untuk membangun program;
- Mewujudkan RB sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas; dan
- Membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Penandatanganan Pakta Integritas





Capaian Program

• Titik Awal

Sebelum penilaian ZI dilakukan pada tahun 2014, Itjen Kemendikbud selaku pendamping telah menyiapkan serangkaian kegiatan, yaitu



merancang sistem pengendalian progres berkala



mengobservasi lingkungan pemenuhan syarat ZI WBK-WBBM



mengevaluasi pemenuhan kelengkapan dokumen



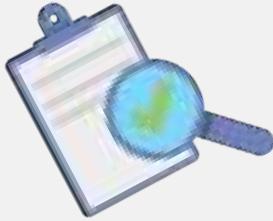
melakukan survey responden dan pemantauan progres komponen hasil.

• Capaian Program





Inovasi



Quality Assurance oleh Itjen Kemendikbud dilaksanakan untuk menyiapkan usulan Satuan Kerja ZI WBK yang lebih baik.



Itjen Kemendikbud menargetkan tahun 2024 bahwa semua satker lulus 100 % WBK dan 50% lulus WBBM.



Dampak

Semakin banyaknya satker Kemendikbud yang mendapat predikat ZI WBK yang berdampak semakin banyak satker Kemendikbud yang bebas dari korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas



Testimoni



"Diharapkan dengan Zona Wilayah Bebas Korupsi, ASN mampu berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kebudayaan, untuk mewujudkan birokrasi yang melayani, handal, bersih, dan professional."

(Ian Simarmata, PNS Sekretariat Jenderal Kemendikbud)



Rekomendasi



Komitmen dari pimpinan dan pegawai Kemendikbud untuk membuat perubahan secara konstruktif dalam penerapan Reformasi Birokrasi.



Sosialisasi ZI –WBK dan WBBM ke satker perlu dilakukan lebih intensif.

Integrasi Layanan Perpustakaan: Pengembangan Serba Digital

“Semua hal berkembang dengan cara yang tidak diduga, inovasinya cepat sekali. Kalau kita tidak ikut berubah, ya ditinggal. Jadi, saya senang sekali Perpustakaan Nasional sekarang sudah mulai pengembangan serba digital. Bahkan dilengkapi dengan *e-resources, e-books, e-journal*, dan lainnya.”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Layanan informasi digital diselenggarakan oleh Subbagian Perpustakaan, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat. Tujuan layanan informasi ini untuk menyediakan akses terbuka (open acces) dan daring (online) kepada publik terkait dengan berbagai informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dalam berbagai format.

Target:

- Mengintegrasikan seluruh perpustakaan di lingkungan Kemendikbud dalam satu pencarian melalui katalog induk (katalog.kemdikbud.go.id) menggunakan sistem UCS (*Union Cataloging System*)
- Mendukung Penguatan Pendidikan Karakter
- Mendukung gerakan literasi nasional (GLN).

Layanan Perpustakaan untuk Publik





Capaian Program

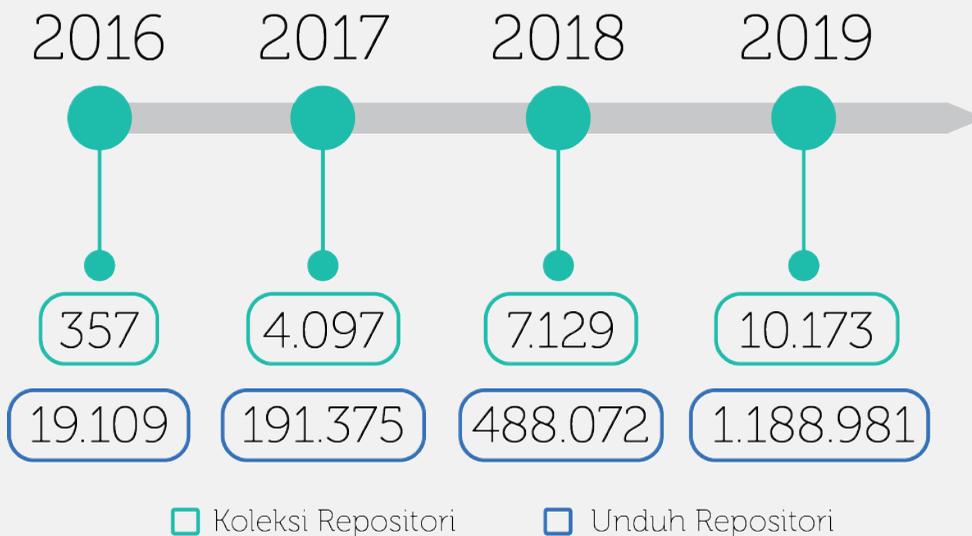
• Titik Awal



Belum optimalnya integrasi layanan perpustakaan di lingkungan Kemendikbud melalui katalog induk (katalog.kemdikbud.go.id)

• Capaian Program

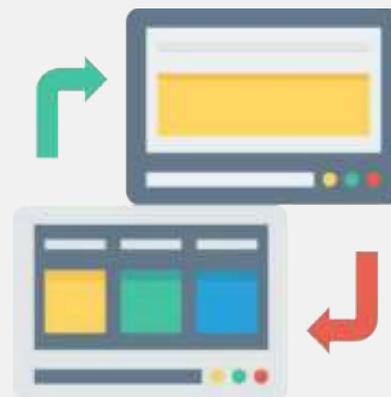
Koleksi dan Unduh Repositori tahun 2016-2019





Inovasi

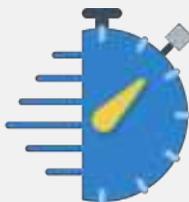
- Pengembangan :
 - SLiMS (Senayan Library Management System)
 - SchILS (School Integrated System)
- Workshop daring SLiMS



Dampak



Peningkatan visibilitas dan dampak positif sebagai pusat informasi digital.



Tolok ukur kinerja institusi yang dapat terlihat oleh publik.



Testimoni



"Situs web repositori Kemendikbud yang dikelola Perpustakaan Kemendikbud ini memuat banyak rujukan berharga."

(Ivan Lanin, pemerhati Bahasa Indonesia)

"Adanya repositori ini sangat bermanfaat, apalagi karena open access sehingga saat pencarian e-book dapat dibaca secara maksimal tanpa perlu login, lalu unduh."

(Nurhayati Asyrhaaf, Mahasiswa UIN Jakarta)



Rekomendasi



Penyerahan hasil publikasi di lingkungan Kemendikbud kepada perpustakaan dan dimasukkan ke dalam repository.



Perlunya payung hukum terkait karya cetak karya rekam (KCKR).



Penguatan kebijakan serah simpan karya cetak karya rekam ke Perpustakaan Kemdikbud

Unit Layanan Terpadu: Pelayanan Publik yang Responsif

“ULT harus memberi layanan tuntas, lebih dekat dan memuaskan.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu layanan pendidikan dan kebudayaan (LPK) yang ditangani unit kerja masing-masing di lingkungan Kemendikbud dikelola oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), Sekretariat Jenderal, Kemendikbud.

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud beroperasi sejak April 2015, bertempat di Gedung C Lantai 1, Kompleks Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

Tujuan:

1. Untuk mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan tata kelola Kemendikbud yang bersih dan terpercaya.
3. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Unit Layanan Terpadu
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan





Capaian Program

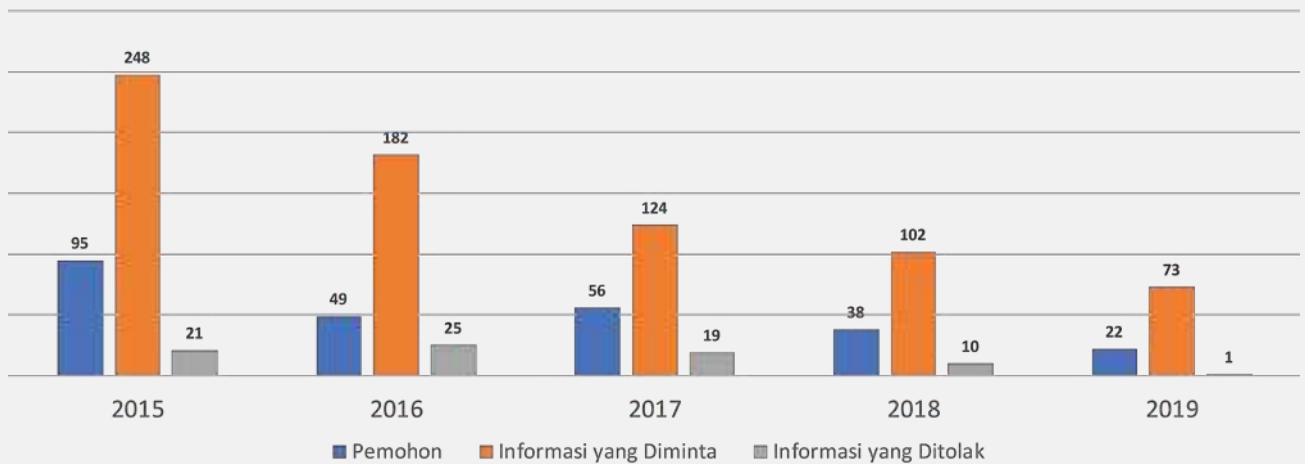
• Titik Awal

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 layanan masyarakat yang meminta informasi dan menyampaikan pengaduan di Kemendikbud, ditangani melalui satu pintu melalui Pusat Informasi dan Humas, unit kehumasan kementerian kala itu.



• Capaian Program

Jumlah Pemohon dan Informasi yang Diminta



Inovasi



Mulai awal tahun 2019, ULT menghadirkan pendaftaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan pengunjung memesan layanan di ULT pusat pada waktu yang mereka inginkan.



Dampak

Masyarakat dapat meminta informasi, menyampaikan pengaduan, bertanya, berdialog, memberikan saran dan masukan, serta konsultasi baik secara tatap muka maupun secara jarak jauh.



Testimoni



"ULT sampai saat ini menjadi solusi bagi kami yang datang ke kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena pelayanannya cepat dan dilayani seperti nasabah bank menggunakan antrean. Kiranya pelayanan di sana tetap dipertahankan."

(Puji Yulianti, Guru SMP)



"Kami sangat berterima kasih atas tersedianya layanan terpadu. Segala urusan jadi mudah, aman dan nyaman, kendala dapat terealisasi dengan cepat."

(Hendri Winarto, Operator Sekolah)



Rekomendasi



Dukungan pimpinan pusat dan daerah pada SDM ULT di wilayah kerja masing-masing.



Koordinasi antarpimpinan satuan kerja agar ULT lebih optimal menyelesaikan permasalahan.

Meningkatkan Kinerja Pegawai Dengan Sistem Digital

“Reformasi yang berbasis teknologi digital, saya minta sistemnya betul betul jalan dan langsung bisa digunakan dan ramah bagi penggunanya”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Pada tahun 2015-2019, Pengelolaan SDM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan berbasis *“merit system”* yang memiliki sembilan indikator diantaranya Standar Kompetensi Jabatan, Perancangan Pegawai, Seleksi dan Promosi Terbuka, Manajemen Karir, *Reward & Punishment*, Kode Etik-Kode Perilaku, Pengembangan Kompetensi Sesuai Kinerja, Perlindungan kepada ASN, dan Sistem Informasi yang Terintegrasi.

Blended Learning, Bentuk
Pemanfaatan Sistem Digital oleh
Pegawai Kemendikbud





Titik Awal (*Baseline*) & Capaian Program

• Titik Awal

1

Belum disusun standar kompetensi jabatan

2

Penentuan usul kebutuhan ketenagaan sudah memperhitungkan analisis beban kerja, tetapi data PNS belum terpusat sehingga masih mengacu data pada masing-masing unit kerja.

3

Pengisian jabatan struktural melalui mekanisme baperjakat (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan)

4

Belum dilaksanakan assesmen dalam rangka pemetaan potensi pegawai dan belum ada pembentukan kelompok rencana suksesi

5

Belum ada pemberian penghargaan atas kinerja pegawai dalam bentuk pemberian tunjangan kinerja

6

Penilaian tahunan berupa DP3, belum mempertimbangkan aspek kinerja, belum ada sistem perekaman kehadiran elektronik dan belum ada penilaian kinerja pegawai sesuai tuntutan kinerja jabatan

7

Penunjukan peserta pengembangan pegawai (diklat) belum ada dasar yang kuat

8

Data/informasi kepegawaian belum terintegrasi

• Capaian Program

1

Telah dilaksanakan: penyusunan kamus kompetensi teknis untuk bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai dasar dalam penentuan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kemendikbud; analisis jabatan, analisis beban kerja, serta penataan jabatan berbasis kompetensi terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; penataan pegawai dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai dan persyaratan kompetensi jabatan

2

Perencanaan ketenagaan kementerian telah dilaksanakan sesuai dengan beban kerja (hasil analisis beban kerja)

3

Pengisian jabatan pimpinan tinggi sudah dilaksanakan dengan cara seleksi terbuka sejak tahun 2016. Seleksi dilaksanakan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4

Telah ditetapkan dokumen pola karir (*human capital development programme*, HCDP), Dalam rangka mempersiapkan data potensi pegawai, sejak tahun 2016 telah dilaksanakan asesmen pegawai Kemendikbud dan Hasil asesmen digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pembentukan Kelompok Rencana Suksesi (*Talent Pool*)

5

Diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Berprestasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya agar pemberian penghargaan dapat dilaksanakan dengan terukur melalui indikator yang jelas, akuntabel, dan tidak bersifat subjektif. Penetapan Permendikbud No 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain mengatur bentuk *punishment* bagi pegawai yang tidak memenuhi kinerja dalam bentuk pemotongan tunjangan kinerja

6

Indikator penerapan kode perilaku PNS antara lain kedisiplinan dan kinerja; Salah satu bentuk kedisiplinan pegawai adalah menaati aturan jam kerja; Dalam rangka meningkatkan akurasi dan kecepatan layanan informasi kehadiran pegawai Kemendikbud, telah dibangun aplikasi e-Kehadiran, yang diterapkan di seluruh satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbud; Dalam rangka untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kinerja (PP Nomor 46 tahun 2011, yang diperbarui dengan PP Nomor 30 Tahun 2019). Proses penilaian kinerja pegawai (sejak penyusunan rencana, penyusunan log harian, hingga penilaian) dipermudah dengan dikembangkannya aplikasi e-SKP.

7

Telah dilaksanakan program magang PNS ke Luar Negeri dan Short Course bidang *Human Resources Management* sebagai sarana pengembangan kompetensi pegawai

8

Dilaksanakannya integrasi layanan kepegawaian berbasis TIK

9

Dalam rangka mendorong efektivitas dan kecepatan penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Kemendikbud, Biro SDM telah menyusun konsep Permendikbud Tentang Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS di lingkungan Kemendikbud.





Inovasi



Wawancara & Penilaian Unjuk Kerja secara online pada SKB Kemendikbud



Asesmen Online Bagi Seluruh Pegawai



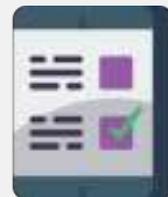
Agenda Pembangunan Talent Pool Kemendikbud Tahun 2019



Seleksi Terbuka



Redistribusi Pegawai di Lingkungan Kemendikbud



e-SKP



Sibandro



e-Kehadiran



Layanan Informasi/ Pengaduan



Penetapan Pola Karir



Visistasi (CPNS 2018)



Magang di Luar Negeri



Short Course



Ujian Dinas & Penyesuaian Ijazah (secara daring)



Magang CPNS



Dampak



Tunjangan Kinerja
Dibayarkan Tepat Waktu.



Tingkat Keterlambatan
Menurun.



Peningkatan kinerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan



Mendorong Kompetisi
Pegawai yang sehat
berdasar Sistem Merit.



Testimoni



"Asesmen itu perlu karena kita perlu tahu kemampuan kita dan kekurangan kita. Dengan adanya sistem merit kita juga harus tahu bagaimana cara meningkatkan kemampuan kita."

*(Bambang Widiyanto, staf Setditjen PAUD
Dikmas)*



Rekomendasi



Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penilaian Kompetensi Pegawai Kemendikbud yang pengusulannya sedang disiapkan oleh Biro Hukum dan Organisasi perlu segera diproses dan diterbitkan.

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud

“Indonesia membutuhkan pemimpin yang berpikiran terbuka karena dalam menghadapi sesuatu yang baru dan tidak pernah ada sebelumnya dibutuhkan fleksibilitas agar seseorang dapat memahami hal tersebut dan meresponsnya dengan baik.”

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Dalam sistem merit, setiap jabatan harus memiliki standar kompetensi. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kemendikbud menjadi dasar pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, serta penataan jabatan berbasis kompetensi.

Pelatihan Kepemimpinan
Nasional





Capaian Program

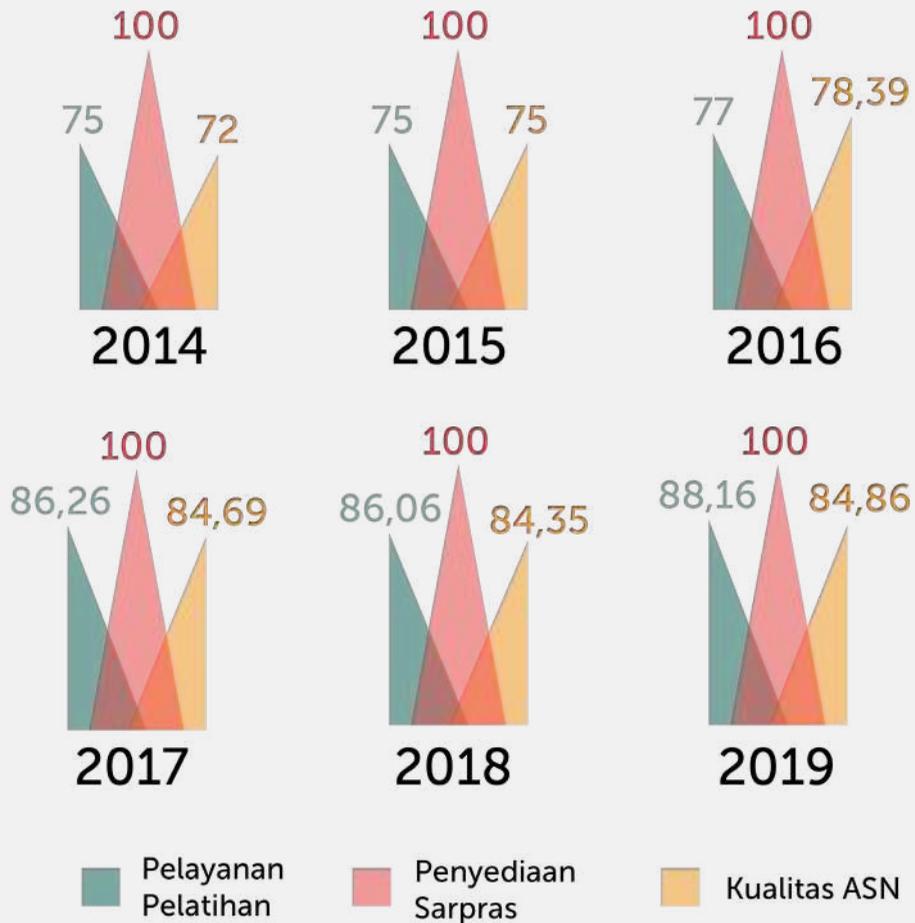
- Titik Awal



Belum tersedia sistem informasi manajemen pendidikan dan pelatihan untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai Kemendikbud.

- Capaian Program

Kinerja Layanan Pelatihan Pegawai





Inovasi

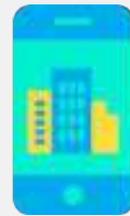


Simdiklat

Manajemen Kelas, Jadwal, Registrasi Peserta, Verifikasi Peserta, Penjadwalan Widyaiswara, Pencetakan Dokumen Administrasi, Presensi, Evaluasi, dan Sertifikat Pelatihan

SIMREFA

(Sistem Reservasi Fasilitas Gedung/Asrama)



MANAJEMEN MUTU

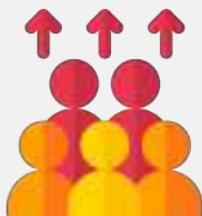
Pemutakhiran Sertifikat ISO 9001:2009 menjadi ISO 9001:2015

BLENDED LEARNING

Pelatihan Moda Kombinasi Daring dan Tatap Muka atau Klasikal



Dampak



Peningkatan Indeks Rerata Nilai Pegawai pascapelatihan 75 menjadi 84,86

Peningkatan Indeks Rerata Kepuasan Pegawai atas Pelayanan Pelatihan 75 menjadi 88,16



Persentase penyediaan sarana dan prasarana pendukung program pelatihan tahun 2015 s.d. 2019 adalah stabil 100%



Testimoni



"Secara pribadi saya sangat menikmati PKN (Pelatihan Kepemimpinan Nasional) Tingkat II ini walaupun tantangan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, terutama penyelesaian proyek perubahan, cukup besar. Namun, para mentor dan juga pengajar serta pembimbing sangat membantu dalam merumuskan proyek perubahan yang akan disusun dan dilaksanakan."

(Woro Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/ Bappenas, peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II angkatan VI Tahun 2019)



Rekomendasi



Pengembangan program-program pelatihan klasikal dan nonklasikal berbasis digital yang mampu menjangkau semua pegawai Kemendikbud sehingga pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pelatihan dengan minimal 20 JP (jam pelatihan) per tahun dapat terpenuhi.

Dapodik- Sistem Data Untuk Membangun Pendidikan Nasional

"Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan membuka akses informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik."

(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sebuah sistem pendataan pendidikan skala nasional yang terpadu, akurat, terpercaya, dan terkini. Dapodik merupakan konsep pengelolaan data pendidikan yang bersifat relational dan longitudinal untuk menjaga arah program pembangunan pendidikan, mempermudah penyusunan perencanaan, dan melakukan monitoring, serta evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran.

Pembahasan Pengadaan
Sekolah Berdasarkan Data
Pokok Pendidikan





Capaian Program

• Titik Awal

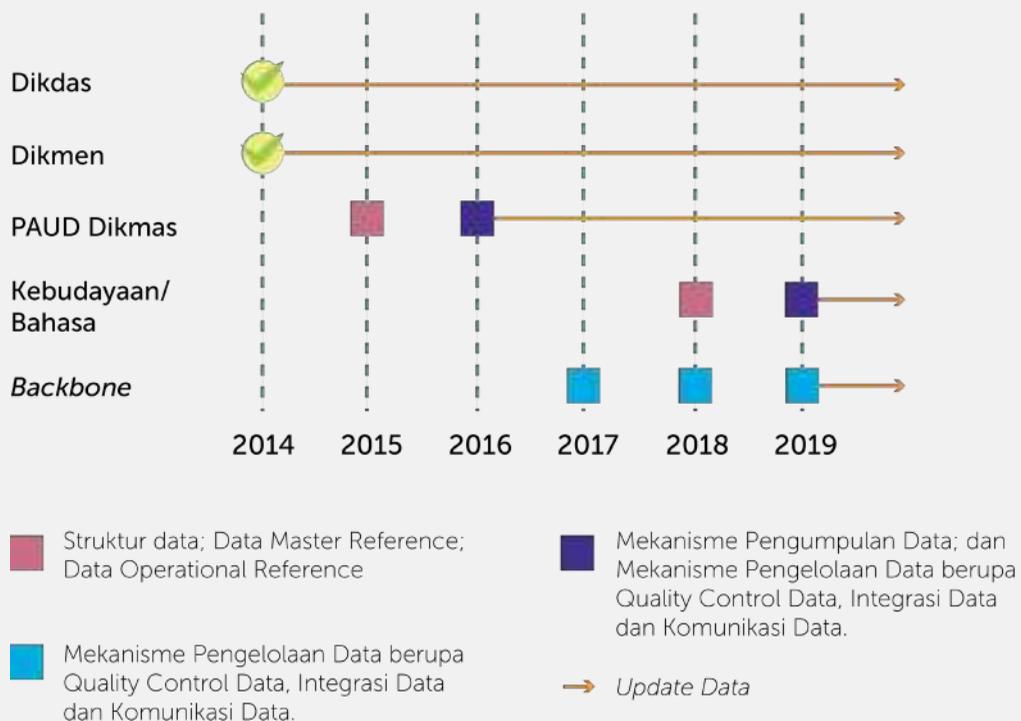


Tahapan integrasi yang dimulai dari Struktur Data, Data *Master Reference*, Data *Operational Reference* yang kemudian di lanjutkan dengan Mekanisme Pengumpulan Data, dan Mekanisme Pengelolaan Data, sudah dilakukan oleh jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Tahun 2014

• Capaian Program

Tahun 2015, tahapan integrasi diterapkan pada jenjang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Paud Dikmas), dan tahun 2018 diterapkan pada Kebudayaan/Bahasa.

Tahapan Integrasi





Inovasi



Dapodik saat ini sudah bisa diakses secara daring melalui laman dan turunannya berupa spasial, seperti laman sekolah, jendela, zonasi, dan lain-lain.

<http://dapodik.data.kemdikbud.go.id/>



Dampak



Data-data dalam dapodik dapat digunakan dalam rangka perencanaan dan penganggaran untuk oleh pemerintah pusat dan daerah



Dapodik memudahkan evaluasi data pembangunan pendidikan, misalnya dalam pemberian dana BOS.



Dapodik dijadikan data untuk peserta ujian nasional di tingkat SMP, SMA, dan SMK.



Testimoni



*"Keberadaan dan akses data pokok pendidikan membuat Pemda memiliki rujukan dalam perencanaan pengelolaan pendidikan di Provinsi, tidak hanya bagi Dinas Pendidikan."
(Gatot Bambang Hastowo, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah)*



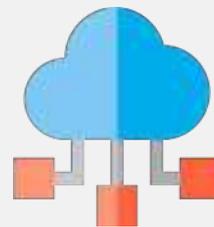
Rekomendasi



Data pendidikan perlu diintegrasikan dengan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama dan kementerian/ lembaga lain.



Data kebudayaan perlu dituntaskan dan diperluas ke kementerian/ lembaga lainnya.



Data pendidikan dan kebudayaan perlu segera distandarisasikan dalam rangka menyongsong kebijakan-kebijakan Satu Data Indonesia, Satu Peta Indonesia, dan Satu Identitas Indonesia.

Neraca Pendidikan Daerah (NPD), Acuan Prioritas Pembangunan Pendidikan di Daerah

“NPD dirancang untuk menggambarkan kondisi dan capaian pendidikan baik di provinsi, kabupaten, maupun kota. Saya berharap, NPD ini dapat dijadikan referensi untuk menyusun dan implementasi kebijakan yang berbasis data. Saya meyakini bahwa apabila hal tersebut dilakukan maka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan baik di seluruh provinsi, kabupaten, maupun kota bukanlah suatu yang sulit dan mustahil untuk dilakukan.”

(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

Neraca Pendidikan Daerah atau NPD merupakan terobosan yang dilakukan Kemendikbud sejak tahun 2015. NPD berisi informasi tentang anggaran pendidikan, satuan pendidikan, kualifikasi guru, keadaan siswa, angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), angka putus sekolah dan mengulang, indeks pembangunan manusia (IPM), hasil Ujian Nasional (UN) dan indeks integritas Ujian Nasional (IIUN), akreditasi, data budaya dan bahasa daerah.

Diskusi Kelompok
Terpumpun, Mencari
Solusi Permasalahan
Pendidikan Daerah dengan
Pemanfaatan NPD

**Diskusi
Kelompok
Terpumpun** 4

Pemanfaatan
**Neraca
Pendidikan
Daerah**

1. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
2. Kab. Ogan Ilir
3. Kab. Musi Rawas Utara
4. Kota Lubuklinggau

Palembang, 10 - 12 April 2019





Titik Awal (*Baseline*) & Capaian Program

- Titik Awal



Belum adanya satu platform yang memuat capaian pendidikan tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

- Capaian Program

Tampilan NPD mengalami perubahan dari tahun ke tahun menyesuaikan dengan perkembangan data



Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT)
Neraca Pendidikan Daerah





Inovasi

- Games/Simulasi Penganggaran Pendidikan Daerah

<https://npd.kemdikbud.go.id/simulasi/>



- NPD Berbasis Daring

<https://npd.kemdikbud.go.id/>

- NPD Berbasis Android



Neraca Pendidikan Daerah



Dampak



Masyarakat luas turut mengawasi dan berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan nasional dengan mengakses data dalam NPD.



NPD dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan sehingga kebijakan Pusat dan Daerah menjadi lebih harmonis dan sesuai kebutuhan di lapangan.



Testimoni



"NPD ini menjadi hal yang sangat penting karena menjembatani bukan hanya inspirasi dan visi pembangunan di tingkat pusat, tetapi perkembangan yang ada di daerah."

-(Yanuar Nugroho, Ph.D., Deputy II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas)



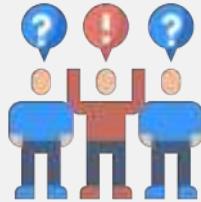
"NPD ini adalah pijakan bagi Kabupaten Lebak yang tingkat pendidikannya masih tertinggal karena NPD dapat menjadi patokan agar kami bisa bekerja lebih baik dalam membangun pendidikan Kabupaten Lebak."

(Agus Suherli, Kasubag Program Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak)

Permasalahan



Belum ada persamaan persepsi terkait definisi APBD antara Kemendikbud dan Kemendagri.



NPD belum dapat tersosialisasi dengan baik ke seluruh lapisan.



Belum dapat diketahui sejauh mana para pemangku kepentingan memanfaatkan NPD baik dalam penyusunan program kebijakan maupun dalam menyosialisasikan program pendidikan.



Rekomendasi



Perlu duduk bersama antara pengambil kebijakan di Kemendikbud dan Kemendagri dalam menyamakan suara terkait definisi APBD.



Diharapkan PASKA dapat bekerjasama dengan baik dengan unit kerja yang lain di Kemendikbud dalam menyosialisasikan NPD melalui program di masing-masing unit.



Perlu adanya kajian pemanfaatan NPD dengan menggunakan metode monitoring dan evaluasi baik di pemerintah pusat maupun daerah



Opini Publik



Najelaa Shihab

Pegiat Pendidikan dan Inisiator
Gerakan "Semua Murid Semua
Guru (SMSG)

Kemendikbud mulai memperhatikan masalah ketimpangan kesempatan pendidikan khususnya untuk anak-anak yang kurang beruntung. Baik kurang beruntung dari segi geografis maupun status ekonomi-sosial. Pendidikan di wilayah 3T semakin diperhatikan, dan Kartu Indonesia Pintar juga menjadi salah satu solusi untuk membantu anak Indonesia tetap bersekolah, belajar dengan lebih baik karena adanya bantuan ini. Selain itu, kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk bisa mengakses pendidikan yang berkualitas juga diharapkan meningkat dengan kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi.

Di lima tahun terakhir juga Kemendikbud menunjukkan perhatian ke kualitas capaian belajar. Setelah hasil tes internasional terus menerus menunjukkan kompetensi anak-anak Indonesia yang masih rendah, pemerintah menaruh perhatian pada pentingnya pembelajaran untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) dan upaya peningkatan kualitas guru yang lebih terstruktur. Monitoring capaian siswa juga sudah mulai dilakukan melalui AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia), sehingga kita mendapat informasi secara berkala tentang efektivitas sistem pendidikan kita dalam mengembangkan kompetensi anak-anak Indonesia.



Opini Publik



Bayu Eko Moektito / Bayu Skak

Personalia YouTube (YouTuber),
Aktor dan Komedian

Program yang dilakukan oleh Kemendikbud sudah baik dan diharap ke depan bisa terus semakin baik. Kalau saya melihat ke depan kebudayaan ditangani dengan baik mengingat kemarin Kemendikbud bersama dengan Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) Kemendikbud mendukung Film Yowis Ben. Film yang menggunakan bahasa daerah. Waktu itu saya dipanggil oleh Pak Muhadjir untuk mengobrol masalah film yang saya kerjakan, dan ternyata klop karena data dari Kemendikbud ada 2 bahasa daerah yang punah setiap tahun. Jadi jika ada film yang menggunakan bahasa daerah itu bagus sekali. Pak Muhadjir sangat mendukung penuh dan ketika sudah diberi dukungan pun saya menggarap dengan baik film tersebut, sampai akhirnya tembus angka penonton di atas dari target awal



Opini Publik



Prof. Arief Rachman

Tokoh Pendidikan Indonesia

Pak Muhadjir adalah seorang pendidik yang memiliki kekuatan filosofi pendidikan yang amat luas karena beliau adalah aktivis Muhammadiyah yang mengembangkan pendidikan berdasarkan dasar-dasar agama yang kuat dan modern. Filsafat pendidikan ini didasari oleh kekuatan agama yang dimilikinya. Kekuatan spiritual ini telah dimilikinya semenjak beliau sebagai mahasiswa. Memiliki wawasan internasional tentang pendidikan yang beliau peroleh dari Amerika Serikat (1993) dan Canada (1991).

Sebagai seorang Menteri yang berangkat dengan pondasi penulisan ilmiah yang telah dipublikasikan secara luas membuat Pak Muhadjir sebagai orang yang mampu menulis dan mempertanggungjawabkan pokok-pokok pikirannya pada jurnal-jurnal ilmiah. Ini menunjukkan bahwa Pak Muhadjir adalah orang yang gemar berpikir dan yang lebih menarik beliau

*berpikiran luas sampai kepada analisa beliau tentang TNI
(Kajian Hukum Keamanan Negara, Februari 2006).*

*Saya sebagai staf beliau di Komisi Nasional Indonesia
untuk UNESCO (KNIU) merasakan cara-cara beliau
mengelola Kemendikbud yang membuat staf beliau
mandiri dan patuh kepada peraturan profesi yang dimiliki
oleh stafnya serta kreatif memajukan pendidikan dan
kebudayaan. Kita semua, bangsa dan negara beruntung
memiliki putra bangsa seperti Bapak Prof. Dr. H. Muhadjir
Effendy.*

*Terakhir, saya berharap pendidikan Indonesia ke depannya
bisa memenuhi amanat tujuan pendidikan sesuai Undang-
Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.*



Nila Tanzil

Pegiat Literasi dan Pendiri
Taman Bacaan pelangi

Saya senang sekali Kemendikbud mencanangkan Gerakan Literasi Nasional dan semakin banyak komunitas-komunitas yang fokus di bidang literasi. Saya berharap Kemendikbud memiliki program Gerakan Literasi Nasional yang aktif dan memperbanyak koleksi buku-buku cerita anak, karena temuan di lapangan buku-buku yang disediakan untuk perpustakaan Sekolah Dasar (SD) banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang mengakibatkan tidak tepat sasaran dan perpustakaan sekolah mati.

Hal yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan di bidang literasi dasar serta manajemen kelas, terutama guru-guru di daerah pelosok dan Indonesia Timur. Semoga dengan demikian, minat baca serta kemampuan membaca anak-anak di Indonesia semakin meningkat, budaya membaca semakin terbentuk, guru-guru memiliki kemampuan mengajar yang baik dan pengetahuan yang mumpuni, serta berharap kualitas pendidikan di Indonesia semakin merata, dan daerah-daerah pelosok memiliki kualitas pendidikan yang baik.



Ucapan terima kasih

Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan seluruh pihak, para pimpinan unit-unit utama, staf ahli dan staf khusus Mendikbud, seluruh kontributor di lingkungan Kemendikbud, dan para pegiat pendidikan dan kebudayaan yang telah bekerja sama dan membantu dalam penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan Bapak/Ibu semua. Aamiin.

Terima kasih.